

SUGIARTO PRAMONO

**“MEMBACA” HUBUNGAN INTERNASIONAL:
dari konflik antar negara hingga pembangunan lokal**



**Wahid Hasyim
University Press**

**“MEMBACA” HUBUNGAN INTERNASIONAL:
Dari konflik antar negara hingga pembangunan local
--Edisi Revisi--**

Penulis : Sugiarto Pramono, SIP., MA.
Desain Cover : M. ARIF MAULANA
ISBN : 978-602-8273-43-5
Edisi revisi : 1 Januari 2015

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik rekam lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis.



Wahid Hasyim University Press

Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang,
telp. 0248505680, Fax: 0248505681

KATA PENGATAR EDISI REVISI

Alhamdulillah, edisi revisi dari buku ini telah selesai di buat. Sedikitnya ada 4 [empat] bab baru yang menurut penulis merepresentasikan perkembangan hubungan internasional dalam perspektif Indonesia. Keempat tulisan dimaksud adalah: *Revolusi mental Politik Luar Negeri Jokowi; Demam India dan budaya konsumen Indonesia; Krisis identitas dan ancaman ISIS; dan Bali Demokrasi Forum*. Keempat bab tersebut berada di bawah judul payung: *Indonesia Kontemporer* yang diletakkan di bab ke delapan. Penulis berharap penambahan bab baru tersebut dapat membuka ldiskusi baru dalam studi Hubungan Internasional terutama dalam konteks kepentingan Indonesia. Amien.

Semarang, 1 Januari 2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, akhirnya buku ini selesai disusun. "*Membaca*" *Hubungan Internasional: dari konflik antar negara hingga pembangunan lokal* berisi 36 artikel yang penulis buat untuk media massa. Hampir semua tulisan dalam buku ini pernah dikirim ke media massa seperti Suara Merdeka, Kompas, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos maupun Wawasan. Sebagian diantaranya dimuat namun sebagian yang lain tidak.

36 tulisan tersebut penulis bagi ke dalam 8 topik terkait Studi Hubungan Internasional dari yang konvensional seperti perang, keamanan dan strategi hingga kontemporer seperti pembangunan lokal dan lingkungan. Masing-masing topik berisi beberapa tulisan dengan jumlah yang berbeda-beda. Adapun kedelapan topik tersebut antara lain yaitu: ***konflik*** yang berisi 5 tulisan; ***nuklir*** berisi 3 tulisan; ***konspirasi*** terdiri 4 tulisan; ***strategi*** berisi 3 tulisan; ***diplomasi*** 4 tulisan, ***ekonomi*** 5 tulisan; ***demokrasi*** 5 tulisan; dan ***pembangunan lokal*** 7 tulisan.

Karena tidak dimaksudkan untuk disusun menjadi sebuah buku seperti yang sekarang ada dihadapan pembaca, maka argumentasi yang dibangun dalam buku ini terkesan meloncat-loncat, inkonsistensi, dan terputus-putus. Hal ini sangat bisa dimengerti karena masing-masing tulisan lahir dari konteks peristiwa yang berbeda-beda. Bila gagasan seseorang merupakan respon terhadap seting sosial politik yang melingkupinya, maka tulisan ini merupakan gagasan yang lahir dari beragam seting sosial politik yang melingkupi

penulis dalam tenggat waktu setidaknya tiga tahun dari 2009-2013.

Buku ini merupakan kumpulan dari puluhan artikel penulis dengan latar belakang penulisan yang beragam, sehingga pembaca dapat mulai membaca buku ini dari mana saja. Pembaca misalnya bisa memulai dari tengah, dari depan atau langsung dari belakang, *it's ok*. Ini tidak membuat pembaca kesulitan dalam memahami gagasan yang disuguhkan penulis dalam buku ini.

Upaya penulis untuk menghimpun tulisan-tulisan tersebut menjadi sebuah buku, tidak penulis maksudkan untuk menunjukkan prestasi penulis. Namun harapan penulis semuga upaya ini dapat mempermudah para peminat Studi Hubungan Internasional untuk mengakses informasi terkait studi yang mereka geluti, kendati hanya berupa penggalan-penggalan kecil informasi penulis berharap semuga tulisan ini membawa manfaat, baik dari sisi akademis maupun praktis.

Lebih dari itu, penulis juga sangat berharap semuga karya kecil ini disenangi oleh Allah swt. Amien. Menjadi amal jariah penulis. Sebagaimana sabda Nabi, bahwa seluruh amal anak adam akan terputus ketika meninggal, kecuali 3 hal dan salah satunya adalah ilmu yang manfaat.

Penulis sangat berhutang budi kepada banyak sekali orang yang telah membantu merampungkan manuskrip ini. Tentu mustahil untuk menyebutkan satu persatu nama-nama mereka. Hanya sejumlah nama yang dapat penulis sebut karena alasan keterbatasan ruang, mereka adalah: Sudarno dan Daimah, Ayah dan Ibu penulis yang selalu menyebutkan nama penulis di setiap doa yang mereka panjatkan. Sungguh mulia kedudukan mereka di sisi penulis; Rosyidah,

Istriku tercinta yang sangat sabar dalam mendampingi penulis. Memuakkan memiliki suami yang selalu menyibukan diri di depan *lap top* seharian dan enggan membantu pekerjaan istri, namun itu semua justru dibalas dengan kesetiaan dan perhatian penuh darinya.

Kemudian, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Wahid Hasyim, Dr. H. Noor Achmad, MA., yang selalu memberi dorongan dan bimbingan pada penulis; Dekan FISIP UNWAHAS, Andi Purwono, SIP, MA., yang menjadi dosen kebanggaan penulis selama penulis kuliah di FISIP UNWAHAS, para senior di FISIP UNWAHAS yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, Bu Ismi, Bu Ana, Pak Agus, Mas Harun Ni'am, Pak Martin, Pak Adib dan Pak Joko; rekan-rekan seperjuangan: Mas Aji, Mas Adi, Gus Azmi dan Mas Zudi Setiawan, kalian dahsyat. Semuga apapun dan seberapa bantuan mereka terhadap penulis dalam merampungkan tulisan ini, dibalas oleh Allah *subhanallahu wata'ala* dengan balasan yang berlipat-lipat. Amien.

Semarang, 1 Januari 2015

DAFTAR ISI

Kata pengantar edisi revisi

Kata pengantar

BAGIAN PERTAMA:

KONFLIK

- Bab 1. ASEAN dan Krisis Thailand
- Bab 2. Menanti ketegasan Pemerintah
- Bab 3. Implikasi Politik Krisis Korut
- Bab 4. Peluang dari Preah Vihear
- Bab 5. Resolusi Konflik Palestina-Israel

BAGIAN KEDUA:

NUKLIR

- Bab 6. Negara Sadar Nuklir
- Bab 7. Neo Pax Americana
- Bab 8. Mengembargo Iran

BAGIAN KE TIGA:

KONSPIRASI

- Bab 9. Skenario Politik Mesir
- Bab 10. Arogansi Israel
- Bab 11. Di balik sikap anti Israel Inggris
- Bab 12. Terorisme, aksi atau reaksi?

BAGIAN KE EMPAT:

STRATEGI

- Bab 13. Membaca kepentingan Amerika di Indonesia
- Bab 14. *Asean charter*, omong kosong
- Bab 15. Mensiasati perubahan Myanmar

**BAGIAN KE LIMA:
DIPLOMASI**

- Bab 16. Diplomasi Indonesia-Amerika
- Bab 17. Masa depan dialog antar peradaban
- Bab 18. *Soft power* mujahadah
- Bab 19. Hubungan Islam-Barat, Menanti peran kunci Indonesia

**BAGIAN KE ENAM:
EKONOMI**

- Bab 20. 60 tahun Indonesia-Cina
- Bab 21. Indonesia dan APEC 2013
- Bab 22. Indonesia pemimpin ASEAN
- Bab 23. Pasar Bebas Bukan “Hadiah Tahun Baru”
- Bab 24. Membaca Peluang dari Jepang

**BAGIAN KE TUJUH:
DEMOKRASI**

- Bab 25. Implikasi politik keruntuhan rezim Mubarak
- Bab 26. Implikasi pelarangan *burqa* di Prancis
- Bab 27. Faktor internasional kebekuan Demokrasi Burma
- Bab 28. Memaknai luka Dorit Beinisch
- Bab 29. Quo vadis Demokrasi Myanmar?

**BAGIAN KE DELAPAN:
PEMBANGUNAN LOKAL**

- Bab 30. Kota dalam kompetisi global
- Bab 31. Mendorong partisipasi lokal dalam *AEC*
- Bab 32. Menyadari potensi lokal, bersaing di tingkat global
- Bab 33. Bara Ratchaprasong
- Bab 34. Krisis lingkungan dan masyarakat Global
- Bab 35. Pemda, go global !
- Bab 36. Setahun bara Urumqi

**BAGIAN KE DELAPAN:
INDONESIA KONTEMPORER**

Bab 37. Revolusi mental Politik Luar Negeri Jokowi

Bab 38. Demam India dan budaya konsumen Indonesia

Bab 39. Krisis identitas dan ancaman ISIS

Bab 40. Bali Demokrasi Forum

Tentang penulis

BAGIAN PERTAMA KONFLIK

BAB 1

ASEAN DAN KRISIS THAILAND

Krisis Thailand, nampaknya semakin menjadi. Tak ada dari para pihak berseteru yang mau mengalah dan sedikit saja membuka kesempatan negosiasi. Sementara kelompok kaus kuning menginginkan internalisasi konflik Thailand, kelompok kaus merah berupaya menarik PBB dalam kubangan krisis. Politikus Kaus Merah, Jaran Dittha-apichai, mengatakan, kelompoknya bersedia berunding. "Asal melalui pihak ke tiga, yaitu PBB" (Tempo, 26 April-2 Mei 2010, hal 132).

Beberapa permasalahan menarik: kenapa justru PBB bukan ASEAN yang jelas-jelas beroperasi secara khusus di kawasan Asia Tenggara?, tidakkah hal tersebut menurunkan kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara yang bertugas menjaga stabilitas kawasan?, mengapa pula ASEAN tidak memainkan peran penting dalam mediasi krisis politik di Thailand?, apa kelemahan organisasi kawasan ini sehingga tidak dapat berkitik? Masih relevankah keberadaan organisasi kawasan tersebut? bagaimana seharusnya ASEAN berperan?. Tulisan ini bermaksud memberikan sejumlah analisis.

Aneka program yang didesain, dirancang dan di rencanakan oleh organisasi kawasan, seperti ASEAN sudah seharusnya merupakan program-program yang berbasis kebutuhan kawasan. Munculnya aneka permasalahan sosial, ekonomi dan politik di Asia Tenggara seyogyanya menjadi basis untuk menyusun program ASEAN. Tak terkecuali konflik

di kawasan ini yang sangat subur dan relatif merata, dari konflik antar negara hingga antar etnis di dalam dan lintas negara.

Salah satu contoh yang masih segar dalam ingatan kita adalah krisis politik di Bangkok, yakni konflik antara kelompok Kaus merah yang mendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawarta dengan kelompok kaus kuning yang mendukung Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva. Melihat kerasnya watak kedua kelompok tersebut, nampaknya krisis akan terjadi sangat lama. Terhadap krisis politik itu, ASEAN lebih nyaman berpangku tangan, *wait and see*. Hemat saya setidaknya ada 3 faktor yang mendorong ASEAN hanya menjadi penonton.

Pertama, ASEAN tidak memiliki lembaga Eksekutif atau pelaksana, hanya merupakan kesepakatan suka rela yang tidak mengikat. Berbeda dengan, misalnya, Uni Eropa di Eropa yang memiliki Komisi Eropa, sehingga aneka kesepakatan dapat direalisasikan oleh lembaga yang memang ditugaskan untuk mengerjakannya. Inilah yang membuat ASEAN tidak lebih dari sekedar semacam "forum arisan" para kepala negara Asia Tenggara. Aneka kesepakatan yang telah disepakati dalam bermacam forum-forum ASEAN menjadi ampang, tidak berbobot, karena bisa dengan enak saja, sebuah negara menerima ataupun menolanya. Inilah, barangkali juga yang menjadi alasan kenapa anggota parlemen Partai Phue Thai lebih memilih PBB daripada ASEAN.

Tidak dimilikinya lembaga eksekutif oleh ASEAN, berimplikasi pada munculnya faktor *kedua*, yaitu lemahnya kebijakan ASEAN, indikatornya adalah tidak ada sanksi yang

mengikat bagi siapapun yang tidak patuh kepada aturan yang telah disepakati pada forum ASEAN. Tidak peduli apakah negara anggota akan patuh atau *mbalelo* kepada keputusan organisasi kawasan ini, tidak akan ada sanksi apapun yang akan ditanggung. Buruknya integritas negara-negara Asia Tenggara yang nampak dari sering diabaikannya aneka keputusan-keputusan ASEAN memberikan pelajaran pada pihak-pihak bersengketa, termasuk Thailand untuk tidak mempercayakan penyelesaian masalah pada organisasi kawasan ini.

Ketiga, Prinsip non-Intervensi. Keberadaan prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara anggota ASEAN tersebut diyakini menjadi faktor kunci bagi sulitnya penyelesaian aneka permasalahan di tingkat domestik dan sekaligus, harus diakui pula, menjadi tameng pelindung bagi para penguasa yang telah melakukan dosa-dosa HAM dari intervensi eksternal.

Terus dipertahankannya prinsip non-intervensi oleh negara anggota, memaksa siapaun untuk berkesimpulan bahwa, terdapat konspirasi ditingkat regional untuk mengamankan kekuasaan rezim-rezim politik yang berkuasa ditingkat domestik negara-negara Asia Tenggara.

Jamak diketahui rezim politik di negara-negara Asia Tenggara memiliki karakter seperti: (1) *korup*, lihat Indonesia yang menempati urutan ke 5 di ASEAN dan 111 di dunia (versi *Transparency International Indonesia/ TII*); (2) berada pada fase *transisi demokrasi*, bahkan ada yang masih otoriter seperti Myanmar, yang berimplikasi pada; (3) memiliki prestasi yang buruk dalam penegakan HAM; serta (4)

memiliki respon yang lemah terhadap aspirasi warga Negara, lihat kasus "cicak Vs buaya" di Indonesia, nampak betapa respon pemerintah pada desakan warga Negara sangat lemah, di Myanmar respon junta terhadap tekanan masyarakat akar rumput pada tingkat domestik dan aneka tekanan pada tingkat regional bahkan global terkait dengan kasus Aung San Suu Kyi pun tidak jauh beda, rezim bersifat konserfatif, menolak aneka perubahan yang mereduksi kekuasaan para penguasa.

Karakter-karakter tersebut berimplikasi pada terciptanya rezim sejenis pada level regional Asia Tenggara. Karakter konserfatif dan anti dialog dengan masyarakat pun mengkristal, permisalan paling kasat mata yang dapat di tunjuk adalah sikap Filipina, Singapura, Burma, Kamboja, dan Laos yang telah menunjuk sendiri perwakilan masyarakat sipil dalam forum dialog dengan 10 pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke 15 di Hun Hin (2009). Peristiwa tersebut mengindikasikan ketidak relaan para pemimpin ASEAN untuk secara terbuka berdialog dengan posisi seimbang dengan warga Negara.

Prinsip non intervensi merupakan indikator yang menunjukkan betapa rezim politik domestik telah mentransformasikan diri secara kolektif menjadi rezim regional. Sejatinya prinsip tersebut didesain sebagai metode untuk melanggengkan rezim-rezim politik domestik dari aneka gangguan campur tangan asing. Prinsip non intervensi menghalangi ASEAN untuk campur tangan terhadap masalah domestik Thailand, selain memang, ASEAN diabaikan dalam upaya resolusi konflik tersebut.

Relevansi ASEAN

Melihat aneka kelemahan ASEAN tersebut, maka sulit rasanya untuk mengatakan, ASEAN layak dipercaya sebagai agen resolusi konflik kawasan, kecuali bila organisasi kawasan tersebut bersungguh-sungguh dalam menstransformasikan diri menjadi organisasi yang tidak hanya berorientasi negara (*state oriented*), namun juga harus menyertakan masyarakat (*community*) sebagai orientasi utama. Sehingga keamanan negara (*state security*) misalnya, tidak serta merta mereduksi keamanan masyarakat (*Human Security*). Tidak demi keamanan penguasa, kemudian rela mengorbankan kepentingan warga negara. Dalam konteks kepentingan keamanan, ekonomi, maupun sosial dan budaya sudah saatnya ASEAN memberdayakan masyarakat raya Asia Tenggara.

Sangat mustahil, upaya transformasi ASEAN dari *state oriented* menjadi *community oriented* tanpa mereduksi setahap demi setahap aneka kelemahan ASEAN sebagaimana di uraikan sebelumnya. Sebaliknya untuk mewujudkan ASEAN yang perkasa dan berperan besar dalam aneka problematika di Asia Tenggara, maka ASEAN harus memiliki lembaga Eksekutif sebagai lembaga yang menjadi pelaksana dari aneka kesepakatan yang dihasilkan; kebijakan yang mengikat dengan memberikan sanksi bagi negara anggota (*state member*) pelanggar serta menghapus prinsip non-intervensi yang kerap kali menciderai nilai-nilai HAM, demi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dengan ASEAN baru diharapkan tidak hanya krisis politik Thailand, aneka krisis lain yang tersebar merata di seantero Asia Tenggara diharapkan mampu teratasi dengan

sebaik mungkin tanpa mengurangi harga diri ASEAN dengan melibatkan campur tangan pihak asing dari luar kawasan.

Wawasan, 31 April 2010

BAB 2

MENANTI KETEGASAN PEMERINTAH

Untuk kesekian kalinya dinamika hubungan Jakarta-Kualalumpur memanas. Peristiwa pengembalian tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada pemerintah Indonesia yang waktunya berdekatan dengan waktu dipulangkannya tujuh pencuri ikan asal Malaysia ke negerinya dimaknai sebagian publik di nusantara sebagai barter. Pertunjukkan tukar pejabat dengan penjahat kontan membawa reaksi sangat keras dari warga negara di nusantara. Harga diri bangsa menjadi alasan kemarahan publik.

Peristiwa tersebut tak ayal memutar kembali serangkaian perlakuan tidak simpatik negeri Jiran kepada bangsa ini. Mulai masalah klaim budaya, pulau, aneka permasalahan TKI hingga perbatasan segera muncul di benak masyarakat di bumi pertiwi. Kemarahan publik diekspresikan melalui demonstrasi massa anti Malaysia yang nampaknya mengalami eskalasi terus membesar. Ironisnya, kendati aksi massa "ganyang Malaysia" begitu luar biasa keras, namun tidak ada langkah konkrit yang berarti yang dilakukan pemerintah untuk merespon sikap tidak hormat Malaysia kepada bangsa Indonesia.

Bahkan pidato presiden yang diharapkan banyak orang akan menampilkan ketegasan, dianggap oleh banyak kalangan tidak menunjukkan ketegasan apapun. Di sisi lain pidato tersebut justru seolah-olah mengisyaratkan upaya pemerintah untuk meredam gejolak publik di negeri ini.

Padahal, alih-alih mampu mereduksi gelombang demonstrasi anti Malaysia, upaya pemerintah untuk meredam kemarahan publik nampaknya akan sia-sia saja dan justru berdampak sebaliknya: (1) karena gerakan massa anti negeri Jiran itu dilatar belakangi oleh semangat nasionalisme; (2) media massa terus menyorot dan berimplikasi pada gerakan massa yang akan semakin membesar; dan (3) dalam kondisi demikian provokasi akan semakin mudah dilakukan.

Aneka faktor tersebut membuat berbagai upaya pemerintah untuk meredam demonstrasi menjadi kontra produktif. Sikap pemerintah yang tidak sejalan dengan kemauan sebagian masyarakat di Republik ini bukan tanpa pengaruh. Tulisan ini bermaksud menjajaki berbagai kemungkinan implikasi politik dari ketidaktegangan pemerintah terhadap arogansi Malaysia.

Pertama, deligitimasi pemerintah. Kegemasan bangsa Indonesia terhadap Malaysia yang tercermin dalam aneka bentuk demonstrasi anti Malaysia di seantero negeri ini ternyata tidak membekaskan apapun di benak pemerintah. Hal tersebut nampak dari lembeknya sikap yang diambil pemerintah dalam merespon aneka aksi tidak simpatik negeri Jiran. Respon pemerintah yang dinilai lemah itu berpotensi mereduksi legitimasi warga negara terhadap eksekutif. Sebagai presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat sudah sewajarnya bila aneka kebijakan yang diambil sang presiden berpihak pada kepentingan rakyat, namun hal itu tidak dilakukan.

Kedua, Implikasi lanjutan dari terkikisnya legitimasi publik pada pemerintah adalah ancaman disintegrasi bangsa.

Bukan tidak mungkin kekecewaan warga negara di daerah pada pemerintah pusat akan membakar semangat disintegrasi bangsa. Nampaknya presiden gagal dalam menyerap aspirasi para pemilihnya pada pemilu 2009 lalu. Dalam konteks ini maka seyogyanya pemerintah merespon dengan cepat dan cerdas kemauan publik dan mentransformasikannya dengan cerdas kepada Malaysia. Pesan ketidaksukaan bangsa ini harus diketahui oleh pemerintah dan publik di Malaysia. Mereka juga harus paham bahwa serangkaian langkah-langkah nyata seperti pemutusan hubungan diplomatik maupun menarik pulang para pekerja migran sangat mungkin dilakukan Indonesia bila Malaysia tidak mau meminta maaf dan mengubah caranya memperlakukan Indonesia.

Pemerintah tinggal sedikit saja memutar otak untuk, misalnya, mempersiapkan lapangan kerja bagi buruh migran bila kebijakan menarik TKI dari Malaysia dilakukan. Pembangunan gedung DPR yang memakan biaya 1,6 milyar bisa ditangguhkan atau dibatalkan berdasarkan prinsip sekala prioritas untuk keperluan menyediakan lapangan kerja bagi TKI dari Malaysia. Bila strategi ini dilakukan maka tidak hanya harga diri bangsa yang akan diperoleh bahkan Malaysia yang arogan akan mengalami guncangan ekonomi yang luar biasa besar mengingat dua sektor—bangunan dan perkebunan kelapa sawit—yang dikerjakan oleh dua juta jiwa lebih TKI dari Indonesia tidak ada yang mengerjakan. Dalam waktu tidak lebih dari satu bulan bila Malaysia tidak mendapat pekerja pengganti maka kelapa sawit akan membusuk.

Di sisi lain ketegasan pemerintah akan berdampak pada popularitas badan eksekutif ini di mata publik.

Momentum ini sudah seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperbaiki reputasinya yang buruk menyusul tragedi tabung gas, kasus *century*, pemberantasan korupsi yang buruk serta serangkaian kegagalan pemerintah yang cukup memilukan.

Ketiga, berlarut-larutnya krisis hubungan kedua negara. Semakin lama upaya pemerintah untuk memperbaiki hubungan tersebut maka bukan tidak mungkin aneka masalah yang bertumpuk justru menjadi "bom waktu" yang akan meledak kapan saja. Selain itu, Malaysia akan mempelajari cara pemerintah RI merespon sikapnya. Sikap lunak pemerintah selama ini nampaknya akan mengajari negeri Jiran untuk memperlakukan bangsa Indonesia dengan cara-cara yang lebih tidak sopan lagi. Presepsi pemerintah dan masyarakat di Malaysia terhadap bangsa Indonesia yang dianggap lemah dan lunak akan semakin menguat.

Realisme politik mengajarkan kepada Malaysia untuk bersikap anarki. Kelemahan dan ketidaksiagaan bangsa Indonesia baik secara ekonomi, politik, keamanan maupun integrasi akan dimanfaatkan Malaysia untuk memegang kendali "Bangsa Soekarno" ini. Dalam konteks tersebut seharusnya para pembuat kebijakan di Indonesia sangat paham dengan tradisi anarki yang berlaku di ranah internasional sehingga berbagai langkah strategis guna merespon politik ekspansionis Malaysia dapat sedini mungkin dibaca dan diantisipasi.

Keempat, Tidak hanya hubungan buruk antar kedua pemerintahan yang tidak kunjung usai, ketidaktegangan pemerintah juga berpotensi memperburuk keadaan yang

sedang terjadi. Alih-alih mendinginkan suasana, waktu yang seolah diulur-ulur pemerintah untuk tidak kunjung mengambil langkah konkrit justru membuka kesempatan bagi aneka aksi provokatif oleh pihak-pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang diuntungkan dengan situasi tersebut.

Kelima, implikasi lain dari ketidak tegasan pemerintah adalah buruknya citra Bangsa besar ini di mata publik global. Di era komunikasi semua bangsa di seluruh planet bumi sedang mengawasi apa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Setiap respon pemerintahan RI yang tidak tegas akan membangun citra bangsa ini di mata dunia. Dan kontruksi citra tersebut menjadi acuan bagi bangsa-bangsa lain di seluruh permukaan bumi untuk memperlakukan bangsa kita.

Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin gerakan non blok di saat perang dingin berlangsung, inisiator dan *founding father* ASEAN ternyata tidak mampu mengelola hubungan dengan tetangga dekatnya. Kegagalan ini tentu sangat mencoreng citra bangsa besar ini di mata publik publik global. Itu semua tidak perlu terjadi bila pemerintah memiliki ketegasan kepada Malaysia. Segenap elemen bangsa pasti siap berada di belakang keputusan pemerintah bila nyata-nyata keputusan itu berpihak pada kepentingan bangsa.

Semarang, 3 September 2010

BAB 3

IMPLIKASI POLITIK KRISIS KORUT

Ketegangan dua korea nampaknya bertambah panas, terutama setelah Korea Utara (Korut) dituduh telah menembakkan torpedo kepada kapal perang korea selatan (Korsel), 26 Maret lalu. Hubungan kedua korea bukan tanpa pengaruh berarti bagi stabilitas ekonomi, politik dan keamanan global. Keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalin hubungan di antara kedua tetangga itu membawa implikasi pada tingkat domestik, kawasan bahkan global yang cukup signifikan.

Mengapa krisis hubungan di antara kedua Negara tersebut memainkan peran kunci dalam stabilitas ekonomi, politik dan keamanan global? Apa implikasi politik dari disharmoni hubungan kedua korea? Serta bagaimana seyogyanya manajemen konflik kedua Korea dikelola? Tulisan ini bermaksud memberikan sejumlah analisis.

Kegagalan upaya mediasi kedua korea memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi, politik dan keamanan pada tingkat global, kawasan maupun domestik, karena sedikitnya tiga alasan: (1) melibatkan negara-negara besar; (2) sifat Korut yang seperti "meriam tak terkendali"; serta (3) senjata nuklir.

Negara-negara besar

Sedikitnya ada 4 negara besar yang terkait dengan krisis Korut, yaitu: Amerika Serikat (AS), Cina, Jepang dan Rusia. AS secara tegas menempatkan posisinya berada pada

pihak Korsel. Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, Rabu (26/5/2010) tiba di Korsel sebagai bentuk dukungan. AS telah menjanjikan dukungan kepada Korsel yang sudah berjanji untuk membuat Korut membayar, menyusul serangan yang membelah korvet Korsel menjadi dua pada Maret lalu dengan kematian 46 tentara di dalamnya (Kompas.com, 26 Mei 2010).

Sementara Cina, sebagai salah satu negara pemegang hak *vetto* di PBB, tak ayal menjadi target utama AS untuk dijadikan mitra dalam mengelola krisis Korea. Dan nampaknya Cina sudah memberikan sinyal positif terhadap niat AS. Hal ini nampak dari pernyataan Wakil Menlu Cina Cui Tiangkai, "Kami siap untuk bekerja sama dengan AS dan pihak lainnya serta terus memerhatikan secara dekat situasi di Semenanjung Korea"(Kompas. Com, 26 Mei 2010). Sejalan dengan Cina adalah Jepang, Jepang bahkan telah memutuskan memperketat sanksi-sanksi keuangannya terhadap Korut berkaitan dengan tenggelamnya kapal Cheonan (Kompas. Com, 28 Mei 2010).

Sementara pada sisi yang berseberangan, Rusia tidak akan mendukung upaya menghukum Korea Utara yang dituduh menenggelamkan kapal Korsel, kecuali kalau ada bukti yang kuat, demikian juru bicara kementerian luar negeri Rusia sebagaimana dikutip dari <http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/bulletin/rusia-tidak-dukung-hukuman-korea-utara>.

Keterlibatan keempat negara itu saja sudah cukup kuat untuk memberikan pengaruh perubahan pada tingkat global. Sulit disangkal kendati faktor ideologi sudah dianggap usang untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa politik di tingkat global, namun nampaknya cukup relevan untuk memetakan

konstalasi kepentingan pada krisis Korea. Rusia merasa perlu mencampuri urusan Korea lebih dalam, bukan hanya karena faktor geografis dan keamanan yang berdekatan, namun juga faktor ideologi. Ingat, bagaimanapun Rusia adalah pewaris utama Uni Soviet.

Karakteristik Korut

Korut merupakan salah satu dari tiga negara yang dalam kacamata kepentingan AS menjadi batu sandungan cukup berarti. Setelah Irak yang telah dilumpuhkan, tersisa Iran dan Korut. Kedua negara terakhir memiliki politik luar negeri anti Amerika. Lebih dari itu, keduanya bahkan dikenal sebagai negara yang tidak bisa dibujuk dengan aneka jurus apapun untuk sekedar menghentikan proyek pengembangan nuklirnya.

Korut adalah "meriam" yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Berbagai kebijakannya kontroversial, tidak populer dan dianggap sangat berbahaya bagi stabilitas global. Dengan karakteristiknya yang ekstrem maka apapun bisa dilakukannya.

Senjata Nuklir

Kendati tidak ada jaminan bahwa proyek pengembangan uranium yang dilakukan Korut sudah sampai pada tahap mampu ditransformasikan menjadi senjata pemusnah massal yang memiliki kemampuan daya destruktif ekstrem, namun kekhawatiran tersebut bukan tidak mungkin akan menjadi kenyataan. Dan bukan hal mustahil pula bila Korut menggunakan senjata kontroversial itu.

Cukup beralasan bagi siapapun untuk tidak mempercayakan begitu saja senjata nuklir kepada negara dengan karakter seperti Korut. Bila kekhawatiran yang dialami warga dunia, bahwa Korut memiliki dan akan menggunakan senjata pemusnah massal maka tragedi Hiroshima dan Nagasaki akan terulang.

Tiga alasan tersebut nampaknya semakin meyakinkan betapa kubangan krisis Korea begitu kuat pengaruhnya terhadap konstalasi ekonomi, politik dan keamanan baik pada tingkat domestik, kawasan bahkan global.

Implikasi krisis Korut

Sulit dipungkiri pada semua tingkat dari domestik hingga global akan terkena imbas krisis Korea. Baik ranah ekonomi, politik maupun keamanan akan mengalami disabilitas dengan kadar yang cukup parah. Dampak terburuk pada tingkat global akan terjadi konflik terbuka yang akan melibatkan negara-negara besar. Krisis keamanan kontan akan membawa dampak lanjutan pada disabilitas ekonomi global.

Atau setidaknya, bila tidak terjadi konflik terbuka, maka ketegangan yang terjadi akan mempengaruhi perekonomian global sembari mempertegas posisi negara-negara besar. Hal serupa akan terjadi pada tingkat kawasan, bila pada tingkat global saja distabilitas ekonomi dan keamanan sulit dicegah terlebih pada tingkat kawasan. Pada tingkat ini, maka kawasan Asia Pasifik dan terutama Tenggara menjadi area yang paling sulit, negara-negara kawasan sedikit banyak akan terkena imbas, bila yang terjadi konflik terbuka

maka korban dengan aneka jenis dan besarnya yang tak bisa diramalkan akan menjadi keresahan yang memilukan. Sebaliknya bila yang terjadi sebatas pada ketegangan yang tak berkesudahan maka paling-paling para investor akan mencari aman dengan meninggalkan Korut yang diakhiri dengan kesulitan ekonomi dalam negeri, dengan korban warga sipil.

Aneka potensi aksi sparatisme, pemberontakan dan disintegrasi di tingkat domestik Korut terbuka lebar. Krisis sosial dan aneka pelanggaran HAM akan mengikuti. Inilah kontraproduktif dari cara yang dilakukan AS dan sekutunya dalam merespon krisis Korut. Alih-alih membukakan jalan damai, dukungan AS terhadap korsel justru berimplikasi pada semakin runcingnya konflik kedua Korea.

Manajemen Konflik

Nampaknya krisis Korea akan berlangsung lama, mengingat: (1) pihak-pihak bersengketa bersih keras pada posisinya masing-masing bahkan sampai pada titik tidak mau membuka dialog; (2) terdapat kepentingan dan kekuatan yang lebih besar daripada sekedar kepentingan dan kekuatan nasional kedua Korea, yakni kepentingan global Amerika. AS bermaksud mendesain sistem global yang bisa dikendalikan penuh sehingga negara-negara yang tidak kompromistis seperti Iran dan Korut akan dibuatnya bertekuk lutut seperti Irak dengan pemerintahan bonekanya.

Berangkat dari dua konteks tersebut, hemat penulis ada dua tahap penyelesaian krisis. *Pertama* tahap jangka pendek yakni, kedua Korea harus mampu berdialog dengan sehat dan memudahkan aneka masalah yang membenang

kusut di antara keduanya dengan atau tanpa mediator, atau bila tidak maka kedua negara tersebut akan menjadi tumbal bagi niat ambisius AS untuk menguasai dunia. *Kedua*, jangka panjang, nampaknya harus ada kekuatan moral pada tingkat global dan pada tingkat domestik Amerika, khususnya di ranah pembuat kebijakan politik luar negeri AS untuk melakukan perubahan mendasar terhadap karakteristik realisme yang dianut oleh kebanyakan para pengambil kebijakan AS. Solusi kedua nampaknya akan melalui jalan terjal berliku, kendati harus tetap diupayakan. *Stake holders* dari berbagai tingkat harus bersinergi untuk mendesain tata dunia yang beradab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Demak, 3 Mei 2010

BAB 4

PELUANG DARI PREAH VIHEAR

Perseteteruan Thailand-Kamboja terkait dengan perebutan candi Hindu abad ke 19, Preah Vihear, kembali menambah deretan panjang daftar konflik di kawasan Asia Tenggara. Sebagai pemimpin ASEAN Indonesia di uji ketangguhannya dalam memediasi kedua negara berseteru. Peran Indonesia sebagai mediator menjadi *starting point* untuk mengembalikan citra negeri ini sebagai pemimpin sejati di Asia Tenggara. Kendati tidak berprestasi membentangkan peta jalan (*road map*) bagi penyelesaian konflik, tulisan ini diharapkan setidaknya dapat menanamkan motivasi bagi bangsa besar ini untuk kembali menjadi aktor global yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain.

Krisis finansial di Asia 14 tahun silam, yang oleh sementara analis diyakini dipicu oleh jatuhnya nilai *baht*, tengah menyeret sejumlah negara di Asia ke dalam kubangan krisis yang teramat dalam. Indonesia menjadi negara yang paling lambat dalam memperbaiki kesulitan ekonomi tersebut. Bahkan tidak hanya kerepotan dalam menyetabilkan rupiah, pemerintah juga gagal dalam mencegah munculnya multiefek dari krisis. Tak pelak legitimasi politik pemerintahpun terkikis habis hingga puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Suharto mengundurkan diri.

Krisis multi dimensi di tingkat domestik tak dapat disangkal membawa implikasi pada menurunnya peran Indonesia di tingkat regional Asia Tenggara. Sulit dipungkiri rekam jejak Indonesia di Asia Tenggara memiliki *rating* yang

tinggi sebelumnya. Bahkan Indonesia menjadi aktor kunci yang membidani kelahiran ASEAN. Lebih dari itu di tingkat global, Indonesia bahkan menjadi salah satu pemimpin gerakan non-blok.

Dalam konteks perang dingin, peran Indonesia sebagai pemimpin negara non-blok sangat penting terutama di mata negara pemimpin blok, Amerika dan Uni Soviet. Gerakan non-blok mendeklarasikan diri sebagai kelompok negara-negara yang tidak mau terjebak dalam persekutuan antar blok. Namun gerakan yang dipimpin Indonesia itu juga bukan dan tidak mau disebut sebagai blok ke tiga. Indonesia benar-benar jeli dalam melihat ruang-ruang kosong yang dapat dimanfaatkannya untuk kepentingan menguatkan eksistensinya sebagai negara yang baru lahir. Krisis 97 menjadi periode kemunduran peran Indonesia di Asia Tenggara dan umumnya di tingkat global.

Momentum Preah Vihear

Perseteruan Thailand-Kamboja di mata Indonesia memperlihatkan peluang untuk kembali memerankan peran kunci di Asia Tenggara. Sebagai negara yang sudah cukup tua di kawasan ini, sudah sewajarnya bila negara bekas "macan Asia" sangat paham dengan logika konflik antar bangsa di regional tersebut. Terlebih lagi seting kekuatan global nampaknya telah berpihak pada Indonesia. Sedikitnya terdapat dua indikator yang menunjukkan hal ini: (1) secara *dejure* Indonesia tengah menjabat sebagai ketua ASEAN; dan ke (2) kendati Kamboja menginginkan permasalahan perseteruan tersebut di angkat ke tingkat PBB, namun selain

usulan ini di tolak oleh rivalnya, Thailand, PBB sendiri tidak mau menangani masalah tersebut sebelum upaya di tingkat ASEAN dilakukan. Seting inilah yang menyuguhkan pada Indonesia kesempatan emas untuk menguatkan kembali hegemoninya di Asia Tenggara.

Jika dengan aneka sumber daya yang dimiliki serta berbagai peluang yang diberikan kepada Indonesia tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh negeri ini, sehingga untuk kesekian kalinya Indonesia terlihat lumpuh dihadapan negara-negara yang pernah dipimpinnya, maka Indonesia akan kehilangan satu lagi kesempatan yang mampu mengembalikan citranya di dunia Internasional.

Organisasi internasional, termasuk ASEAN, sejatinya tidak memiliki kekuatan apapun untuk memaksakan kebijakannya terhadap anggota (*member states*). Anggota baru memiliki kewajiban dan hak ketika mereka telah meratifikasi aneka kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan multilateral. Bahkan itupun tidak selamanya demikian, bila suatu kesepakatan tidak lagi menguntungkan dapat dengan seenaknya negara kembali mengabaikan. Argumentasi ini, lebih jauh, memberitahu pada kita bahwa sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia, kendati mendapat legitimasi secara formal dari anggotanya, tidak dapat memberikan sanksi apapun kepada anggotanya yang telah melanggar serangkaian aturan yang telah disepakati, kecuali Indonesia memiliki surplus *power* yang berlebih.

Dalam politik internasional, hanya aktor yang memiliki *power* (ekonomi maupun militer) yang mampu memaksakan kemauannya kepada negara lain. Jika demikian eksistensi

Indonesia dalam konteks ini harus diakui tidak cukup tangguh untuk, memainkan peran kunci dalam konstalasi politik di tingkat Asia Tenggara. Walaupun demikian, keadaannya tidak seburuk itu. Ada sejumlah modalitas, hemat penulis, yang belum secara optimal diberdayakan Indonesia untuk mengokohkan eksistensi kepemimpinannya di Asia Tenggara.

Pertama, sejarah (*history*), nampaknya para pemimpin di negeri ini tidak memiliki pemahaman sejarah yang kuat. Buruknya pengetahuan mereka akan sejarah nampak jelas misalnya dari gamangnya sikap pemerintah ketika berkonflik dengan Malaysia beberapa waktu silam. Padahal mendiang presiden Sukarno telah mengingatkan dalam pidatonya yang berjudul *Jasmerah* (jangan lupakan sejarah), betapa bangsa besar tidak pernah melupakan sejarah dan siapapun yang melupakan sejarah maka mereka berdiri di atas fakum, yang maknanya tidak memiliki kemantapan dalam bertindak. Tangguhnya Indonesia di masa kepemimpinan dua presiden pertama tidak diwarisi oleh para penerusnya, sehingga Indonesia pasca kepemimpinan mereka nyaris absen dari panggung politik regional maupun global dalam arti yang sesungguhnya.

Kedua, potensi geografis, secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 13 ribu pulau besar maupun kecil dan terbentang disepanjang sisi selatan Asia Tenggara serta menjadi jalur-jalur kunci perdagangan. Indonesia memiliki sedikitnya empat selat kunci (Malaka, Sunda, Makasar dan Lombok). Setidaknya 50 hingga 60 ribu kapal besar kecil berlalu lalang setiap tahunnya; 25%

dari total perdagangan dunia dan 50% transportasi minyak dunia didistribusikan melalui selat-selat tersebut (Prasetyono, Edy: 2007). Cina, Jepang, Rusia, Korea serta negara-negara di Asia Tenggara sangat membutuhkan perairan nusantara sebagai jalur perdagangan.

Dengan empat selat yang dimilikinya Indonesia seharusnya mampu mengontrol distribusi perdagangan negara-negara di sisi utaranya. Bila "kartu selat" dimainkan Indonesia maka negeri ini mampu melakukan tawar-menawar dengan posisi superior. Cina dan Jepang sebagai pemain utama ekonomi dunia akan sangat berhati-hati bila berhadapan dengan Indonesia. Belum lagi negara-negara dengan kekuatan ekonomi menengah ke bawah tentu akan menaruh hormat kepada nusantara. Potensi geografis tersebut akan menjadi modalitas luar biasa besar bagi Indonesia dalam menahkodai ASEAN, tentu bila para elit di negeri ini menyadari, mau dan mampu memberdayakannya.

Namun sebaliknya dengan potensi geografisnya itu, Indonesia juga berpeluang menjadi objek dan sasaran negara lain bila gagal mengelola. Pemerintah sangat kerepotan menjaga 13 ribu pulau yang berjajar dari sabang sampai meraoke. Pemerintah juga—sebagaimana biasanya—akan gagap berhadapan dengan diplomasi negara-negara asing, apalagi Cina dan Jepang sementara dengan Singapura dan Malaysia saja kerap kali dipermainkan.

Lihat aneka kekayaan alam dan budaya yang diserobot dan dicuri negara tatangga. Pasir yang diangkut kapal-kapal besar ke Singapura untuk memperluas bibir pantainya adalah contoh kecil yang kendati disaksikan oleh para elit di Jakarta

namun tetap saja berlangsung. Belum lagi aneka produk budaya yang diakuisasi negara tetangga, sungguh memilukan. Bila menjaga diri sendiri saja tidak mampu lantas bagaimana Indonesia mampu menjadi mediator aneka konflik di Asia Tenggara.

Ketiga, secara demografi, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-empat di dunia. Jumlah penduduk suatu negara menjadi incaran para produsen di negara lain. Salah satu faktor pendorong utama perekonomian Cina dan India adalah jumlah penduduknya yang meraksasa. Dengan potensi demografinya Indonesia sangat berkemungkinan mengikuti jejak kedua negara itu. Sebagai bangsa yang telah memainkan peran penting bagi kelahiran ASEAN; memiliki seting geografis yang sangat strategis; serta memiliki penduduk terbesar ke empat di dunia dan pertama di Asia Tenggara, sejatinya Indonesia memiliki potensi untuk kembali memainkan peran utama di kawasan ini.

Sulit dipungkiri aneka konflik yang terjadi di antara bangsa-bangsa sesungguhnya di latar belakang oleh motif ekonomi dan kekuasaan. Berangkat dari argumen ini, maka bila Indonesia mampu mengoptimalkan potensi ekonomi, geografis maupun militernya Indonesia akan sangat mudah mengelola konflik kawasan, tak terkecuali konflik Thailand-Kamboja.

Semarang, 11 Februari 2011

BAB 5

RESOLUSI KONFLIK PALESTINA-ISRAEL

Israel nampaknya mulai melunak, kebijakkan blokade terhadap Gaza sedikit dilonggarkan. Hal tersebut terkait dengan tekanan internasional terhadap aksi tidak simpatik yang dilakukannya terhadap para aktivis kemanusiaan Mavi Marmara beberapa waktu lalu. Sulit rasanya menilai kemajuan positif itu sebagai keseriusan Israel untuk mengubah kebijakan agresifnya terhadap Palestina.

Kendati demikian nampaknya ada sejumlah perubahan mendasar pada tingkat global yang sangat berpotensi mengkondisikan agresifitas Israel menjadi lebih bersahabat. Bagaimana akhir cerita hubungan disharmoni Israel-Palstina? Serta ke mana arah akhirnya? Tulisan ini bermaksud memberikan sejumlah prediksi terhadap masa depan konflik tersebut.

Dalam sedikitnya tiga poin kesepakatan, Israel bersedia melonggarkan blokadanya terhadap bebuyutannya, (1) mengkaji kembali barang yang tak boleh masuk ke Gaza dan mendaftarnya secara eksplisit, di luar barang itu barang lain diperbolehkan masuk ke Gaza; (2) mendukung upaya PBB membangun gedung sekolah, rumah sakit dan pemukiman buat warga Gaza, dengan demikian bahan bangunan boleh masuk. Sebelumnya negara Yahudi itu khawatir bahan-bahan bangunan akan digunakan Hamas untuk membuat terowongan guna menyelundupkan senjata; dan (3) Israel bersama Uni Eropa dan Otoritas Palestina bersama-sama

menjadi pengawas lalu lintas arus barang-barang ke Gaza (Tempo, edisi 28 Juni-4 Juli 2010, hal 132).

Kendati banyak kalangan meragukan itikat Israel untuk memperbaiki hubungannya dengan Palestina. Karena anggapan bahwa tekanan internasional sebagai pendorong utama melunaknya sikap Israel kepada Palestina daripada kesadaran dari dalam Israel sendiri untuk mengakhiri ketegangan, namun sulit disangkal sejumlah perubahan mendasar sedang terjadi di tingkat global. Sejumlah perubahan tersebut bukan tidak memiliki kaitan erat terhadap persetujuan Palestina-Israel.

Sejumlah perubahan itu adalah apa yang disebut oleh Robert Koehane dan Robert Nye sebagai *complex interdependence* (saling keterkaitan yang sangat akut). *Complex interdependence* merupakan pola baru hubungan global yang merevolusi pola-pola usang sebelumnya. Terutama sebelum perang dingin berakhir (1989) hubungan global dimainkan oleh aktor berupa negara (*state*) dengan pola hubungan bersifat konfliktual, namun pasca runtuhnya imperium Uni Soviet pola berubah secara bertahap namun pasti menjadi harmoni dan kerjasama dengan aneka aktor yang semakin beragam dan kreatif.

Aneka kelompok kepentingan (NGO), berbagai perusahaan transnasional (MNCs), para aktivis demokrasi dan hak asasi manusia berjaln berkelindan berhubungan satu sama lain dengan pola harmoni dan kerjasama, kendati sering juga konflik. Pola kreatif hubungan global pasca perang dingin inilah yang oleh para pemikir liberal disebut sebagai *complex interdependence*.

Sedikitnya ada 3 (tiga) indikator yang menunjukkan pola tersebut sedang beroperasi, yaitu: (1) *multiple channel*, yakni hubungan berlangsung melalui banyak jalur, mulai dari aneka jalur pemerintah hingga berbagai jalur non pemerintah dan berlangsung dengan sangat kreatif; (2) *multiple issue*, yaitu semakin beragam dan dinamikanya aneka isu yang bermunculan. Hak asasi manusia, ekonomi, panas global, energi, penyakit, kelaparan hingga gender bermunculan secara dinamis dengan mengabaikan kriteria *high* dan *low politics* sebagaimana dinamika isu di era perang dingin dimana *high politics* selalu ditempati isu keamanan dan militer, sementara isu sisanya hanya berada pada level *low politics*.

Dua indikator tersebut secara paralel berkaitan dengan indikator ke (3) yakni semakin tereduksinya perang sebagai instrumen dalam politik global. Perang nampaknya kehilangan relevansinya untuk aneka isu baru seperti kelaparan, panas global, gender, penyakit dan hanya relevan pada sedikit isu saja.

Ketiga indikator tersebut nampaknya sangat jelas terlihat dalam konstalasi politik global kontemporer, sehingga tidak *syak* lagi betapa pola *complex interdependence* nampaknya sudah mulai beroperasi sembari mereduksi pola politik global konvensional. Salah satu implikasi paling dekat dari *complex interdependence*, sebagaimana nampak dalam indikator ke tiga di atas, adalah semakin tereduksinya perang sebagai instrumen global yang dibarengi dengan semakin menguatnya kerjasama dan harmoni sebagai pola hubungan global baru.

Dalam perspektif ini, konflik Israel-Palestina semakin kehilangan relevansi. Hanya saja permasalahannya adalah bentuk operasional dari *coplex interdependence* yang ditunjukkan tiga indikator yang telah disebutkan sebelumnya belum terwujud. Sehingga serangkaian program dan aneka aktifitas rekayasa sosial (*social engineering*) perlu dilakukan.

Rekayasa tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan kantung-kantung perekonomian yang saling terhubung dan tergantung di kedua wilayah berseteru. Sembari mendemonstrasikan kepada kedua warga terkait betapa perang merupakan instrument *jadul* yang tidak rasional untuk menyelesaikan masalah dan meyakinkan betapa kerjasama dan harmoni jauh lebih handal sebagai instrument untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan kedua pihak berkonflik.

Refleksi

Serangkainan upaya telah dilakukan oleh banyak pihak untuk mendesaian resolusi konflik Palestina-Israel, kendati terdapat aneka perubahan penting, namun sulit disangkal betapa proses mencari perdamaian kedua pihak berseteru masih jauh dan berliku.

Setiap upaya sekecil apapun merupakan "batu bata" yang harus diyakini menjadi "pondasi" perdamaian Palestina-Israel. Keputusan tidaklah membawa apapun selain jumlah korban yang lebih banyak. Warga dunia dihadapkan kepada masalah yang tidak boleh diabaikan begitu saja, masalah konflik menjadi tanggungjawab tidak hanya warga Palestina

dan Israel namun tanggung jawab kita bersama penghuni planet bumi.

Complex interdependence menjadi seting global yang membuka peluang munculnya perdamaian pada setiap konflik di bumi. Dengan pola baru ini nampaknya akan lebih mudah bagi kita mentransformasikan konflik ke dalam bentuk kerjasama dan harmoni dari pada kekerasan (*violence*). Peluang ini hendaknya kita sambut dengan antusias sembari merancang dan merealisasikan aneka program perdamaian untuk menata dunia baru yang lebih baik. Isu ekonomi dan sejumlah isu lainnya selain perang, militer dan kekerasan harus terus digelembungkan sehingga menggeser dominasi isu militer dan perang dalam percaturan politi dunia.

Semarang, 6 Juli 2010

BAGIAN KE DUA

NUKLIR

BAB 6

NEGARA SADAR NUKLIR

Gedung Putih benar-benar dibuat "gatal" oleh Iran. Deklarasi sebagai negara nuklir yang dikumandangkan Presiden Ahmadinejad dalam peringatan ke-31 Revolusi Islam di Teheran, kemarin, benar-benar membuat panas telinga Amerika (Kompas.com, 12/ 2/ 2010). Ini bukan kali pertama, fenomena nuklir menuai kontroversi, salah satu alasan mengapa Amerika menggerus Irak (2003) adalah keyakinannya (yang tak pernah terbukti) terhadap kepemilikan Irak terhadap senjata pemusnah masal.

Selama ini nuklir telah, sedang dan diyakini akan terus menerus menjadi sumber kontroversi yang tak berkesudahan. Kenapa nuklir memicu kontroversi?; seberapa besar nilai nuklir bagi eksistensi suatu Negara, sehingga ada Negara yang rela menghadapi berbagai resiko untuk mempertahankannya?; serta seberapa besar kesadaran Indonesia akan nilai strategis nuklir?. Tulisan ini akan memberikan sejumlah analisis.

Salah satu pengalaman paling mengerikan dalam bentang sejarah tentang dahsyatnya ancaman senjata nuklir barangkali adalah ketika Pilot Kolonel Paul Tibbets, dengan pesawat Bomber B-29 Enola Gay, melepaskan satu buah (sekali lagi satu buah) bom bernama, *Little Boy*, yang kontan secara efektif membumi hanguskan Hiroshima pada 6 Agustus 1945, pukul 08: 15: 17 (Fadhli, Aulia: 2007: 32).

Little Boy, bom yang hanya berukuran, panjang 3 meter, diameter 0, 7 meter, serta berat 4 ton, dalam satu kali

ledakan menewaskan sedikitnya 200.000 dari 350.000 penduduk Hirosima seketika, bahkan banyak diantaranya tak ditemukan jasadnya. Tak hanya itu bom yang dibuat dengan biaya 2 juta dolar AS dengan kekuatan setara 20.000 ton TNT juga memporak porandakan setidaknya 76.327 gedung/bangunan yang delapan puluh persennya merupakan rumah penduduk, bahkan sebagian besar atau sekitar 47.969 bangunan hancur total, serta selebihnya mengalami kerusakan baik ringan maupun berat.

Tragedi Hirosima, dan tentu juga Nagasaki, yang membuat Jepang kapok sama sekali untuk terlibat dalam urusan perang, merupakan pengalaman penting bagi umat manusia penghuni planet bumi betapa, nuklir, terlepas dari aneka manfaatnya, merupakan instrumen yang berpotensi memusnahkan generasi umat manusia, bahkan diprediksi kandungan nuklir yang dimiliki bumi kita saat ini, bisa menghancurkan sedikitnya 300 kali bumi. Ruarrrr biasa bukan? Terlepas dari fenomena energi nuklir yang sedemikian kontroversial, ada, hemat saya, sedikitnya 3 faktor pendukung lain yang menambah nilai kotroversialannya, yaitu:

Pertama, efek destruktif yang irrasional, perang merupakan fenomena tak terbantahkan yang mengiringi perjalanan umat manusia. Perang terjadi di berbagai level, mulai dari antar kelompok, suku, agama bahkan negara. Celakanya, sudah menjadi semacam konsensus, perang, kendati diakui sebagai cara tak beradab, irrasional dan destruktif namun dianggap lazim digunakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara.

Dalam konteks konstalasi politik global, dimana perang dianggap sebagai keniscayaan dan fenomena lazim, maka senjata nuklir menjadi instrumen perang yang mematikan. Kendati, barangkali, seorang pembuat kebijakan rasional (sayang manusia tidak selamanya rasional) tidak akan menggunakan senjata "monster" ini, namun diyakini kepemilikan terhadap senjata nuklir akan memiliki dampak *gertak* terhadap lawan, sehingga sang empunya akan memiliki nilai tawar lebih dan, ini barangkali yang diharapkan, akan bisa berbuat seenaknya.

Secara teoritis, kepemilikan nuklir oleh beberapa, atau bahkan banyak Negara, yang tidak selalu memiliki kepentingan harmonis akan berimplikasi pada munculnya hubungan antar bangsa berpola detente, yaitu konstruksi sistem internasional dimana terjadi ketegangan yang akut. Dalam pola detente, tidak terjadi perang secara fisik di antara para Negara pemilik nuklir, namun Negara-negara pemilik nuklir dengan kepentingan politik yang sulit dikompromikan akan saling fokus saling mengawasi antara satu dan yang lain dengan mengerahkan senjata untuk saling menyerang.

Peristiwa ini sering di analogkan oleh para ilmuwan Hubungan Internasional seperti dua ekor kalajengking yang ditaruh dalam toples yang tertutup. Keduanya akan saling berhadapan dan bersiap-siap saling menyerang, ketika salah satunya menyerang maka secara otomatis akan pula menerima serangan balik dari lawan, dan keduanya terkapar. Setidaknya pola hubungan seperti itulah yang akan terjadi dalam sistem politik global yang membebaskan kepemilikan senjata nuklir.

Kedua, ancaman dan manfaat. Kendati memiliki daya rusak ekstrim, nuklir bukan tidak memiliki nilai manfaat. Bahkan kemampuan manusia dalam memanfaatkan energi nuklir akan berimplikasi pada revolusi fundamental bagi peradapan manusia. Energi konvensional bagi proses dan pengembangan perindustrian selama ini masih didominasi oleh minyak. Padahal, minyak, sebagaimana kita tahu, merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, artinya semakin banyak dan cepat minyak dieksploitasi maka konsekuensinya kandungan minyak di perut bumi akan semakin berkurang. Sayangnya hingga kini belum ditemukan energi alternatif pengganti minyak yang relatif mapan dan bersifat permanen, dalam makna yang lebih teknis: murah, praktis, mudah diakses oleh masyarakat luas dan memiliki daya yang setidaknya sebanding dengan minyak.

Nuklir diyakini sangat berpotensi menjadi energi alternatif pengganti minyak, sehingga tak dapat disangkal, penguasaan teknologi nuklir menjadi kebutuhan mutlak bagi umat manusia paska energi minyak. Inilah salah satu alasan mengapa Iran, kendati di bawah tanah negerinya terdapat tangki minyak alam yang lebih dari cukup untuk kebutuhan bangsa Iran dan anak cucunya namun kesadarannya akan fungsi telak energi di masa depan memaksanya untuk berani, sekali lagi berani, berhadapan dengan Amerika.

Alasan *ketiga* yang menjadikan nuklir menjadi isu kontroversial di era global kontemporer adalah adanya aneka upaya politisasi nuklir oleh Amerika dan sekutunya, untuk mendeskriminasikan, menekan dan menghambat Negara-

negara yang dianggap tidak kompromistis dengan kepentingan mereka.

Politisasi nuklir oleh Amerika dan sekutunya, nampak sangat jelas dan kasat mata, Irak salah satu Negara yang menjadi korban upaya politisasi itu, Negara lain yang menjadi korban politisasi nuklir adalah Iran dan Korea Utara, dan saya yakin sederetan daftar Negara-negara akan menjadi korban politisasi nuklir selanjutnya di masa-masa mendatang.

Sadar Nuklir

Nampaknya, Amerika dan sekutunya berupaya mendesain distribusi nuklir hanya pada Negara-negara tertentu yang diyakini dapat sejalan dengan kepentingannya, atau bahkan pada tingkat tertentu Amerika menginginkan hanya negaranya saja yang berhak memiliki dan mengembangkan teknologi nuklir. Perjanjian non Proliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty/ NPT*) merupakan salah satu permisalan yang dapat ditunjuk betapa terdapat rezim nuklir dunia yang mencoba mendesain, mendistribusikan, membatasi dan mengontrol peredaran nuklir di dunia, alasannya terkesan sangat normatif dan dibuat-buat, dengan seolah-olah hanya Negara-negara tertentu saja, yakni AS, Rusia, Cina, Prancis dan Inggris yang dapat menjamin keamanan dalam mengembangkan teknologi nuklir, sedangkan yang lain tidak.

Lebih jauh lagi, upaya mengembangkan Nuklir untuk kepentingan damai yang dijamin oleh *NPT*, sering dianggap sebagai usaha mengembangkan senjata nuklir, dan dijadikan alasan untuk menghentikan upaya Negara tersebut dalam

mengembangkan nuklir, Irak dan Iran adalah contoh yang baik untuk kasus ini. Sistem pengendalian nuklir oleh rezim nuklir dunia, sarat dengan kepentingan Negara-negara tertentu dan bersamaan dengan itu sangat tidak adil bagi sebagian Negara lain. Bagi Negara yang sadar nuklir seperti Iran dan Korea Utara, namun tidak memiliki kepentingan selaras dengan arus kepentingan Negara-negara utama, desain rezim nuklir sangat menyakitkan, tidak adil dan diskriminatif, namun hal ini tidak disadari oleh banyak Negara lainnya, barangkali Indonesia adalah salah satu Negara yang tidak sadar nuklir.

Sulit dipungkiri untuk menjadi Negara yang dapat berperan lebih dalam konstalasi politik global, penguasaan terhadap energi menjadi kebutuhan telak. Keterlambatan Indonesia dalam teknologi Nuklir menjadi indikator kuat betapa sebagai bangsa kita tidak memiliki kesadaran nuklir, ini maknanya, untuk beberapa waktu ke depan, Indonesia masih betah menjadi Negara yang hanya mem"bebek" pada kekuatan-kekuatan besar, mengikuti arah angin bertiup dan rela menjadi objek dari aneka pola tingkah bangsa-bangsa asing. Selebihnya: Indonesia bangunlah !!!

Wawasan, 6 Maret 2010

BAB 7

NEO PAX AMERICANA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempercepat penyebaran pertahanannya untuk menghadapi potensi serangan rudal Iran di Teluk, guna menghindari kemungkinan serangan balasan, kata surat kabar *The New York Times*, Sabtu (30/1/2010). Menurut para pejabat pemerintah dan militer, tindakan itu termasuk penempatan kapal-kapal khusus di lepas pantai Iran dan sistem antirudal di sedikitnya empat negara Arab, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Kuwait (*Kompas.com*, 31/1/2010). Upaya AS tersebut terkait dengan program pengayaan uranium Iran, mengapa AS sedemikian khawatir terhadap Iran? Apa kepentingan AS di Iran? tidak bisakah AS menerima alasan Iran dalam mengembangkan teknologi Nuklir?

Kepentingan AS di Iran

Politik Luar Negeri (PLN) suatu Negara tak lepas dari kepentingan nasional negara tersebut, tak terkecuali AS, Politik Luar Negeri Amerika Serikat (PLN-AS) terhadap Iran juga tak dapat dilepaskan dari konteks kepentingan nasional AS di Negara para mulah itu. Getolnya paman sam dalam campur tangan terhadap aneka persoalan di Timur Tengah (Timgeng) termasuk Iran merupakan indikasi kuatnya kepentingan AS di sana.

Kenapa Iran menarik perhatian AS?, dalam konteks ini maka Iran tak dapat dilepaskan dari posisinya yang secara geografis berada di timgeng. Timgeng menarik sedikitnya karena beberapa alasan. *Pertama*, regional ini menjadi tempat

bertemunya (berarti pula jalur strategis) dari tiga benua: Eropa, Asia dan Afrika. Ini maknanya region ini tak pernah senyap dari lalu lalang perjalanan penting antar benua, region ini pula, sudah barang tentu, memiliki peran politis yang luar biasa penting, sehingga siapapun yang menguasai region ini pasti mempunyai nilai tawar (*bargaining position*) yang tinggi, baik secara ekonomis maupun politis.

Maka tidak ada pilihan lain, bagi siapapun negeri yang menghendaki menjadi penguasa dunia harus menjadi penguasa di timteng. *Kedua*, faktor minyak. Jamak diketahui bahwa kandungan minyak di timteng sangat banyak, sedikitnya lebih dari dua pertiga kandungan minyak di dunia terkonsentrasi di bawah tanah Negara-negara Arab. Seiring dengan berkembangnya perindustrian, terutama di Negara-negara maju termasuk AS, yang dibarengi pula dengan belum ditemukannya energi alternatif pengganti minyak yang relatif permanen dan dapat diandalkan maka minyak akan terus menjadi muara konflik politik hingga kapanpun.

Sebagai "tangki minyak dunia" nampaknya masa depan timteng tidak akan bergeser jauh dari masa-masa sebelumnya. Konflik kepentingan yang bermuara pada minyak akan terus menjadi masalah yang akut di kawasan ini. Kedua faktor tersebut menyita perhatian Negara-negara besar, tak terkecuali AS, sehingga menjadi sangat lumrah bila AS sedemikian garang terhadap Iran, dan enggan mendengarkan apapun alasan Iran. Ada faktor ketiga, yang kebetulan terdapat di Iran, yakni: pemimpin revolusioner, yang tidak nyaman terhadap kepemimpinan AS di dunia.

Pemimpin Revolusioner

Iran sejak ditumbangkannya Shah Reza Pahlevi oleh gerakan revolusi Islam (1978), menjadi momok yang sangat menakutkan bagi AS, di bawah pimpinan para mullah Iran adalah "anjing liar nan buas" yang sangat mengganggu kepentingan sang adi daya, sehingga menjinakkan Iran menjadi misi utama AS di timteng, setelah sebelumnya Irak yang juga sangat tidak kompromistis diratakan dengan tanah, untuk selanjutnya dijinakan dengan membuat pemerintahan boneka.

Nampaknya, terpilihnya Mahmud Ahmadinejad untuk kali kedua sebagai presiden, telah memperpanjang pekerjaan AS di timteng. Kendati terdapat aneka upaya di tingkat domestik Iran—entah dengan atau tanpa campur tangan asing—untuk mempermasalahkan hasil pemilu, nampaknya posisi Nejad terlampau kuat untuk digoyang.

Neo Pax Americana

Pax Americana, meniru istilah serupa Pax Britanica, merupakan upaya untuk mendesain hegemoni, menjadi penguasa dunia tunggal. Aneka upaya telah dilakukan guna menciptakan sistem internasional yang didesain sedemikian rupa guna menopang kedigdayaan Amerika. Dimulai sejak paska perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet (1989/90), AS muncul sebagai kekuatan tunggal. Sadar dengan posisinya yang sangat berpotensi menguasai bola planet bumi, maka bermacam cara dilakukan. Lihat saja misalnya di setiap benua, AS hampir memiliki satelit, di Asia ada Australia yang sangat intim dengan AS, di Eropa ada

Inggris yang selalu mengekor kebijakan global AS dan di Timteng ada Israel yang menjadi basis kepentingannya.

Dari sisi media massa, AS telah mencitrakan terorisme dengan islam. Osama bin Laden sebagai ikon teroris terlihat (setidaknya melalui media) sebagai seorang muslim saleh, telah menjadi target utama orang yang paling diburu AS. AS juga telah mengirimkan 250 juta tentara ke berbagai tempat untuk membunuh, melakukan 200 peperangan sejak menyatakan kemerdekaannya di tahun 1776, dan melakukan campur tangan dan penyerbuan di 32 negara sejak 1977 hingga 1993, dari Yunani hingga ke Cina dan Irak (Pandu Setia: 2007: ix).

Bersamaan dengan itu AS selalu berupaya mempengaruhi pandangan para pemimpin dunia dengan cara pandangnya. Pada Jumat (29/1) lalu misalnya, Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, meningkatkan desakan kepada Cina agar mengakui ancaman program nuklir Iran dan bergabung dengan seruan internasional untuk pemberian sanksi (Kompas.com, Senin 1/2/2010).

Gerakan Pax Americana sedemikian gencar, nampaknya bumi membutuhkan aktor-aktor Negara kuat lain untuk mengimbangi program ambisius AS menjadi sang penakluk dunia. Munculnya Cina dan India sebagai aktor yang berpotensi menjadi aktor kuat dalam perekonomian global, membuat gusar AS, kegusarannya kelihatan dari konflik Google-Cina yang ditarik menjadi menegangkannya hubungan dua pemerintah itu. Memanasnya hubungan Jepang-AS juga terlihat dari gelagat Hatoyama yang mulai mengabaikan kesepakatan dengan AS, setelah jajak pendapat di Okinawa

menunjukkan bahwa warga menentang adanya pangkalan militer AS baru di sana.

Aneka ganjalan yang menghalangi gelombang Pax Americana, nampaknya memperoleh respon balik yang lebih kuat dari AS, contoh paling kasat mata adalah bagaimana AS memperlakukan Iran yang bandel, bukan mustahil dengan posisi Iran yang selalu enggan berkompromi akan mengantarkan Iran senasib dengan Irak. Respon AS yang "over dosis" terhadap Iran dengan menempatkan kapal-kapal khusus di lepas pantai Iran dan sistem antirudal di sedikitnya empat negara Arab, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Kuwait (Kompas.com, 31/1/2010) merupakan indikasi kuat betapa AS sedang menlancarkan gelombang baru Pax Americana (Neo Pax Americana).

Sistem ekonomi-politik global pasaka bangkitnya India dan Cina nampaknya akan mengalami polarisasi mendasar, diprediksi setidaknya 10 tahun kedepan posisi Cina akan menggeser AS. Konsultan bisnis terkemuka dunia, PriceWaterhouseCoopers (PWC) seperti dikutip dari AFP, Kamis (21/1). "Proyeksi-proyeksi ini menggambarkan bahwa Cina bisa jadi menjadi negara dengan perekonomian terbesar dunia pada awal 2020 dan kemungkinan melampaui AS pada 2030," jelas John Hawksworth, kepala makroekonomi PWC (suaramerdeka.com, 22/1/2010).

Lebi jauh PWC dalam laporan itu memproyeksikan 10 besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030 adalah China, dan diikuti secara berturut-turut oleh AS, India, Jepang, Brasil, Rusia, Jerman, Meksiko, Prancis dan Inggris. Sementara berdasarkan data IMF tahun 2008, 10

negara dengan perekonomian terbesar adalah AS, Jepang, China, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Rusia, Spanyol dan Brasil.

Konstruksi sistem ekonomi-politik global di masa depan tak ayal akan mengalami pergeseran-pergeseran mendasar, bahkan (masih menurut prediksi PWC) disebutkan, bahwa kontribusi Cina dan India pada pertumbuhan ekonomi global mendatang akan terus meningkat hingga melebihi AS dan Uni Eropa. Proporsinya pada tahun 2010 diperkirakan 20% oleh AS, 21% oleh Uni Eropa, 13% oleh Cina, 5% dari India. Namun pada 2030, akan ada perubahan yakni 16% dari AS, 15% dari Uni Eropa, 19% dari China dan 9% dari India. Pertanyaannya: samapai kapan AS mampu bertahan mempertahankan posisinya?

Wawasan, 1 Februari 2010

BAB 8

MENGEMBARGO IRAN

Senin, 23 Januari 2012, Uni Eropa (EU) sepakat mengembargo ekspor minyak Iran untuk meningkatkan tekanan terhadap program nuklir negeri para Mullah itu (Seputar Indonesia, 24/1/2012, hal 3). Seberapa efektifkah embargo tersebut dapat menekan Iran untuk—setidaknya—mengurangi aktivitas pengayaan uranium yang dituduhkan?

Salah satu instrumen penting politik luar negeri, selain diplomasi dan perang adalah ekonomi. Ekonomi dapat berfungsi sebagai *rewards* atau *sanction* (Heater, Derec & G.R. Berridge, 1993 dalam Andi Purwono, n.d.). Sebagai *rewards* ekonomi misalnya dapat dioperasionalkan dalam bentuk: hibah modal, pinjaman lunak, penjadwalan ulang hutang dan mendorong pihak swasta untuk investasi. Sementara sebagai *sanction*, ekonomi oleh suatu negara dapat diwujudkan dalam sedikitnya dua bentuk, yaitu: *pertama*, finansial seperti pembekuan kekayaan bank dan *kedua* komersial dan teknik seperti embargo ekspor.

UE menargetkan sejumlah langkah yang ditujukan kepada bank sentral, emas dan minyak Iran untuk melunakkan sikap keras negara itu, sehingga diharapkan Iran akan mengalami kesulitan dalam mendanai program pengayaan uraniumnya yang telah mencapai 20%. UE misalnya telah membekukan aset 433 perusahaan dan 113 individu, serta membatasi perdagangan dan investasi dalam industri minyak dan gas.

Kendati penolakan telah dilakukan Iran berkali-kali atas tuduhan pemanfaatan nuklir sebagai senjata pemusnah masal, namun upaya Iran itu nyaris tidak membuahkan hasil apapun. Alih-alih dapat meyakinkan Amerika dan Uni Eropa, upaya Iran justru seperti menyiramkan bensin pada api, negara-negara barat malah merespon dengan berbagai sanksi. Baik secara langsung seperti yang dilakukan Amerika, maupun secara kolektif seperti yang dilakukan UE atau PBB yang dimotori oleh negara-negara barat.

Masih menurut Heater, sedikitnya terdapat 7 faktor yang mempengaruhi efektifitas sanksi. Rekaman sanksi menunjukkan, sanksi kurang efektif diterapkan pada isu dimana *the stakes was high* (resiko tinggi), terutama terhadap pemberi sanksi. Sebagai konsumen minyak Iran yang mengkonsumsi sedikitnya 18% dari total ekspor minyak Iran, UE justru akan mengalami guncangan ekonomi, terlebih lagi disaat krisis yang sedang dialami Eropa. UE memerlukan persiapan terlebih dahulu dengan membuka akses energi sebelum menjatuhkan sanksi.

Kedua, sanksi akan sulit dilakukan ketika tidak ada monopoli pasar atau *supply*. Artinya sanksi akan gagal ketika ada pihak lain yang menjadi pengganti. UE memang menjadi salah satu tujuan ekspor minyak Iran (hingga 18%), namun catatan terpentingnya adalah terdapat negara-negara kunci global yang siap menerima pasokan minyak Iran dengan jumlah yang tidak kalah banyaknya, tunjuk saja misalnya Cina (22%), India (13%), Jepang (14%), Korsel (10%), Turki (7%), Afrika Selatan (4%), Sri langka (2%), Taiwan (1%) dan sisahnya tersrebar ke negara-negara lain hingga 9%.

Kendati angka 18% eksport minyak ke EU akan membawa guncangan bagi perekonomian Iran, namun (1) minyak adalah energi kunci bagi pembangunan di semua negara, dalam waktu dekat atau lama Iran akan mendapatkan pasar pengganti UE; dan (2) Alih-alih merapuhkan basis ekonomi Iran, upaya Eropa tersebut justru mengancam perekonomiannya yang kini sedang berada dalam masa krisis bersama Amerika.

Ketiga, sanksi memicu respon patriotik dari negara sasaran. Terkait dengan hal ini maka ada dua hal yang patut digaris bawahi: (1) basis ideologi Iran menjadi sangat anti barat, terutama semenjak revolusi 1979; dan (2) faktor Ahmadinejad. Nejad tidak hanya karismatik, ia juga dikenal sebagai orator handal yang memiliki visi jelas, anti Amerika dan Israel. Dengan gaya kepemimpinannya, Nejad sangat berpotensi mendorong perlawanan yang lebih kuat terhadap barat.

Keempat, sanksi butuh waktu untuk dimobilisasi. Sanksi yang sempurna adalah sanksi yang dilakukan oleh negara yang memiliki hegemoni global. Dalam tubuh UE terdapat kepentingan yang majemuk dalam menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Yunani dapat ditunjuk sebagai salah satu anggota UE yang sangat tergantung pada import minyak Iran. Selain kontribusi minyak Iran yang mencapai lebih dari sepertiga dari total kebutuhan minyak Yunani, Yunani juga merupakan negara yang paling parah dihantam krisis UE. Sementara Itali justru meminta agar perusahaan-perusahaan Iran tetap diizinkan membayar hutang mereka menggunakan

minyak mentah dari pada uang tunai. Bahkan 7 % ekspor minyak Iran masuk ke Itali.

Kelima sanksi berpotensi memproduksi problem administrasi dan hukum dengan komplektifitas tinggi sehingga membutuhkan energi ekstra dari birokrasi. Globalisasi ekonomi yang nampak dari melejitnya transaksi keuangan; membesarnya volume perdagangan; bertambahnya porsi FDI; terbentuknya pasar global; serta meningkatnya laju distribusi teknologi (Lairson dan Skidmore, 1997 dalam Jemadu, 2008, 230-1) menuntut tidak hanya infrastruktur fisik seperti jalur transportasi dan fasilitas komunikasi yang prima, namun juga infrastruktur berupa administrasi, hukum dan birokrasi. Seting inilah yang kemudian membuat embargo ekonomi membawa banyak konsekuensi-konsekuensi administrasi, hukum dan birokrasi baik di tingkat nasional, regional bahkan global. Ringkasnya untuk mentransformasikan suatu sanksi ekonomi pada suatu negara maka membutuhkan energi ekstra dari birokrasi.

Keenam, sanksi mereduksi bantuan luar negeri pada negara target, sehingga sanksi akan sangat sulit diterapkan jika terdapat keselarasan kepentingan antara negara donor dan target. Konsistensi berbagai aktor sangat sulit dicapai. Kendati UE misalnya secara formal telah menjatuhkan sanksi pada Iran, namun tali-temali ekonomi global yang semakin akut akan menyulitkan embargo efektif.

Terakhir, berbeda dengan serangan militer, sanksi memiliki dampak merusak yang tidak diskriminatif, artinya mengenai semua. Bila tujuan embargo adalah agar Iran mengurungkan niatnya mengembangkan senjata pemusnah

masal, sehingga kemungkinan penggunaannya dapat diperkecil dan pelanggaran HAM dapat dicegah, maka sanksi justru dapat berdampak pada pelanggaran HAM itu sendiri. Sehingga pertanyaan penutup tulisan ini adalah: sudahkah UE mempertimbangkan semua itu?

Semarang, 25 Januari 2012

BAGIAN KE TIGA

KONSPIRASI

BAB 9

SEKENARIO POLITIK MESIR

Cerita politik yang ditampilkan Mesir dalam satu bulan terakhir akhirnya mencapai klimaks dengan mundurnya presiden Husni Mubarak yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Apa yang dituntut rakyat Mesir agar Mubarak mundur telah terpenuhi, namun perjalanan demokrasi di Mesir belum berakhir. Jalan panjang berliku akan dilalui negeri piramid ini dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Bagaimana skenario politik Mesir paska Mubarak?, apakah konteks sosial, ekonomi dan politik Mesir paska Mubarak subur untuk tumbuhnya demokrasi, atau justru sebaliknya menjadi lahan gersang bagi demokrasi?; serta pelajaran apa yang dapat diambil untuk Indonesia?. Tulisan ini bermaksud menyuguhkan sejumlah analisis.

Secara teoritik peralihan kekuasaan dari rezim otoriter menuju demokrasi dapat sedikitnya melalui empat skenario. (1) demokratisasi melibatkan para pemimpin rezim dan berlangsung secara bertahap (demokratisasi inkremental); (2) demokratisasi melibatkan para pemimpin rezim dan berlangsung secara cepat (transisi melalui transaksi); (3) demokratisasi tidak melibatkan para pemimpin rezim dan berlangsung secara bertahap (transisi melalui perjuangan revolusioner berkepanjangan); dan terakhir demokratisasi tidak melibatkan para pemimpin rezim dan berlangsung secara cepat (transisi melalui perpecahan: revolusi, kudeta, keruntuhan, "*extrication*". Mas'ood, Mohtar: 2003: 31). Dalam empat skenario tersebut, peralihan kekuasaan di Mesir dapat

dimasukkan dalam kategori terakhir, yakni demokratisasi yang tidak melibatkan para pemimpin rezim dan berlangsung secara cepat.

Pilihan skenario tersebut bukan tanpa implikasi terhadap proses, dinamika dan bentuk demokrasi paska transisi. Karena bagaimanapun perpindahan kekuasaan dalam waktu sangat singkat, dengan tanpa melibatkan para penguasa rezim maka tak pelak sejumlah konteks sosial, ekonomi maupun politik dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Padahal adaptasi kultural (sosial, ekonomi dan politik) dari rezim otoriter ke demokrasi yang terjadi secara kilat sangat kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dilakukan. Maknanya akan ada, dan itu bisa dipastikan, krisis yang terjadi dalam 3 ranah konteks demokrasi yang hendak di bangun di Mesir.

Pertama, dalam ranah politik, maka revolusi di Mesir menyisahkan sedikitnya tiga aktor politik yang masih tetap eksis: (1) militer; (2) partai-partai politik; dan (3) massa demonstran/ secara umum rakyat mesir (Azumardi Azra, dalam dialog di Metro TV, Ahad 13 Feb 2011). Dalam konteks kasus Mesir, kendati militer menjamin akan mengawal transisi demokrasi, namun patut bahkan sangat layak diwaspadai bahwa aktor tersebut akan menyerobot kekuasaan. Mengingat sejumlah hak istimewa militer yang selama ini dijamin oleh pemerintahan Mubarak mustahil akan dibiarkan begitu saja tanpa penjamin. Seperti hak atas anggaran yang besar yang di era Mubarak telah dinikmatinya; aneka kepentingan bisnis militer yang hanya akan terjamin bila militer tetap

memegang kendali kuasa; serta daya tarik kekuasaan yang menggiurkan dan begitu menjanjikan.

Sementara partai-partai politik telah terfragmentasi dalam aneka kepentingan, sehingga salah satu tantangan terbesar mereka adalah tidak hanya bagaimana fragmentasi kepentingan itu tidak berimplikasi pada munculnya konflik horizontal namun juga bagaimana dialog, sinergis dan harmoni di antara mereka dapat dibangun sebagai fondasi yang kokoh bagi demokrasi di Mesir.

Di sisi lain, massa demonstran serta bangsa Mesir secara umum, sebagaimana gerakan sosial di banyak negara, acapkalai kehilangan fokus setelah tujuan mereka tercapai. Sehingga masalah-masalah seperti: apa sasaran selanjutnya setelah Mubarak lengser?, bagaimana sasaran tersebut dicapai?, strategi apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi aneka kemungkinan hambatan yang bakal muncul? acapkali tidak terpikirkan dan membuka peluang besar bagi para pemain politik di Mesir untuk merampas kekuasaan itu.

Kedua, dalam ranah ekonomi, Mesir menjadi pesawat yang oleng. Demonstrasi dalam skala nasional yang berlangsung nyaris sebulan kontan berdampak pada stagnasi aktivitas ekonomi di negeri piramid itu. Banyak wisatawan manca negara yang meninggalkan negeri itu, padahal pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar. Belum lagi menurunnya sumber pendapatan negara yang berasal dari terusansuez akibat krisis politik. Aneka peristiwa itu membawa implikasi bagi terpuruknya perekonomian di Mesir. Ini artinya keadaan tidak jauh beranjak, bahkan bisa dikatakan lebih parah, karena

sebelumnya Mesir di bawah Mubarak merupakan negara dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang fantastis.

Krisis ekonomi dan politik ini tak pelak berimplikasi pada, *ketiga* kekacauan sosial. Implikasi paling dekat dari ketidak stabilan ekonomi-politik Mesir adalah krisis sosial. Kendati, sejauh yang penulis tahu, belum ada angka resmi mengenai jumlah tindak kejahatan dan kekerasan, namun diyakini jumlahnya akan naik. Kendati tentu tidak diharapkan, konflik horizontal juga berpotensi meledak. Kekacauan ekonomi, politik dan sosial di Mesir itu selanjutnya akan membuat perjuangan demokrasi di negeri itu berjalan di tempat untuk jangka waktu yang relatif lama.

Skenario terhalus paska Mubarak adalah militer memenuhi janjinya, mengawal masa transisi hingga lahirnya pemerintah baru yang dihasilkan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Stabilitas Mesir akan kembali, wisatawan kembali datang ke Mesir, pemerintah baru mampu mereduksi angka kemiskinan dan pengangguran, serta lahirnya Mesir baru yang demokratis sebagaimana diimpikan bangsa Mesir. Sementara skenario lain, Mesir akan kembali pada keadaan sebelumnya, pemerintahan dikuasai lagi oleh militer, atau kemungkinan terburuk, keos. Upaya militer kembali ke aras politik dihadang oleh gerakan massa jilid dua.

Flu Mesir, dengan teknologi informasi yang semakin canggih, akan sangat mudah menular ke negara lain. Terutama negara-negara yang memiliki karakteristik serupa, yaitu: pemerintah gagal dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, korupsi yang merajalela, hukum yang dipolitisasi sedemikian rupa dsb. sehingga membakar amarah

rakyat. Bukan tidak mungkin, Indonesia akan tertular flu itu, tentu ongkos yang harus dibayar sangat mahal. Sehingga sudah sepatutnya kita bangsa Indonesia mau dan bisa mengambil pelajaran dari cerita Mesir.

Semarang, 13 Februari 2011

BAB 10

AROGANSI ISRAEL

Israel tidak akan mengambil bagian dalam penyelidikan internasional atas penyerbuan pasukannya terhadap kapal yang berusaha menembus blokadanya ke Jalur Gaza, kata Duta Besar Israel untuk Washington, Minggu (6/6/2010). Demikian kutipan sebuah berita di bawah tajuk "Israel Tolak Pengadilan Internasional" yang dikutip dari Kompas.com, Senin, 7 Juni 2010. Mengapa Israel sedemikian berani?, serta apa implikasi politik pernyataan tersebut?

Ada sedikitnya empat alasan yang membuat negara Yahudi ini masih sangat percaya diri untuk melakukan aneka kebijakan kontroversial, yaitu: *Pertama*, Kuatnya lobi Yahudi. Kendati jumlahnya sangat sedikit, wikipedia menulis 13.296.100 jiwa pada tahun 2002 (Yahudi: Wikipedia), namun bangsa Yahudi berdiaspora dengan sangat cerdas. Penyebarannya ke negara-negara di dunia terdesain dengan sangat rapi. Posisi sosial serta kedudukannya pada kelas para pengusaha *jet zet* membuat aneka lobi dan manuver politiknya sangat jitu.

Di AS orang Yahudi berjumlah 7 juta an atau sekitar 2,5% dari total populasi negara tersebut (Yahudi Amerika: Wikipedia), yang menarik, AS menjadi negara dengan jumlah bangsa Yahudi terbesar ke dua di dunia setelah Israel yang tersebar pada tempat-tempat strategis seperti di pemerintahan, senat dan para pemain ekonomi kunci. Sehingga tidak mengherankan bila restu dari kelompok ini menjadi *azimat* yang paling dicari oleh siapapun yang hendak

memangku jabatan publik. Kuatnya dukungan *abang sam* terhadap aneka kebijakan kontroversial Israel menjadi indikasi kuatnya pengaruh lobi Yahudi terhadap para pembuat kebijakan di AS.

Kedua, kepentingan AS terhadap Israel. Kepentingan paman sam terhadap negara Yahudi terkait erat dengan kepentingannya di Timur Tengah (Timgeng). Di mata AS Timgeng menjadi kawasan yang sangat seksi. Ambisi globalnya untuk menguasai dunia (*pax americana*) menuntunnya agar menaklukkan Timgeng.

Timgeng menarik di mata AS, karena (1) regional ini menjadi tempat bertemunya (berarti pula jalur strategis) dari tiga benua: Eropa, Asia dan Afrika, maknanya region ini tak pernah senyap dari lalu lalang perjalanan penting antar benua. Region ini pula, sudah barang tentu, memiliki peran politis yang luar biasa penting, sehingga siapapun yang menguasainya pasti mempunyai nilai tawar tinggi, baik secara ekonomi maupun politik.

Maka tidak ada pilihan lain, bagi siapapun negara yang menghendaki menjadi penguasa dunia harus menjadi penguasa di Timgeng. Timgeng semakin seksi dengan faktor ke-(2), minyak. Jamak diketahui bahwa kandungan minyak di Timgeng sangat banyak, sedikitnya lebih dari dua pertiga kandungan minyak dunia terkonsentrasi di bawah tanahnya. Seiring dengan berkembangnya perindustrian, terutama di negara-negara maju termasuk AS, yang dibarengi pula dengan belum ditemukannya energi alternatif pengganti minyak yang relatif permanen dan dapat diandalkan maka minyak akan terus menjadi muara konflik hingga kapanpun. Dengan dua

faktor tersebut Timteng menjadi sangat beralasan untuk dikuasai dan ditaklukkan, demikian logika negara adi daya membaca nilai strategis Timteng.

Terkait dengan misi penaklukan Timteng, maka Israel menjadi satelit AS di kawasan tersebut. Keberadaannya menjadi semacam "radar" bagi AS untuk mendeteksi dinamika dan peta kekuatan di Timteng. Ringkasnya kepentingan Amerika terhadap eksistensi Israel terkait kepentingannya di Timteng sangat kuat.

Ketiga, lunaknya sikap PBB. Setidaknya hingga tulisan ini dibuat, AS masih menjadi penyumbang dana terbesar di PBB yaitu (22%) di susul Jepang (19,47%), Cina (2,053%) dan Rusia (1,1%) sebagaimana dikutip dalam www.arsip.net (diakses, Senin 7 Juni 2010, pukul 18:41 wib), sehingga tidak heran bila invasi AS ke Afganistan (2001) dan Irak (2003) direspon sangat lunak oleh lembaga perdamaian dunia ini, dengan tidak memberikan hukuman apapun kepada AS.

Sejalan dengan sikap PBB terhadap AS, sikap PBB terhadap Israel juga terkesan demikian. Inilah faktor lain yang melatarbelakangi arogansi Israel menantang gelombang penolakan internasional terhadap aneka tindakan brutal negeri Yahudi tersebut.

Keempat, fragmentasi dunia Arab dan Islam. Ada dua ikatan mendasar palestina dengan negara-negara Arab, yaitu: (1) mereka sama-sama bangsa arab dan (2) beragama Islam, setidaknya mayoritas penduduknya. Kedua faktor inilah yang mendorong solidaritas bangsa Arab terhadap Palestina yang kemudian memunculkan istilah pan arabisme dan islamisme.

Kendati demikian nampaknya pragmatisme politik telah membuat kedua solidaritas tersebut pecah belah berkeping-keping, sehingga efektivitasnya terhadap perjuangan Palestina tereduksi secara besar-besaran. Kondisi Arab dan Muslim yang terfragmentasi membuat Israel semakin berani melakukan aneka aksi tidak simpatiknya.

Implikasi Politik

Dampak paling dekat atas pernyataan politik Israel melalui duta besarnya, Michael Oren, di Washington adalah gelombang anti Israel dari masyarakat internasional. Yang akan diikuti dengan semakin tegas perbedaan antara negara-negara yang pro, kontra atau bahkan yang tidak peduli terhadap tragedi Mavi Marmara.

Nampaknya PBB tidak akan melakukan langkah kongkrit apapun selain pernyataan-pernyataan kosong untuk menjaga citranya sebagai lembaga perdamaian dunia. Terlebih lagi AS, cengkraman Yahudi di leher dan punggung paman sam lebih dari cukup untuk membuat polisi dunia tak dapat berkutik. Kendati kita tidak meragukan komitmen Obama, namun nampaknya ia tersandera oleh kekuatan lobi-lobi Yahudi yang tangguh. Yang masih bisa diharapkan dari nasib HAM di Gaza adalah media massa pro kemanusiaan, aneka gerakan solidaritas dari masyarakat dunia dan pemerintah negara-negara yang menjunjung nilai-nilai HAM.

KR, 12 juni 2010

BAB 11

DI BALIK SIKAP ANTI ISRAEL INGGRIS

Eropa, khususnya Inggris, yang selama ini memiliki citra buruk di dunia Arab karena dianggap berandil besar bagi berdirinya negara Israel pada tahun 1948, rupanya tidak selamanya sinkron menyangkut hubungannya dengan Israel (Kompas.com, 21 Desember 2009). Sejumlah indikasi menunjukkan betapa hubungan antara Inggris dengan Israel mengalami krisis yang semakin kuat. Perubahan pola hubungan Inggris-Israel dari kooperatif menjadi berpola konflik merupakan peristiwa unik dan berpotensi memunculkan efek bola salju besar bagi konstelasi politik global, terlebih lagi bagi proses perdamaian di Timur Tengah. Pertanyaan menariknya: mengapa Inggris merubah kebijakan luar negerinya terhadap Israel?

Secara teoritis, menurut Chris Brown, seorang analis Hubungan Internasional, politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar (Wuryandari, Genewati: 2008). Tidak semua aneka potensi domestik dapat dikelola dan dieksplorasi sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan domestik ataupun nasional suatu negara. Keadaan seperti inilah yang kemudian memaksa negara untuk berfikir cerdas dengan berupaya memberdayakan, memanfaatkan, mengeksplorasi dan mengelola aneka potensi yang tersebar di lingkungan eksternal (internasional) guna sebesar-besarnya memenuhi

kebutuhan nasional. Upaya inilah yang lazim disebut sebagai politik luar negeri.

Bentuk paling sederhana dari politik luar negeri bisa berupa pernyataan para pejabat yang berwenang, melalui pernyataan-pernyataan itu nampak kemana arah politik luar negeri suatu negara ditujukan. Instrumen paling kasat mata dari politik luar negeri bisa berbentuk (1) diplomasi, baik bilateral maupun multilateral, (2) konflik, dari pernyataan-pernyataan yang bersifat menyerang hingga konflik bersenjata, maupun (3) instrumen ekonomi, dengan memberi bantuan dengan aneka konsekuensinya maupun embargo guna memaksakan kehendak kepada negara lain agar menuruti kemauannya.

Perubahan pola hubungan Inggris-Israel sangat kasat mata, Inggris yang selama ini diyakini oleh publik global sebagai negara yang membidani lahirnya Israel kini merubah haluannya, beberapa indikasi yang menunjukkan hal tersebut antara lain: *Pertama*, pada hari senin, 14 Desember 2009, pengadilan Westminster di London mengeluarkan surat penangkapan untuk mantan Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni dengan dakwaan kejahatan perang.

Livni menjabat menteri luar negeri saat invasi Israel ke Jalur Gaza yang menyebabkan sekitar 1.400 warga Palestina tewas, sebagian besar warga sipil, dan sekitar 5.000 orang luka-luka. Livni kini menjadi Ketua Partai oposisi, Kadima. Surat penangkapan itu memang kemudian dicabut setelah pengadilan menyadari bahwa Livni, yang semula dijadwalkan berpidato dalam satu pertemuan di London akhir pekan lalu, tidak berada di Inggris. Meski surat penangkapan tersebut

dicabut, kasus Livni menjadi sinyal bahwa para pejabat Israel yang bertanggung jawab atas invasi ke Jalur Gaza tidak aman di Eropa.

Indikator *kedua* hasil sidang Uni Eropa tingkat menteri luar negeri pada 7 Desember lalu di Brussels, Belgia yang menegaskan, Jerusalem sebagai Ibu Kota bersama dua negara, Israel dan Palestina. Sikap Uni Eropa tentang Jerusalem itu mulai diketahui sejak bulan Maret.

Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup Inggris melarang komoditas produk wilayah permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur diekspor ke Inggris. Pemerintah Inggris menganggap komoditas produk permukiman Yahudi adalah ilegal karena diproduksi di wilayah yang ilegal.

Ketiga hasil sidang khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada pertengahan Oktober lalu di Geneva, Swiss, yang menyetujui laporan tim pimpinan jaksa internasional asal Afrika Selatan, Richard Goldstone bahwa Israel melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza. Lolosnya laporan Goldstone itu berkat dukungan sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris.

Sejumlah indikator tersebut, menunjukkan terjadinya pola hubungan kurang harmonis di antara Inggris dan Israel. Para penulis modern menyatakan dalam rangka pencapaian tujuan diplomatiknya suatu Negara menjalankan tiga model: *cooperative*, *accommodation* dan *opposition* (kerjasama, penyesuaian dan penentangan) (S.L. Roy: 1991).

Hemat penulis faktor yang mendorong Inggris mengubah arah politik luar negerinya menjadi berpola kontra Israel adalah gelombang anti Israel masyarakat dunia. Dalam

konteks ini Inggris sedang menjalankan model kedua penyesuaian (*accommodation*) terhadap arus utama kepentingan global serta bersamaan dengan itu Inggris juga sedang menggerakkan model ketiga, penentangan (*opposition*) terhadap Israel yang dalam konteks ini sedang berhadapan dengan gelombang besar tekanan masyarakat internasional.

Tragedi Gaza di akhir 2008 menelan korban sekitar 1400 warga Palestina tewas dengan sebagian besar warga sipil dan sekitar 5000 orang luka-luka telah membuka mata dunia betapa Israel merupakan Negara yang ekspansionis dan tidak mengindahkan nilai-nilai HAM. Tragedi tersebut sekaligus menggugah masyarakat internasional untuk menggalang aksi pemboikotan produk-produk Israel. Diyakini, sejumlah produk yang cukup populer menjadi penyandang dana bagi aksi brutal Israel.

Tekanan yang luar biasa dari media massa internasional, memiliki efek global yang sangat kuat. Fenomena inilah yang direspon Inggris melalui kebijakan kontra Israel. Inggris akan mengambil resiko besar berhadapan dengan publik global bila terus bersikukuh bersanding dengan Israel. Melalui aneka kebijakan seperti yang nampak pada aneka indikator yang telah disebut di atas Inggris mencoba meyakinkan publik internasional betapa bangsanya tidak suka terhadap tindakan biadap Israel.

Cara ini nampaknya cukup efektif untuk membuat masyarakat global bersimpati kepada Inggris, dengan tetap mengkonsumsi aneka produk Inggris. Dengan memosisikan diri berhadapan dengan Israel, Inggris hendak meyakinkan warga dunia bahwa Inggris memiliki komitmen kuat terhadap

HAM. Langkah tersebut akan menyelamatkan komoditas Inggris di luar negeri dari boikot para penentang Israel yang kian mengglobal.

Asumsi ini semakin meyakinkan, ketika Perdana menteri Palestina salam Fayyad, sebagaimana dikutip dalam www.kompas.com, Senin, 21 Desember 2009 menegaskan, bahwa sikap Inggris itu bertitik tolak dari sikap masyarakat internasional yang semakin kuat menolak pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan kota Jerusalem Timur. Ia menyerukan agar masyarakat internasional mengikuti jejak langkah Inggris untuk memboikot barang-barang produk wilayah permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur karena permukiman itu ilegal dan produknya juga ilegal.

Semarang, 22 Desember 2009

BAB 12

TERORISME, AKSI ATAU REAKSI?

Sebuah bom gagal diledakkan di Times Square (New York), salah satu tempat dengan tingkat kesibukan sangat tinggi di AS (Minggu, 2/ Mei). Diyakini pelakunya adalah seorang pemuda 31 tahun bernama, Faisal Shahzad. Pria kelahiran Kota Pabbi, barat laut Islamabad Juni 1979 itu menjadi tersangka utama pelaku rencana peledakan gagal tersebut. "Ia ingin membunuh orang Amerika di tempat paling sibuk di negara itu", kata Jaksa Agung Amerika Eric Holder (Tempo, Edisi 10-16 Mei 2010, hal109).

Peristiwa serangan bom yang menjadikan warga AS sebagai sasaran bukanlah kejadian yang tergolong langka. Peristiwa serupa kerap kali terjadi baik di AS maupun di luar AS, terutama semenjak peristiwa 11 September. Pertanyaannya: apa motif dibalik aksi tersebut? Mengapa AS atau tepatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan AS dijadikan sasaran? Serta bagaimana seyogyanya AS khususnya dan warga dunia pada umumnya merespon aksi yang selalu diberi label "teroris"? Tulisan ini bermaksud memberikan sejumlah analisis.

Terdapat banyak faktor yang dapat ditunjuk sebagai pemicu aksi terorisme, beberapa diantaranya adalah: ketidakadilan sosial, balas dendam, masalah politik hingga penafsiran terhadap teks kitab suci. Aneka penyebab aksi teror itu tidak selalu berdiri sendiri, seringkali berkait satu sama lain, berjaln berkelindan bahkan sangat sulit diurai dan dipilah-pilah.

AS beserta segala sesuatu yang berkaitan dengannya mulai dari kedutaan besar, bermacam perusahaan, aneka aset di luar negeri hingga turis, wartawan serta warga negara biasa sering menjadi sasaran aksi teror. Hemat penulis fenomena tersebut terjadi karena: *Pertama*, metode AS dalam merespon terorisme. Pasca peristiwa 11 september, AS sang "polisi dunia" menyatakan perang terhadap Terorisme. Ada beberapa hal menarik yang bisa dicatat: (1) dalam waktu singkat AS dapat mengetahui pelaku dibalik serangan yang menusuk jantung kedigdayaannya, yakni: al Qaeda. Terlepas dari kemungkinan benar atau salah dugaan tersebut, AS diuntungkan karena berarti AS dianggap oleh publik internasional memiliki kemampuan intelejen yang handal. Jadi pesanya terhadap dunia: jangan sekali-kali kalian melakukan hal serupa kepada kami, karena dengan segera akan ketahuan dan kalian dihukum; (2) AS mengecap Afganistan sebagai sarang teroris dan melindungi Osamah bin Laden; dan (3) AS menginvasi Afganistan tanpa restu PBB dan masyarakat internasional.

Demikian gambaran tentang bagaimana AS merespon teroris. Aneka aksi terorisme tak pelak memiliki beragam latar belakang, sehingga cara merespon pun harus melihat akar permasalahan dari tiap-tiap kasus. Pada serangkaian kasus terorisisme yang ditujukan kepada aneka aset dan warga AS nampaknya, terorisme lebih tepat dipahami sebagai: reaksi, dari pada aksi. AS harus, memiliki hati yang besar untuk bersedia mengevaluasi aneka kebijakan luar negerinya di Timur Tengah (Timgeng).

Jika tudingan AS benar, bahwa pelaku kamikaze WTC dan Pentagon adalah al Qaeda, maka tindakan perlawanan gerakan Islam di negara-negara Timteng tidak hanya mampu menjangkau pemerintah domestik pro AS saja, namun sudah memiliki kemampuan menjangkau pada level global dan target yang lebih luas. Singkatnya mengevaluasi dan mengubah secara radikal kebijakan luar negeri AS yang sarat dengan standar ganda, tidak adaptif terhadap tuntutan publik internasional dan tetap menjadikan invasi, kekerasan serta perang sebagai instrumen dominan dalam politik luar negerinya nampaknya menjadi cara yang memiliki kemungkinan lebih luas untuk mereduksi aneka tindakan buruk terhadap aset-aset AS di luar negeri.

Kedua, alasan yang nampak kasat mata dibuat-buat dalam menginvasi Afganistan (2001). Hal yang hingga kini—dan saya yakin hingga kelak—sangat sulit diterima oleh masyarakat internasional adalah invansi Amerika ke Afganistan pasca serangan 11 September. Amerika meyakini dan berusaha meyakinkan kepada publik internasional, Afganistan adalah sarang teroris serta menyembunyikan dan melindungi Osamah.

Kendati anggapan tersebut masih diragukan oleh banyak kalangan di seantero planet ini, namun niatnya untuk memporak porandakan Afganistan—setelah permintaannya terhadap negara yang diyakininya sebagai "sarang teroris" untuk menyerahkan orang nomor satu al Qaeda tersebut tidak dipenuhi—akhirnya dilakukan. Tidak sedikit korban nyawa yang diderita negara dengan mayoritas muslim ini sehingga sangat wajar bila terdapat kebencian yang muncul dari

solidaritas se Agama di dunia. Kebencian tersebut nampaknya cukup beralasan mengingat invasi AS ke Afganistan memiliki alasan yang masih ganjil, sulit dibuktikan dan terkesan dipaksakan serta dibuat-buat.

Ketiga, standar ganda AS dalam melabelkan predikat terorisme. Pada dasarnya label terorisme memang memiliki makna yang ambigu dan sarat politisasi. Seperti istilah-istilah lainnya, istilah terorisme juga sarat dengan nilai dan kepentingan. Kata tersebut akan—dengan mudah dan tanpa memunculkan konsekuensi pertanggungjawaban apapun—digunakan oleh si kuat untuk melabeli silemah.

Ketika AS menyerang Irak (2003) misalnya maka aksi tersebut bukanlah terorisme, padahal nyata-nyata ribuan orang tak bersalah menjadi korban kebiadapan tersebut. Sama halnya ketika Israel memaksa dan mengusir warga palestina meninggalkan rumah dan tanah kelahirannya, menyiksa bahkan membunuh mereka maka itu—di mata pemerintah AS—bukanlah terorisme, namun ketika ada seorang janda mengenakan rompi bom dan menerobos ke sekumpulan tentara AS di Irak atau Afganistan atau ketika Amrozi cs meledakkan bom di Bali maka itulah terorisme sejati. Label terorisme begitu ambigu dan digunakan sangat *ngawur* oleh sang “polisi dunia”, sehingga sangat wajar bila aneka ketidakpuasan, sakit hati dan kebencian ditujukan kepada segala sesuatu yang berbau dan berkaitan dengan AS.

Merespon Terorisme

Terorisme merupakan permasalahan yang sangat kompleks, ia muncul karena serangkaian faktor yang berjalin

berkelindan. Masalah ketimpangan ekonomi, kecemburuan sosial, kepentingan politik, ketidakadilan hingga penafsiran teks-teks kitab suci yang salah kait-terkait secara sangat akut. Mengingat begitu kompleksnya permasalahan tersebut maka menyelesaikan masalah terorisme pun sudah selayaknya melalui pendekatan yang kompleks, tidak melulu dengan cara-cara yang sama, *jadul*, sepihak serta tidak kompromistis. Terkait dengan hal tersebut hemat penulis ada beberapa rekomendasi, yaitu:

Pertama, pendekatan kekerasan dan militer yang sering mendominasi upaya dalam merespon aksi terorisme acapkali justru memunculkan respon balik yang lebih keras. Aneka pendekatan alternatif seperti pemerataan ekonomi, keadilan sosial, dialogis dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat terkait nampaknya harus menjadi perhatian *stake holders* terkait baik pada tingkat domestik maupun intermestik, secara berkesinambungan.

Kedua, merubah pemahaman kita terhadap terorisme. Terorisme yang selama ini dipahami sebagai aksi sudah saatnya dipahami sebagai reaksi. Memahami terorisme sebagai reaksi berarti mengevaluasi aneka sistem yang beroperasi, dari mulai ekonomi, sosial, politik hingga pemahaman agama.

Ketiga, diperlukan para pemegang otoritas yang cerdas dalam memahami fenomena terorisme, mereka harus mampu membaca pesan yang diinginkan para pembuat teror, lebih dari itu mereka dituntut pula untuk tidak hanya bisa berdialog dan mendengarkan keluhan mereka, namun mensinergikan dengan cerdas aneka kepentingan sekelompok orang terpinggirkan itu dalam desain sistem yang lebih besar.

Sedikitnya dengan tiga cara tersebut aneka aksi terorisme yang sangat meresahkan diharapkan dapat terseduksi setahap demi setahap sehingga dapat tercipta dunia damai seperti yang diidam-idamkan umat manusia sedunia.

Semarang, 3 Mei 2010

BAGIAN KE EMPAT STRATEGI

BAB 13

MEMBACA KEPENTINGAN AMERIKA DI INDONESIA

Dalam paruh kedua bulan Maret, Obama akan berkunjung ke Indonesia, kendati diberitakan Kompas.com 12 Maret, Ia akan menunda lawatannya karena suatu alasan, namun tak ada isyarat, akan menggagalkan. Kunjungan Presiden Negara Adi Daya ke Indonesia, menunjukkan betapa di mata Amerika, Indonesia tidak hanya aman namun juga memiliki makna strategis. Apa nilai strategis Indonesia di mata Amerika?, serta aneka alternatif dan kemungkinan apa sajakah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah RI?, tulisan ini akan memberikan sejumlah analisis.

Ada sedikitnya tiga faktor yang berpengaruh terhadap cara pandang dan sikap Amerika terhadap Indonesia, yaitu: Islam; Demokrasi; dan Obama. *Pertama*. Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas muslim, pada tahun 2000 kira-kira 86,1% dari 240.271.522 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam (Agama di Indonesia: Wikipedia), sehingga sulit dipungkiri aneka kebijakan politik Pemerintah RI akan dipengaruhi oleh faktor mayoritas muslim.

Tak pelak, aneka kebijakan Amerika yang dianggap merugikan dunia Islam, terutama terkait dengan konflik Palestina-Israel sering kali mendapat respon tidak simpatik dari muslim Indonesia. Terlebih di era teknologi telekomunikasi dan kebebasan media massa, gerakan anti Amerika, baik yang datang dari muslim maupun non muslim,

di seantero dunia sangat berpotensi untuk dikoordinir, didesain, dirancang dan ditata secara global.

Bahkan pada tingkat tertentu gerakan anti Amerika sudah sampai pada tingkat ekstrem dan global, contoh paling kasat mata yaitu kamikaze Al Qaeda pada peristiwa 11 September 2001, dengan catatan, tentu bila tuduhan AS terhadap kelompok yang "dianggap" teroris itu benar. Tingginya intensitas perlawanan terhadap kepentingan AS merupakan warning bagi Paman Sam untuk mengevaluasi kebijakannya, atau jika tidak, bukan mustahil bila suatu saat nanti negeri *super power* ini akan dilumat oleh gerakan global anti Amerika.

Dalam konteks ini Amerika sangat berkepentingan terhadap Indonesia. Amerika sangat berharap pada Indonesia dengan potensi mayoritas muslimnya bisa menjadi salah satu pendukung dalam setiap aksi-aksinya yang seringkali (entah kebetulan atau tidak) korbannya adalah muslim. Dukungan Indonesia terhadap Amerika akan membawa angin segar bagi Amerika dari deruan kritik yang dihujamkan padanya terkait dengan aksi teror terhadap Negara-negara seperti Irak, Afganistan dan Iran. Sebaliknya bila Indonesia memiliki sikap politik anti Amerika (nampaknya sulit dalam waktu dekat), maka akan sangat membebani Amerika dalam konstalasi politik global.

Nampaknya Amerika sedang melakukan perjuangan keras untuk merebut simpati Bangsa Indonesia, nampaknya pula upaya itu akan berhasil, Pemerintah RI amat antusias menyambut kehangatan persahabatan Amerika, serta dengan penuh kebanggaan dan gegap gempita menyambut kehadiran

sang presiden yang *dieu-elukan* pernah numpang tinggal di Jakarta.

Kedua, faktor yang mempengaruhi cara pandang dan sikap Amerika terhadap Indonesia adalah kemampuan negeri ini dalam mengkolaborasikan Islam dengan demokrasi. Dua gagasan tersebut diyakini kontradiktif secara konseptual, yang satu nilai-nilai luhur religius dari timur sedang yang lain gagasan sekuler dari barat, namun Bangsa Indonesia mampu mempertemukan dua kutub ekstrem tersebut dalam fakta empiris, Bangsa Indonesia yang demokrasi, tentu terlepas dari aneka cacat di sana-sini sebagai harga yang harus dibayar.

Suburnya kolaborasi Islam dan Demokrasi di Indonesia membuat Amerika secara ideologi merasa mendapat penerimaan dari muslim Nusantara. Potensi inilah yang terbaca oleh Amerika. Amerika sangat berkepentingan untuk mendapat dukungan dari mayoritas muslim di Indonesia guna membantu memperbaiki citranya di mata masyarakat muslim dunia, karena sikapnya yang acapkali merugikan Negara-negara berpenduduk muslim, seperti invansinya terhadap Irak (2003) dan Afganistan (2001). Dengan menggandeng Indonesia Paman Sam bermaksud memoles tampilan wajahnya di mata dunia Islam sebagai negar moderat yang tidak anti Islam.

Dengan modal branding, betapa Amerika dekat dengan mayoritas muslim di Nusantara maka lengkaplah sudah legitimasi bagi Paman Sam untuk lagi-lagi "menyakiti" Negara-negara (yang barangkali kebetulan) berpenduduk Islam dengan aneka dalih. Setidaknya tekanan kuatnya terhadap Iran tidak akan dipersoalkan oleh Bangsa Indonesia, atau

paling tidak Pemerintah Indonesia akan membantu Amerika meredam gejolak demonstrasi anti Amerika pada saat klimaks tekanan Amerika terhadap Iran terjadi nanti. Pada posisi ini maka Indonesia di mata AS sangat strategis.

Faktor *ketiga* yang mempengaruhi cara pandang dan sekaligus perlakuan (yang menunjukkan kepentingan) AS pada Indonesia adalah Obama. Obama memiliki hubungan emosional dengan Indonesia, karena alasan pernah tinggal di Jakarta, walaupun hanya 4 tahun.

Secara teoritik kepentingan nasional, yang menjadi alasan telak suatu bangsa berinteraksi dengan aneka aktor dalam fora internasional, akan ditransformasikan dalam tiga bentuk instrumen, yaitu: (1) diplomasi, (2) ekonomi (baik *economic reward* seperti *Capital Grants*, *Soft Loans* dsb. maupun *economic sanction* seperti *Freezing Bank Assets* dsb.) dan (3) perang. Dalam konteks ini maka Obama menjadi instrument diplomasi yang handal, karena: (1) memiliki hubungan emosional dengan Indonesia; (2) satu-satunya presiden Amerika yang berkulit hitam, ini menunjukkan kuatnya komitmen HAM dan demokrasi Amerika; dan (3) janjinya untuk menjalin hubungan baik dengan dunia Islam.

Dengan "instrument Obama" maka akan sangat mudah bagi Amerika merebut hati Pemerintah RI (kalau kurang tepat dikatakan seluruh bangsa Indonesia) untuk kemudian mentransformasikan aneka kepentingannya di Nusantara ini. Ketiga faktor inilah (Islam, Demokrasi dan Obama) yang memiliki pengaruh terhadap cara pandang dan perlakuan Amerika terhadap Bangsa Indonesia.

Merespon Amerika

Bagi Indonesia, upaya Amerika untuk merapat, seyogyanya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pemerintah RI. Dalam konteks ini, ada beberapa poin yang harus diperhatikan Pemerintah RI dalam berhubungan dengan Amerika: (1) Pemerintah RI harus mampu dengan cerdas membaca dan menangkap kepentingan nasional (*national interest*) RI terkait dengan Amerika. Jamak diketahui hampir dalam segala hal Bangsa Indonesia jauh tertinggal di belakang Amerika, mulai dari Iptek, politik, persenjataan, pendidikan dsb. (2) Pemerintah RI harus bisa memetakan dengan tepat aneka potensi yang dimiliki Amerika yang dapat diambil manfaat untuk Indonesia, dan (3) Pemerintah juga dituntut agar pandai, cerdik dan cerdas dalam mensinergikan aneka potensi yang terdapat pada kedua belah pihak. Kegagalan Pemerintah dalam memetakan dan merumuskan Kepentingan Nasional RI serta aneka potensi Amerika secara tepat, jelas dan terukur akan menyulitkannya secara operasional dalam aktivitas hubungan kedua negara. (4) melakukan diplomasi total (*total diplomacy*), yaitu mensinergikan semua elemen bangsa: pengusaha, pengrajin, pendidik, ilmuwan, petani serta semua stake holder lainnya untuk bersinergi melakukan aneka aktifitas aksi reaksi dengan stake holder di Amerika. Dengan dukungan kedua Pemerintah maka upaya melakukan diplomasi total akan sangat produktif untuk menunjang perekonomian Bangsa.

Bila upaya ini dilakukan dengan cerdik maka Bangsa kita akan dapat menyerap sebanyak mungkin aneka manfaat dari negeri *super power* tersebut. Ringkasnya total diplomasi

mensyaratkan aktifitas hubungan tidak hanya berlangsung di antara kedua Pemerintah saja, namun lebih diutamakan aktor-aktor non pemerintah dengan difasilitasi Pemerintah kedua negara. (5) Pemerintah RI harus pandai menjaga citranya di mata publik dunia, terutama terhadap Negara-negara yang sedang berseteru dengan AS, seperti Iran dan Korea Utara.

Indonesia harus menjadi dirinya sendiri, tidak berada di bawah ketiak Amerika, mampu bernegosiasi dengan setara, mengenyahkan sejauh mungkin sifat inferior berhadapan dengan Bangsa Amerika. Sehingga mampu memerankan fungsi mediator bagi aktor-aktor berseberangan, selain akan mendapatkan manisnya aneka manfaat dan peluang karena dekat dengan Negara *super power*.

Indonesia hanya akan mendapat *abu*-nya Amerika, habis manis sepah dibuang, selain *bopeng*-nya citra Nusantara di mata seteru Amerika bila Pemerintah RI gagal dalam memanfaatkan momentum ini. Pemerintah hendaknya tidak terbuai oleh nostalgia masa kecil Sang Presiden Negara *Super power*, sembari membangga-banggakan diri betapa orang nomor satu Amerika itu pernah tinggal di Indonesia.

Wawasan, 15 Maret 2010

BAB 14

ASEAN CHARTER, OMONG KOSONG

Kamis, 15 Oktober 2009, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim mendapat undangan untuk menghadiri suatu seminar bertajuk "*Quo Vadis ASEAN Charter*" yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro dengan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, untuk mengirimkan delegasi guna berpartisipasi dalam seminar yang rencananya akan diselenggarakan di Hotel Novotel, Jalan Pemuda Semarang.

Karena penulis mengampu mata kuliah Politik dan Pemerintahan Asia Tenggara, maka oleh Dekan, Bapak Andi Purwono, SIP., MSI. penulis diminta hadir mewakili institusi. Terkait dengan acara tersebut, penulis tertarik untuk menyampaikan pandangan penulis tentang *Asean Charter*.

Komitmen para pemimpin Negara-negara anggota Asean dalam menandatangani *Asean Charter* merupakan langkah maju yang patut mendapat apresiasi yang tinggi. Kerjasama pada tingkat regional di Asia Tenggara menjadi kebutuhan pokok bagi penyelesaian barjibun permasalahan yang berjaln berkelindan di dalam dan antara Negara-negara Asia Tenggara. Kendati demikian, sulit dipungkiri betapa Piagam Asean menjadi sejenis perjanjian tidur yang, implementasi, hasil, terlebih pengaruhnya tak kunjung dirasakan bagi masyarakat raya Asia Tenggara, kenapa demikian?

Tak ayal kepentingan nasional menjadi pertimbangan paling utama bagi Negara manapun untuk menentukan kebijakan luar negerinya. Apakah suatu Negara akan melakukan kerjasama, mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik tertentu atau bahkan berperang sekalipun sangat ditentukan oleh kepentingan nasional (*national interest*) Negara tersebut.

Aneka kepentingan mulai dari pengakuan eksistensinya sebagai Negara di mata Negara lain, prestise, kepentingan ekonomi, keamanan, politik hingga teritorial merupakan kebutuhan-kebutuhan yang harus diperjuangkan di tingkat internasional. Guna memperjuangkan aneka kepentingan tersebut Negara akan melakukan apapun, tak terkecuali perang.

Keputusan Negara-negara Asia tenggara untuk menandatangani *Asean Charter* merupakan keputusan politik yang bukan tanpa itung-itungan matang para pembuat kebijakannya. Kemudian seberapa besar kontribusi *Asean Charter* bagi pemenuhan kepentingan nasional masing-masing anggotanya akan sangat menentukan seberapa besar dan seberapa kuat komitmen Negara-negara anggota dalam menjalankan, mengimplementasikan dan mewujudkan apa yang mereka sepakati bersama itu.

Bila komitmen yang telah disepakati bersama ternyata dikemudian hari tidak memberi kontribusi yang berarti bagi pemenuhan kepentingan nasionalnya, bukan tidak mungkin bila komitmen tersebut dicampakan begitu saja. Terlebih lagi jika implementasi komitmen tersebut justru menjadi batu sandungan bagi kepentingan nasional—atau, barang kali

lebih tepatnya, kepentingan karir politik pejabat tertentu atau rezim tertentu di suatu Negara anggota—sangat bukan mustahil bila, *say good bay Charter*.

Hemat saya sedikitnya ada dua faktor—selain faktor-faktor lain yang lazim dituturkan para pengamat seperti: tidak adanya lembaga otoritas, lemahnya sanksi hukum dan sebagainya—yang memberikan kontribusi penting terhadap tersendatnya *Asean Charter*, yaitu:

Pertama, di mata Negara-negara Asia Tenggara *Asean Charter* bukanlah objek politik yang menarik. Sulit dipungkiri, betapa aneka tujuan yang hendak dicapai dalam *Asean Charter* muncul dari pandangan-pandangan idealis, yang disampaikan pada tingkat regional oleh para pemimpin Negara-negara ASEAN, baik merupakan keprihatinan terhadap realita sosial, politik, Hak Asasi Manusia, perdamaian, integrasi perdagangan regional, budaya, ekonomi maupun sekedar cita-cita di masa depan. Kendati demikian pandangan-pandangan politik tersebut sejatinya tidak selamanya bersentuhan dengan realita politik yang ada. Padahal dalam kacamata realisme politik, apa yang akan dilakukan oleh para pelaku dalam ranah internasional bukanlah idealisme politik, namun realita politik yang mendorong secara nyata para pelaku untuk bertindak semisal kekuasaan, finansial, prestise, pengaruh, otoritas dan sebagainya.

Realita politiknya adalah bahwa masing-masing pemerintah, atau lebih tepatnya rezim berkuasa, membutuhkan perasaan aman dari aneka ancaman dari dalam dan luar negeri. Realitanya adalah tidak sedikit para pemimpin Negara-negara terlibat pelanggaran HAM.

Realitanya adalah setelah lama berkuat berinteraksi dengan *Asosiation of Souteasth Asia Nation* alias ASEAN tidak ada keuntungan berarti yang didapatkan Negara-negara anggota.

Alasan *kedua*, yang mendorong kenapa *Asean Charter* tidak kunjung membuahkan hasil yang kongkrit yaitu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, adanya kekhawatiran para rezim berkuasa di Negara-negara anggota akan dampak *Asean Charter*. Alih-alih mampu memenuhi kepentingan politik, berkomitmen terhadap *Charter* justru dapat menjadi "batu sandungan" bagi para pemimpin Negara-negara Asean. Dosa-dosa pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh rezim-rezim berkuasa selalu mengganggu kenyamanan mereka, sehingga melegitimasi secara penuh *Charter* berarti menggali kuburan sendiri. Singkatnya tidak adanya *political will* untuk menciptakan Asia Tenggara yang kondusif, setabil, dinamis dan progresif baik secara hukum, politik, keamanan, ekonomi itulah yang membuat mengapa *Asean Charter* harus melalui jalan terjal yang panjang.

Ini berbeda, misalnya, dengan Uni Eropa di Eropa, sebagai organisasi kawasan, Uni Eropa menyerupai Negara, ia tidak hanya memiliki lembaga eksekutif yang dikenal dengan sebutan Komisi Eropa, namun juga memiliki lembaga legislatif, Parlemen Eropa. Organisasi regional Eropa itu memiliki otoritas yang jelas, memiliki *power* untuk menjatuhkan sanksi sehingga aneka kesepakatan yang dihasilkan dapat menjadi instrument perubahan yang dahsyat, radikal, konstruktif, progresif, dan berprestasi dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM. Dengan mekanisme kontrol

demokrasi Uni Eropa menjadi aktor kunci dalam ranah ekonomi politik global, pertanyaanya: belajarkah ASEAN?.

Wawasan, 14 Okt 2009

BAB 15

MENSIASATI PERUBAHAN MYANMAR

Amerika akan mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan larangan import dari Myanmar. Hal serupa juga dilakukan Uni Eropa dengan memberikan akses bagi Myanmar ke pasar Eropa tanpa kuota ataupun bea masuk. Kebijakan tersebut terkait sejumlah kemajuan demokrasi dan HAM di Myanmar. Serangkaian sinyalemen positif yang terjadi di Myanmar, hemat penulis, sangat penting bagi pondasi perekonomian baik di tingkat domestik Myanmar, maupun regional Asia Tenggara. Sejumlah seting sosial politik baik di tingkat domestik, maupun internasional akan meningkatkan peran ekonomi kawasan Myanmar di masa depan.

Pertama, dari sisi geografis Myanmar terhubung secara darat dengan tiga kekuatan ekonomi: India, Cina dan Asia Tenggara daratan. India dan Cina digadang-gadang menjadi kekuatan ekonomi global. Sementara Asia Tenggara daratan atau secara lebih spesifik Indocina memiliki dinamika pertumbuhan yang menggairahkan.

Dari perspektif India, Myanmar menjadi jembatan darat (atau *Bridge Land*, meminjam istilah Raja Mohan, 2010,1) bagi perdagangan India dengan Indocina. Berbagai produk para pengusaha India dapat mencapai pasar di Indocina tanpa melalui Selat Malaka. Jalur darat Myanmar lebih efisien dan efektif untuk rute perdagangan para pebisnis India dengan pasar mereka di Indocina. Asumsi ini menjadi meyakinkan, mengingat: (1) Indocina menjadi sasaran paling favorit bagi investor India di ASEAN, terutama setelah tahun

2007. Para investor menggarap sektor publik maupun privat di daratan ini. Di Vietnam misalnya, melalui *Oil and Natural Gas Corporation; Essar; dan Tata Steel* total investasi India di negeri komunis itu menempati peringkat terbesar ke 6 di tahun 2007 (naik 22 peringkat dari tahun sebelumnya) dengan nilai total investasi sebesar US\$ 6 juta milyar atau terbesar di ASEAN (Shekar, 2008); (2) baik India maupun Indocina mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat. Ingat, Indocina yang terdiri dari negara *late comers* tak ayal menjadi sasaran FDI global; dan (3) digarapnya proyek jalur transportasi India-Indocina melalui Myanmar. Tunjuk saja misalnya: *India-Myanmar Friendship Road* sepanjang 160 km antara Tamu dengan Kalemryo; *Trans Asia Highway; Trans Asia Railway; dan trial highway project* sepanjang 1.360 km dalam kerangka kerjasama multilateral BIMSTEC dan *Mekong Gangga Cooperation (MGC)* yang menghubungkan India, Myanmar dan Thailand.

Di sisi lain, bagi Cina, Myanmar merupakan rute terpendek yang menghubungkannya dengan Samudera India. Dari pada melalui Selat Malaka dengan aneka konsekuensi biaya ekonomi tinggi maka hubungan baik dengan Myanmar bagi Cina akan memangkas biaya tinggi jalur perdagangannya dengan Timur Tengah. Cina bahkan telah menandatangani kesepakatan jangka panjang dengan Myanmar untuk eksploitasi cadangan hidrokarbon dan transportasi minyak melalui jalur darat dengan menggunakan pipa sepanjang 1.100 km dari pelabuhan Kyaukryu di sebelah selatan Myanmar hingga perbatasan kota Ruili di Yunan, Cina selatan. Jaringan pipa minyak dan gas tersebut membuat Cina menjadi

tidak lagi bergantung pada Selat Malaka (Kanwal, Gurmeet, 2010).

Kedua, kemajuan demokrasi di Myanmar yang nampak dari: (1) munculnya pemerintahan sipil baru di Myanmar; dan (2) diizikannya Aung San Suu Kyi (tokoh demokrasi yang paling ditakuti Junta) untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 1 April 2012 silam, hingga pada akhirnya ikon gerakan demokrasi Myanmar itu menang sebagai anggota Parlemen dari daerah pemilihan Kawhmu, barat daya Rangoon.

Kedua seting tersebut (Myanmar menjadi penghubung 3 ekonomi kunci dan kemenangan demokrasi) menciptakan seting ke *tiga* yakni iklim investasi, sehingga diyakini akan ada pertumbuhan arus investasi yang memasuki negeri tersebut. Tunjuk saja misalnya: PepsiCo Inc, Coca Cola dan GE sudah membangun jaringan bisnis mereka di Myanmar. Belum lagi investor asing dalam sektor energi yang telah mapan jauh-jauh hari sebelumnya, seperti: Total dari Prancis, CNOOC dan SNPC dari Cina, Daewoo dari Korea Selatan, ONGC dari India, Danford Equities dari Australia, PTTEP dari Thailand termasuk perusahaan-perusahaan minyak dari Inggris, Kanada, Indonesia, Malaysia dan Rusia.

Peluang bagi Indonesia

Menguatnya peran Myanmar bagi pertumbuhan ekonomi Indocina di masa depan, sudah seharusnya terbaca oleh para pembuat kebijakan di Indonesia, sehingga sudah saatnya serangkaian langkah strategis mulai dipersiapkan. Bagi Indonesia hal tersebut bisa menjadi peluang sekaligus

ancaman terhadap ekonomi Indonesia di masa depan. Aneka produk India yang memasuki pasar Indocina melalui Myanmar tentu akan memiliki harga yang lebih murah (karena efisiensi biaya) bila dibandingkan dengan melalui jalur Selat Malaka. India sekarang sedang "mendekap erat" Myanmar yang akan menjadi "jembatan emas" bagi aneka produk-produknya menuju pasar Indocina. Pertemuan jaringan bisnis India dengan jaringan bisnis Cina di Indocina akan menciptakan persaingan sangat ketat, sehingga akan mengurangi porsi perolehan para pebisnis Indonesia di kawasan itu.

Sementara di tingkat domestik pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu mendorong produktifitas, dengan sedikitnya tiga cara: **pertama** efisiensi di berbagai lini birokrasi dan pemberantasan korupsi menjadi agenda wajib bagi negeri ini bila menghendaki eksistensinya dalam ekonomi kawasan; **kedua** yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pemerintah untuk mengurangi ekspor bahan-bahan mentah dan bersamaan dengan itu meningkatkan ekspor barang-barang jadi atau setidaknya setengah jadi. Hal ini hanya bisa dilakukan bila para pelaku ekonomi dalam negeri mampu melakukan penambahan nilai aneka bahan mentah atau setengah jadi di dalam negeri sebelum menjualnya ke luar negeri. Bila ini bisa dilakukan maka rantai nilai (*value chain*) secara bertahap akan bergeser ke dalam negeri. Strategi ini menjadi sangat mungkin dilakukan melalui regulasi bisnis yang "memihak" para pelaku ekonomi domestik; dan **Ketiga** memanfaatkan Myanmar sebagai jalur

perdagangan menuju pasar raya India. Indonesia bisa mensiasati ini melalui regulasi di ASEAN.

Yogyakarta, 29 September 2012

BAGIAN KE LIMA

DIPLOMASI

BAB 16

DIPLOMASI INDONESIA-AMERIKA

Pro kontra kunjungan Presiden Barack Obama ke Jakarta mengindikasikan keberagaman perspektif bangsa ini terhadap Amerika. Kemajemukan sikap yang terlihat dari cara bangsa ini merespon kunjungan sang Presiden sudah seharusnya dapat ditangkap oleh SBY dan ditransformasikan dengan cerdas kepada Obama, tentu dengan basis kepentingan nasional. Kendati tidak berprestasi memberikan rekomendasi cemerlang, tulisan ini bermaksud menunjukkan sejumlah titik rapuh diplomasi Indonesia di hadapan Amerika.

Aneka pidato dan pernyataan para kepala negara tidaklah cukup untuk memahami hakikat hubungan antar bangsa, melainkan pola-pola berkesinambungan yang telah lama terjadi di antara bangsa-bangsa itulah yang seharusnya dijadikan rujukan untuk menilai hubungan tersebut. Apakah pola hubungan itu bersifat eksploitatif ataukah saling menguntungkan.

Bagi Amerika, Indonesia merupakan instrumen yang sangat bermanfaat untuk memenuhi aneka hajat ekonomi-politikanya. Berbagai keuntungan tengah direnggut Amerika dari bumi Nusantara. Selain kekayaan alam yang disedot habis oleh berbagai perusahaan-perusahaan raksasa asal *paman sam* seperti freeport dan Exxon Mobil, sejatinya dalam politik luar negeri terutama terhadap dunia Islam, Indonesia menjadi basis pencitraan Amerika.

Delapan puluh persen lebih dari 235 juta penduduk Nusantara adalah muslim, sehingga hubungan harmonis

Amerika dengan pemerintah SBY menguntungkan Amerika karena berimplikasi pada tereduksinya "wajah bopeng" *paman sam* di mata muslim dunia. Invasi Amerika ke Afganistan (2001) dan Irak (2003) yang ditentang masyarakat internasional, keberpihakannya kepada Israel yang dinilai masyarakat global sebagai bangsa yang tidak menghormati hak asasi manusia serta aneka dosa Amerika kepada dunia islam lainnya akan berkurang, setidaknya secara simbolis, dari pikiran umat Islam di Indonesia dan dunia ketika hubungan harmonis antara kedua negara terjalin.

Di sisi lain entah kebetulan atau tidak, kunjungan Obama ke Jakarta bersamaan dengan waktu di mana Indonesia akan memperoleh giliran memimpin ASEAN. Jangan lupa, bagi Amerika, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang menjadi basis konsumen aneka produknya. Serbuan barang-barang dari India dan Cina ke kawasan ini bukan tidak mempengaruhi jatah rezeki *paman sam*. Lawatan Obama ke Jakarta dalam konteks ini bisa dimanfaatkan Amerika untuk melobi kemudahan-kemudahan bagi aneka produknya di kawasan yang tahun depan akan dipimpin Indonesia. Aneka fakta tersebut menjadi Indikator betapa Amerika telah mengambil banyak manfaat dari hubungannya dengan Indonesia, namun apakah juga sebaliknya?

Diplomasi Indonesia

Harus diakui terutama pasca reformasi tidak banyak manfaat yang dapat diambil Indonesia dari hubungannya dengan Amerika. Indonesia dalam konteks hubungan kedua negara justru sering kali berposisi sebagai *subordinate*. Hal ini

sangat kontras dengan posisi Indonesia di hadapan Amerika di era dua presiden pertama republik ini. Dengan sangat lihai kedua presiden pertama negeri ini dapat memanfaatkan konflik Amerika dengan Uni Soviet kala itu, sehingga aneka keuntungan komersial dan prestis dapat diperoleh.

Sukarno misalnya dapat memobilisir negara-negara Asia-Afrika untuk mendapatkan nilai tawar seimbang dengan negara-negara Barat. Di era itu Indonesia menjadi sangat diperhitungkan oleh negara-negara Barat. Di sisi lain Suharto mampu memanfaatkan isu anti komunis di tingkat domestik untuk memanen banyak paket finansial dari Amerika. Strategi Sukarno dan Suharto memang diuntungkan oleh bipolaritas sistem politik global, namun juga tidak terlepas dari kepawaian mereka dalam menangkap pesan zamannya dan meresponnya secara cemerlang.

Di era pasca reformasi Indonesia nyaris nihil dari peran strategis di panggung global. Hemat penulis setidaknya ada empat titik rapuh diplomasi Indonesia yang berimplikasi pada lemahnya posisi Indonesia, tak terkecuali dihadapan Amerika. *Pertama* dan yang terpenting adalah *national powers*. *Nasional powers* atau yang lazim dimaknai sebagai kapabilitas nasional kerap kali diukur dengan kemampuan militer negara tersebut, seperti jumlah personil militer, kepemilikan senjata dan tingkat kecanggihannya, *skill* para operatornya serta bermacam instrumen lain yang berkaitan dengan *hard power*. Dalam konteks yang berbeda *national power* juga dimaknai sebagai kemampuan suatu negara mengendalikan pikiran dan tingkah laku aktor lain. Dalam dua tolak ukur ini (*power* sebagai kapabilitas dan *power* sebagai

kemampuan mempengaruhi), jelas Indonesia kalah telak dibanding Amerika.

Titik rapuh *kedua* diplomasi kita adalah beban dosa Hak Asasi Manusia (HAM). Aneka jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim represif Orde Baru, tragedi *santa cruz* yang membawa multi efek pada hubungan militer kedua negara, hingga kasus Munir yang belum pernah tuntas menjadi beban tersendiri bagi diplomasi Indonesia. Tak peduli selihai apapun seorang diplomat, mereka akan sangat kesulitan memperjuangkan kepentingan nasional bangsa ini bila lebaran-lembaran hitam sejarah itu tidak secepatnya diselesaikan.

Ketiga, inferioritas para elit ketika berhadapan dengan para pemimpin bangsa asing. Para elit bangsa ini seolah kehilangan jati diri dan harga diri ketika misalnya berhadapan dengan korporasi-korporasi besar seperti *Freeport* yang beasal dari Amerika. Dengan mudah mereka menggadaikan aneka kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia walaupun harus memiskinkan warga Papua. Jika penyakit inferioritas dalam berhadapan dengan bangsa lain yang menghinggapi para elit di negeri ini tidak dikikis habis, maka dalam waktu yang tidak lama Indonesia akan tinggal nama, karena semua aset yang dimilikinya akan begitu saja diberikan kepada para pemilik modal asing (Amien Rais, 2008).

Keempat, kegagalan untuk belajar. Setelah dilululantahkan oleh bom atom, bangsa Jepang tidak diam begitu saja. Mereka segera mengirimkan para pemudanya ke Eropa dan Amerika untuk menyerap ilmu pengetahuan dan

Teknologi. Salah satu contoh kecil yang dapat ditunjuk dari kesuksesan mencontoh Jepang adalah keberhasilan Mr. Toyo dalam meniru produksi mobil Ford. Di Jepang Mr. Toyo mengembangkan konsep Toyota dan memodifikasinya sehingga menjadi salah satu jenis mobil bergengsi di dunia yang diproduksi dengan teknologi tinggi.

Cina contoh lain bangsa peniru. Nyaris semua produk-produk unggul di dunia ditiru oleh Cina. Malaysia yang dulu junior jauh di bawah Indonesia namun karena kepiawaiannya dalam belajar dan meniru kini jauh di atas Indonesia. Hal yang sama juga berlaku pada Singapura, Vietnam serta sejumlah negara lain yang tidak betah dalam keadaan tertindas.

Bangsa Indonesia nampaknya tidak memiliki *skill* pembelajar, sehingga disalip oleh negara-negara yang sebelumnya berada jauh dibawahnya. Bila bangsa ini tidak segera meningkatkan kemampuan belajarnya maka jangan heran bila suatu saat nanti bangsa besar ini akan jadi kenangan. Aneka kegagalan diplomasi yang dialami Indonesia terutama dalam berhadapan dengan *paman sam* tak lepas jauh dari sejumlah titik rapuh diplomasi tersebut. Hasil dari kemampuan belajar suatu bangsa akan menjadi modalitas potensial bagi suatu bangsa.

Semarang, 10 November 2010

BAB 17

MENDESAIN DIALOG ANTAR PERADABAN

Rencana pembakaran al Qur'an oleh sejumlah ekstrimis kristen telah dibatalkan. Para ekstrimis mengancam mereka akan melakukan aksi pembakaran kitab suci umat Islam bila pembangunan Masjid dan *Islamic Center* di daerah *Ground Zero, New York* di tempat sekitar bekas gedung *World Trade Center (WTC)* diteruskan.

Kendati aksi nekat tersebut secara resmi telah dibatalkan, namun bukan berarti potensi konflik dan anarkisme telah sirna. Serangkaian upaya harus secepatnya dilakukan oleh berbagai stake holder mulai dari pemerintah Amerika sendiri, para agamawan, pegiat dialog antar agama serta berbagai kelompok penekan maupun kepentingan yang konsen dalam masalah tersebut untuk mengkondisikan terciptanya dialog sehat antar umat. Tulisan ini bermaksud menganalisis sejumlah faktor yang diyakini memiliki pengaruh kuat terhadap masa depan dialog antar agama atau dalam sekala yang lebih luas antar peradaban. Penulis percaya sedikitnya terdapat empat variabel yang sangat berpengaruh dalam hal ini.

Pertama, pemikiran para ilmuan terkemuka. Salah satu dari sejumlah penentu masa depan dialog antar peradaban adalah pemikiran para ilmuan terkemuka di dunia. Paradigma publik global terkait hubungan Islam-Barat tidak dapat disangkal mengikuti arus pemikiran yang dikemukakan para pemikir dunia. Contoh paling mudah ditunjuk adalah tesis Samuel P. Huntington, *the clash of civilization*. Nampaknya

sulit menolak pandangan bahwa pemikiran Huntington tidak memiliki pengaruh pada realitas sosial politik global.

Para ilmuwan sosial dan politik membuat analisisnya berdasarkan fenomena. Mereka menggambarkan, menjelaskan, membuat prediksi dan memberikan preseksi aneka persoalan sosial politik, tak terkecuali terkait hubungan Islam-Barat. Para ilmuwan dengan reputasi keilmuan yang disegani seperti Huntington dan Francis Fukuyama misalnya menjadi rujukan utama para pembuat kebijakan dan sangat mendapat perhatian kuat dari publik internasional. Celakanya, apa yang difatwakan para ilmuwan itu, seringkali diyakini, diikuti, dijadikan referensi kebijakan tanpa sikap kritis. Inilah yang acapkali mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat internasional. Dalam konteks ini maka kecerobohan ilmuwan akan menjadi bencana bagi umat manusia.

Invasi dan perseteruan Amerika terhadap sejumlah negara seperti Afganistan, Irak dan Iran, misalnya, sulit dilihat tidak berkaitan dengan "desain" tesis *the clash of civizatons*. Kendati terdapat sejumlah alasan yang kerap kali diajukan Amerika untuk melakukan tindakan invasinya itu, seperti: sarang teroris, kepemilikan senjata pemusnah masal, kediktatoran para pemimpinnya, demokratisasi, namun aneka argumentasi tersebut nampak dibuat-buat dan sangat sulit meyakinkan publik global.

Terhadap kebijakan perang yang jelas-jelas memiliki efek destruktif luar biasa ekstrim sejumlah alasan tidak berdasar bisa mendorong Amerika untuk mengambil kebijakan perang. Hal ini tentu semakin memperkuat dugaan betapa dogma tesis Huntington seakan-akan menuntun,

mengilhami dan menjadi panutan tidak hanya publik global namun bahkan para pemimpinya.

Kedua, desain opini publik oleh media massa internasional. Media massa menjadi faktor kunci di era keterbukaan informasi. Selain menyampaikan fakta kepada publik, sulit dipungkiri bahwa media massa juga membentuk gambaran realitas di benak publik. Dalam konteks ini maka media massa harus memiliki (1) kesadaran ekstra terhadap realita, dan (2) keberpihakan pada kepentingan publik. Kegagalan media dalam memenuhi dua poin tersebut berpotensi tidak hanya menciderai kepentingan publik namun juga kontra produktif dengan misi edukasi media.

Berangkat dari pemikiran tersebut maka media massa dituntut untuk mampu tidak hanya memediasi aneka kepentingan secara adil (tidak berpihak pada kelompok atau individu tertentu), profesional dan proporsional namun juga mampu meramu dengan cerdas berbagai kepentingan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. I'tikat baik dan kontribusi media massa dalam turut membangun opini masyarakat internasional guna menciptakan dunia yang damai, empatik, sinergi dan cerdas sangat dibutuhkan dalam konteks perseteuan Islam-Barat. Dalam rangka menciptakan harmonisasi Islam-Barat media massa ditantang untung dapat menampilkan fakta dalam "bingkai perdamaian".

Ketiga, kepentingan politik para pemimpin dunia. Konstelasi kepentingan para aktor politik di dunia bergerak secara sangat dinamik. Kedewasaan para pemimpin di dunia dalam mengelola, menata, mendesain, merancang dan mensinergikan aneka kepentingan yang seringkali berbeda

bahkan bertentangan menjadi faktor kunci dalam mengupayakan dunia yang lebih damai.

Dari para pemimpin di tingkat akar rumput hingga global sudah saatnya membentuk jaring-jaring kerjasama untuk mencegah benturan peradaban. Konsensus, kesepakatan serta komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih beradab nampaknya harus menjadi agenda seting tata dunia baru. Kegagalan para pemimpin di dunia dalam melihat persoalan yang lebih substansial, lebih besar dan lebih jauh hanya akan membuahkan malapetaka benturan antar kepentingan yang dalam skala tertentu menjadi antar peradaban.

Dalam konteks ini maka diperlukan visi dan misi yang menerawang jauh ke masa depan. Aneka temuan persenjataan umat manusia yang memiliki daya rusak semakin ekstrim nampaknya akan terus menjamur. Sehingga ketidaksiapan manusia dalam mengendalikan dirinya sendiri hanya akan memperbesar kemungkinan pemusnahan umat manusia di muka bumi.

Keempat, kesadaran publik global. Kesadaran publik merupakan akumulasi dari serangkaian faktor sebelumnya. Pemikiran para ilmuwan berpengaruh, desain opini publik media massa dan kepentingan politik para pemimpin dunia pada akhirnya akan memproduksi kesadaran publik global. Kesadaran publik inilah yang jauh lebih penting untuk mencegah terjadinya benturan antar peradaban.

Publik yang sadar akan aneka potensi konflik akan bertindak lebih dewasa dalam merespon berbagai isu yang muncul. Ketimbang menggunakan cara-cara anarkis, aneka

metode yang mengedepankan dialog, etika, semangat persahabatan dan kerjasama mendapat prioritas.

Refleksi

Seiring dengan kemajuan peradaban umat manusia yang ditandai dengan aneka temuan dalam bidang teknologi dan sains menuntut kemampuan umat ini untuk bekerjasama antara satu dan yang lain. Tesis Huntington, *the clash of civilization*, yang semula merupakan upaya sang ilmuwan untuk memprediksi pola hubungan internasional pasca perang dingin, yang seharusnya diikuti dengan preskripsi untuk mempersempit kemungkinan terjadinya konflik antar peradaban, justru direspon oleh para politikus Amerika terutama yang berhaluan realis sebagai basis kebijakan invasinya terhadap dunia Islam.

Dalam konteks ini maka aneka pemikiran pembendung tesis Huntington harus terus diapresiasi. Ini bukan sekedar persoalan kemampuan memprediksi masa depan, namun lebih dari itu mengontrol masa depan dengan menanamkan motivasi perdamaian pada umat manusia.

Sekali lagi perlu digaris bawahi bahwa: pemikiran para ilmuwan, desan opini publik media massa, kepentingan para pemimpin dan kesadaran publik global menjadi variabel penting yang sangat menentukan masa depan dialog peradaban. Pertanyaannya: seberapa serius kita menginginkan perdamaian di muka bumi?.

Semarang, 16 September 2010

BAB 18

MUJAHADAH AL ASMAUL HUSNA DAN *SOFT POWER*

Sabtu-Minggu (9-10 Januari 2010) Universitas Wahid Hasyim bekerjasama dengan Majelis Khidmah Asmaa-ul Husnaa mengadakan Mujahadah Asmaa-ul Husnaa 1000 kali tingkat Nasional dan Khaul Akbar. Acara yang berlangsung di Kampus II Unwahas Jl. Menoreh Tengah 22/ X Sampangan Semarang ini merupakan acara kali ke 10 yang secara rutin dilakukan tiap tahun di bulan Muharram. Yang menarik dari kegiatan tersebut adalah Jamaahnya yang bahkan sudah merambah hingga mancanegara, beberapa di antaranya ada yang berasal dari Hongkong, Malaysia dan Taiwan (Al Hafidh, Amdjad: 2008).

Inilah salah satu karakteristik unik yang menandai pola hubungan internasional kontemporer di mana *trend* hubungan tidak hanya didominasi oleh hubungan antar pemerintah (*inter governmental*) maupun antar bagian pemerintah dengan bagian pemerintah di Negara lain misalnya antara departemen pertahanan dari dua pemerintah yang berbeda (*trans governmental*) namun juga trans nasional yakni antar aktor non Negara yang berada pada Negara yang berbeda, seperti Jamaah Mujahadah Asmaa ul Husnaa.

Kegiatan bernuanasa kultural ini amat berpotensi menjadi instrument dialog antar bangsa yang bukan mustahil memiliki korelasi positif terhadap dinamika hubungan antar Negara. Tata hubungan antar bangsa dengan desain berbasis kultur dan warganegara merupakan *soft power* yang menjadi

kecenderungan terkini dan dilakukan oleh bangsa-bangsa besar seperti Amerika, Jepang, Negara-negara Eropa dan tentunya dua pendatang baru Cina dan India.

Trend Soft Power

Dalam berhubungan dengan Negara lain, *power* menjadi tujuan dan alat (*instrument*) yang sangat penting bagi suatu negara. *Power* yang sering difahami sebagai kemampuan aktor untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan aktor lain memiliki dua dimensi, yaitu: *hard power* (kekuatan pertahanan-keamanan dan militer) dan *soft power* (aneka nilai, kultur dan kemampuan untuk mencitrakan diri sebagai Negara yang beradap). Baik *hard* maupun *soft power* keduanya menjadi syarat bagi bangsa manapun untuk mampu berperan lebih dalam pergaulan internasional.

Teknologi dan ilmu pengetahuan yang selalu dipelopori oleh Amerika menjadi sisi-sisi *soft power* bagi Negara Adi Daya itu. Produksi film Bollywood yang menggurita dalam dunia perfileman global menjadi *soft power* bagi India, selain prestasinya dalam IT, aneka produk farmasi serta banyak produk andalan negeri Sharul Khan itu tentunya. Berbagai produk teknologi, seni dan budaya Jepang menjadi kekuatan tersembunyi bagi aktor berjudul Negeri Matahari Terbit. Komunitas-komunitas Cina rantau yang tersebar di Negara-negara di seluruh dunia, dengan komitmennya yang kuat terhadap kultur dan ajaran leluhur menjadi modalitas *soft power* bagi negeri tirai bambu yang semakin terang benderang. Serta masih banyak permisalan yang dapat ditunjuk betapa *soft power* menjadi karakteristik unik yang

dimiliki dan dikembangkan secara serius oleh Negara-negara tangguh.

Hal ini bukan berarti peranan *hard power* menjadi tidak bermakna. Seiring dengan semakin menguatnya *soft power*, *hard power* masih menjadi primadona yang menentukan kedudukan dan posisi suatu Negara dalam hierarki sistem anarkis politik internasional. Hemat penulis ada sejumlah alasan yang mendorong mengapa *soft power* menjadi berperan strategis dalam konstalasi politik global kontemporer, yaitu: Pola hubungan internasional pasca perang dingin memiliki karakter unik yang membedakan secara tegas dengan era sebelumnya, jika pada era perang dingin, sedikitnya dua hal menjadi penanda beroperasinya sistem politik internasional, yaitu: (1) hubungan internasional yang didominasi oleh aktor negara (*state*), dimana negara menjadi pelaku paling dominan, sementara aktor-aktor lain seperti perusahaan multi nasional, NGO, aneka kelompok kepentingan dan penekan yang tersebar di Negara-negara di dunia pada waktu itu tidak memiliki peran berarti; (2) terdapat hierarki isu, di mana isu-isu pertahanan keamanan mendominasi aktivitas aksi-reaksi internasional dibanding isu-isu non keamanan seperti Hak Asasi Manusia, lingkungan, kesehatan, pangan, energi dsb.

Sementara di era pasca perang dingin, batas-batas teretori Negara semakin kabur, aneka kebijakan Negarapun merupakan produk dari benturan-benturan kepentingan bermacam aktor, mulai dari tekanan media massa, kelompok kepentingan, perusahaan-perusahaan asing hingga individu-individu berpengaruh; kaitan antar isu lebih berpola

horizontal, isu keamanan tidak lebih penting dari isu HAM, lingkungan hidup, flu burung, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dsb.

Bahkan pola konstalasi hubungan antar bangsa berkecenderungan kuat mengarah pada desain saling ketergantungan yang sangat akut antar beragam aktor dari berbagai tingkat (*complex interdependency*). Robert Keohane dan Joseph Nye, lebih jauh menjelaskan, sedikitnya ada tiga indikasi yang menunjukkan *complex interdependency* sedang beroperasi, yaitu: (1) *multiple chanel*, yakni hubungan dan aneka aksi reaksi yang terjadi dalam tata hubungan internasional berlangsung melalui banyak jalur (*multiple chanel*), tidak lagi hanya G to G (*government to Government*), bahkan hingga tingkat terendah *people to people*, sekeping permissalan yang dapat ditunjuk adalah jamaah Mujahadah Asmaa ul Husnaa yang memiliki jaringan jamaah hingga manca Negara; (2) *multiple issu*, tidak ada lagi dikotomi *high politics* dan *low politics*, di era perang dingin dikotomi tersebut, *high politic* didominasi oleh isu ketahanan-keamanan, sementara isu seperti HAM, lingkungan dan gender dikategorikan dalam *low politics* yang kurang memperoleh perhatian; (3) semakin kecilnya kemungkinan perang digunakan sebagai *instrument* dalam berhubungan dengan Negara lain (Jemadu, Alexius: 2008).

Dalam tata dunia yang terdapat *multiple issu*, *multiple chanel* dan melemahnya signifikansi perang sebagai instrument politik luar negeri telah membuka peluang semakin lebar bagi *soft power* untuk menggeser, bukan menggantikan, fungsi *hard power* dalam ranah hubungan

internasional. Mujahadah Asmaa ul Husnaa yang dikembangkan di Universitas Wahid Hasyim dan telah merambah di seantero Nusantara bahkan mulai menarik perhatian masyarakat manca Negara menjadi potensi luar biasa besar sebagai basis pengembangan *soft power* bangsa Indonesia.

Soft power vis a vis hard power

Posisi *soft power* atas *hard power* tidaklah bersifat hierarkis yang satu lebih penting dari yang lain. Namun posisi yang satu atas yang lain lebih bersifat simultan, dalam setting tata dunia sebelum perang dingin usai maka *hard power* lebih relevan untuk dipakai, demikian pula dalam konteks pertahanan keamanan maka kekuatan militer, teknologi senjata dan angkatan perang yang banyak serta kecerdikan berstrategi dalam medan tempur menjadi pilihan utama, namun tidak dalam konteks HAM, lingkungan, ekonomi, perang opini, menghimpun kekuatan dalam aneka forum internasional, diplomasi maka dalam konteks ini *soft power* lebih tepat untuk digunakan.

Membangun soft power

Paling tidak ada tiga hal yang bisa dilakukan guna mengkonstruksi *soft power*, yaitu (1) menguatkan komitmen terhadap nilai-nilai universal, seperti penghormatan terhadap HAM, supremasi hukum, pemberantasan korupsi, demokrasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian alam serta nilai-nilai universal lainnya yang diakui dan dijunjung tinggi bangsa-bangsa se dunia. (2) menjaga, memelihara dan terus

produktif terhadap aneka budaya, serta nilai-nilai bangsa sembari cerdas dalam mengelola beragam perbedaan suku, ras, agama; serta yang ke (3) memiliki akses yang kuat, terhadap teknologi telekomunikasi, mampu menciptakan serta memiliki ketangguhan dalam meng *counter* (membendung) dan menyaring dengan bijak aneka informasi, ideologi, pengaruh serta berbagai nilai negatif dari luar.

Dengan bangunan *soft power* yang kokoh dan pertahanan keamanan yang tangguh, Indonesia yang memiliki modalitas prestasi demokrasi yang cemerlang, kegigihan membrantas korupsi, kemajemukan kultur, etnis dan ideologi lokal sangat berpotensi memainkan peran kunci dalam tata kelola hubungan internasional masa depan. Namun harapan ini sangat erat kaitannya dengan kemauan kita untuk menjadi bangsa pembelajar seperti Malaysia yang sejak awal berdirinya bahkan hingga kini selalu meniru dan belajar dari saudara tuanya, Indonesia; seperti Jepang yang sejak dulu gencar mengirimkan generasi mudanya ke Eropa dan Amerika untuk menimba ilmu; seperti Cina yang jago membuat produk tiruan, apakah Indonesia belajar?

Semarang, 4 Januari 2010

BAB 19

HUBUNGAN ISLAM-BARAT, MENANTI PERAN KUNCI INDONESIA

Presiden SBY diminta menunjukkan sikap tegasnya atas aksi Israel terhadap rakyat Palestina. Hal itu termasuk soal serangan terhadap kapal Mavi Marmara yang akan menunaikan misi kemanusiaan ke jalur Gaza, Palestina. (Kompas.com, Senin, 31 Mei 2010). Peran apa yang dapat dimanakan Indonesia terkait dengan persetujuan Israel-Palestina atau dalam konteks yang lebih luas persetujuan Islam dan Barat? Kenapa selama ini pemerintah RI nampak kurang—bila enggan untuk mengatakan tidak—memainkan peran mediator antara Barat dan Islam? Tulisan ini berupaya memberikan sejumlah analisis.

Pada saat invasi ke Afganistan (2001) Presiden George W Bush dan Perdana Menteri Tony Blair menegaskan bahwa kelompok terorisme tidak mewakili tradisi Islam yang kaya dan kompleks, mereka menyempatkan diri mengunjungi masjid-masjid untuk meyakinkan umat Islam bahwa perang yang mereka korbakan di Afganistan bukanlah untuk melawan Islam, dan menekankan fakta bahwa Islam tetap merupakan Agama damai. (Amstrong, Karen: 2007, hal 10). Peristiwa yang mirip dilakukan Barack Obama di masa-masa awalnya menjabat Presiden. Ia berkunjung dan berpidato di Universitas Al Azhar, di Kairo, Mesir, yang menggelorakan harapan di benak masyarakat dunia akan hubungan harmonis Islam-Barat.

Kedua peristiwa tersebut sangat menarik karena dalam konteks persetujuan hubungan Islam-Barat yang sedang memanas para pemimpin dunia Barat justru membuka harapan hubungan harmonis. Namun ada yang dilupakan banyak orang dalam memahami hubungan antar bangsa, yakni aneka pidato dan pernyataan-pernyataan resmi para pejabat tidak bisa dijadikan indikator sikap bangsa-bangsa tersebut, sebaliknya bermacam tindakan-tindakan konkrit yang berkesinambungan dan kerap kali berkuat pada perolehan ekonomi dan politik itulah hakikat hubungan antar bangsa. Dengan pola hubungan seperti itu maka aneka upaya yang dilakukan kedua belah pihak untuk mendesain hubungan harmonis harus melalui jalan terjal berliku.

Dalam upaya menemukan format kreatif hubungan Islam-Barat yang lebih beradab, Indonesia sangat berpotensi memerankan diri sebagai mediator, sedikitnya karena tiga alasan, (1) Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia; (2) muslim mayoritas, dan (3) memiliki prestasi gemilang dalam demokrasi.

Pertama, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar ke 4 di dunia. Kendati sebagaimana ditegaskan Rusman Heriawan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dalam acara konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (29/4/2010) angka pasti jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2010 baru akan diketahui setelah hasil sensus penduduk 2010 mulai 1-31 Mei 2010, namun BPS memperkirakan jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2010 akan mencapai 235 juta jiwa. Angka ini diperkirakan akan menempatkan Indonesia masih menjadi negara

berpenduduk terbesar keempat di dunia, demikian laporan dari portal nasional RI, [www. indonesia. go. id](http://www.indonesia.go.id).

Angka yang besar mencitrakan di mata dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, sehingga akan membuat setiap orang mudah menyimpulkan: sangat wajar bila Indonesia memerankan peran besar. Mustahil peran serupa bisa dimainkan oleh negara seperti Singapura atau Brunei yang penduduknya sangat sedikit.

Kedua, muslim menjadi mayoritas di Indonesia. Lebih dari 80 persen penduduk Indonesia adalah muslim. Hal ini mengindikasikan, (1) terdapat ikatan solidaritas seagama di antara muslim di Indonesia dengan muslim lain di seluruh dunia, termasuk di palestina. Tanda yang paling kasat mata adalah munculnya berbagai demonstrasi yang merata tersebar di seantero nusantara, hampir setiap peristiwa memilukan terjadi terhadap muslim, lihat bagaimana berbagai demonstrasi digelorakan pada saat invasi AS ke Afganistan (2001) dan Irak (2003), termasuk demonstrasi atas serangan Israel terhadap kapal Mavi Marmara (31 Mei 2010), sehingga sangat wajar dan sudah seharusnya bila indikasi ke (2) muncul, yaitu aneka kebijakan politik Pemerintah RI akan dipengaruhi oleh faktor mayoritas muslim.

Muslim mayoritas nampaknya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap peran yang seharusnya dilakukan Pemerintah RI sebagai agen mediasi dialog Islam-Barat, terlebih lagi, *ketiga*, kemampuan negeri ini dalam mengkolaborasikan Islam dengan demokrasi. Dua gagasan tersebut kontradiktif secara konseptual, yang satu nilai-nilai luhur religius dari timur sedang yang lain gagasan sekuler dari

barat, menariknya Bangsa Indonesia mampu mempertemukan dua kutub ekstrem tersebut.

Pada satu sisi muslim di Indonesia memiliki solidaritas seagama yang kuat dengan dunia Islam secara umum, sementara di sisi lain prestasi demokrasi di Indonesia membuat negara-negara barat merasa diterima setidaknya secara ideologi di nusantara, inilah potensi luar biasa yang dimiliki Republik kita, untuk memerankan fungsi mediasi dalam konteks perseteruan Islam-Barat.

"Batu sandungan"

Kendati memiliki aneka potensi untuk dapat memainkan peran mediator, namun bukan berarti tidak ada halangan sama sekali. Ada sedikitnya dua faktor penghambat yang berpotensi menjadikan Bangsa Indonesia tidak menyadari akan potensi peran besarnya ini, yaitu:

Pertama, ketergantungan terhadap Amerika. Jamak diketahui pemerintah RI memiliki ketergantungan yang cukup kuat dengan Paman Sam. Menjelang pilpres 2009 kemarin, SBY yang kala itu masih berpredikat sebagai kandidat, telah dinobatkan majalah TIME sebagai salah satu dari 100 orang berpengaruh di dunia. Terlepas dari aneka pemaknaan yang muncul, nampaknya disadari atau tidak sulit disimpulkan: hal tersebut bukan instrumen kemenangan SBY, sehingga nampaknya ada harga yang harus dibayar kepada Amerika saat SBY menjabat presiden.

Salah satu contoh kasat mata yang menunjukkan betapa Indonesia memiliki ketergantungan kepada Amerika dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya adalah

dukungan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 yang menjatuhkan sanksi atas Iran karena menolak untuk menghentikan pengayaan uranium yang diduga akan digunakan untuk pembuatan senjata nuklir, sekali lagi masih pada tahap dugaan dan belum terbukti. Peristiwa tersebut jelas mengingkari amanat republik Indonesia yang mayoritas muslim dan tidak terlampau bodoh untuk bisa dibohongi dengan aneka propaganda Amerika untuk mendiskreditkan Iran.

Kedua, inferioritas terhadap barat. Siapapun pejabat di negeri ini akan menolak bila dianggap memiliki sifat inferior terhadap barat, namun sulit dipungkiri, bermacam negosiasi yang telah dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara barat tercium karakter inferior. Barangkali satu dari sedikit orang yang "urat saraf takutnya" terhadap barat sudah putus adalah Soekarno, namun sedikit sekali anak bangsa yang menuruni jiwa merdeka beliau. Sebuah permisalan dapat ditunjuk betapa inferiornya para pemimpin bangsa ini terlihat dari cara penyambutan yang sangat berlebihan terhadap dua kali rencana kunjungan presiden Amerika. Pertama ketika George W Bush berencana berkunjung ke Indonesia (2006), Istana Bogor sebagai salah satu simbol tradisi leluhur harus diobrak abrik untuk disiapkan sebagai landasan helikopter Bush, belum lagi aneka tetek bengek lainnya termasuk kehadiran tentara Amerika jauh-jauh hari sebelumnya untuk memastikan keamanan (lihat: Amien Rais, 2008). Yang kedua, Barack Obama, sambutan begitu nampak berlebihan, patung Obama dengan nilai yang sangat mahal dibuat di sekolah bekas Obama, sementara banyak pahlawan nasional yang

jangan mendapatkan penghargaan dari pemerintah, bahkan di masa tuanya pun mereka harus berjuang untuk hidup dan mendapatkan rumah yang layak. Inilah realita inferioritas para pemimpin kita di hadapan Amerika. Dua hal tersebut diyakini telah menjadikan aneka potensi untuk dapat menjadi mediator dialog Islam Barat tak kunjung dapat diwujudkan.

Semarang, 1 Juni 2010

BAGIAN KE ENAM EKONOMI

BAB 20

60 TAHUN INDONESIA-CINA

Dalam Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Singapura, November 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Cina Hu Jianto sepakat meperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina. Keduanya menyebut 2010 sebagai tahun persahabatan Indonesia-Cina (Tempo, 26 April-2 Mei 2010, hal 69). Bagi Indonesia menjalin hubungan dengan Cina yang sedang mengalami perkembangan ekonomi luar biasa merupakan pekerjaan yang bukan tanpa manfaat, namun demikian sejumlah pertanyaan patut diajukan: sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menyambut peluang dari *Sang Naga*?, apa dan dari mana sajakah aneka kemungkinan masalah muncul? Serta bagaimana seyogyanya merespon Cina?. Tulisan ini bermaksud menyuguhkan sejumlah analisis.

Berdasarkan data IMF tahun 2008, 10 negara dengan perekonomian terbesar adalah AS, Jepang, China, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Rusia, Spanyol dan Brasil. Bahkan secara lebih radikal Konsultan bisnis terkemuka dunia, Price Waterhouse Coopers (PWC) memproyeksikan 10 besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030 adalah China, dan diikuti secara berturut-turut oleh AS, India, Jepang, Brasil, Rusia, Jerman, Meksiko, Prancis dan Inggris (suaramerdeka.com, 22/1/2010). Kini adalah era kebangkitan Cina, menjalin hubungan baik sembari berguru pada Cina nampaknya menjadi alternatif kebijakan rasional

yang akan dipilih bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pola hubungan internasional, terutama pasca perang dingin (1989) memiliki sedikitnya dua ciri unik yang membedakannya dengan era perang dingin, *pertama* berbeda dengan masa perang dingin yang para pelakunya didominasi oleh Negara, maka di era pasca perang dingin muncul beragam pelaku yang turut meramaikan kancah internasional di samping Negara. Aktor-aktor bukan Negara (*Non state actor*) seperti kelompok kepentingan, perusahaan-perusahaan transnasional maupun individu melakukan aktifitas di dalam dan melintasi batas negara (*transnasional*).

Kedua, pada ranah isu, era sebelum perang dingin didominasi oleh isu keamanan, kekuatan suatu negara (*state power*) dimaknai sebagai kemampuan militer, kepentingan nasional (*national interest*) dipahami hanya dari sisi keamanan negara (*state security*), sembari mengabaikan keamanan manusia (*Human Security*), lingkungan, pangan, kesehatan, terorisme serta aneka isu lainnya yang menjadi tren di era pasca perang dingin.

Dalam konteks ini, maka dapat dipetakan sedikitnya terdapat dua sumber potensi masalah—atau bahkan masalah—dalam hubungan Indonesia-Cina, *pertama* masalah atau potensi masalah yang berasal dari tingkat negara (*state*), dalam hal ini bisa berasal dari pemerintah Indonesia maupun Cina, dan *kedua* berasal dari para pelaku ekonomi privat (*non-state actors*) baik domestik maupun para pemain yang berasal dari Cina.

Masalah pada tingkat negara

Pada tingkat negara, sedikitnya ada dua potensi kesulitan yang menghadang Indonesia dalam menjalin kemitraan dengan negeri tirai bambu, *pertama*, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki Konsulat Jenderal di Shanghai. Padahal Shanghai kini menjelma menjadi salah satu pusat keuangan dunia (Tempo, 26 April-2 Mei 2010, hal:70). Ini tentu memperhatikan pada saat Indonesia berkomitmen mempererat hubungan dengan Cina, Pemerintah justru kurang memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan bagi para pelaku ekonomi untuk dapat berkompetisi secara lebihimbang. Hal ini mengindikasikan betapa Pemerintah RI kurang—bila enggan mengatakan tidak—memiliki basis analisis yang kuat untuk memetakan potensi ekonomi Cina. Lemahnya informasi tentang aneka kekuatan perekonomian di Cina dan lambannya membuat pemetaan akan berimplikasi pada kegagalan membuat *road map* dalam mensiasati perdagangan dengan Cina, yang akan diakhiri dengan kekalahan dalam perang dagang.

Kedua, gara-gara tumpang tindih birokrasi, ratusan nota kesepahaman Indonesia-Cina yang sudah diteken jalan ditempat. Diantaranya proyek rel kereta api sepanjang 300 kilometer di Kalimantan Tengah senilai US\$ 1 miliar dan pembangunan pabrik baja di Batulicin, Kalimantan Selatan. Bila situasi ini berlanjut bukan mustahil Cina meninggalkan Indonesia. Birokrasi yang rumit bisa menjadikan Indonesia kehilangan kesempatan (Tempo, 26 April-2 Mei 2010, Hal: 70).

Jamak diketahui birokrasi di Indonesia menjadi momok tersendiri bagi para pelaku bisnis. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya birokrasi di negeri ini, di samping birokrasi yang panjang, rumit dan berbelit. Nampaknya pemerintah harus memangkas birokrasi menjadi lebih ramping sehingga menjadi lebih efektif dan efisien selain juga menciptakan sistem pengawasan yang ketat untuk menghindari aneka praktek KKN.

Di tingkat para pelaku ekonomi

Sulit dipungkiri, selalu terdapat celah kurang sedap pada setiap sesuatu yang diyakini sempurna, tak terkecuali Cina. Terdapat aneka barang-barang dengan penampilan menarik seperti ponsel, televisi, setrika, aneka perkakas rumah tangga, kendaraan bermotor dan masih banyak lainnya dengan satu ciri yang sama, yaitu: murah. Hal ini tentu nampak sangat menggiurkan konsumen, namun sudah menjadi rahasia umum, aneka barang-barang memikat tersebut adalah barang-barang aspal, alias asli tapi palsu.

Sebut saja misalnya Haff Comm, sebuah perusahaan Cina pembuat Blockberry, dengan mengganti huruf "a" pada kata Blackberry, ponsel yang mirip Blackberry nampak sekilas seperti kembarannya, yang menarik lagi dan membuat konsumen tergiur gila adalah harganya yang berkisar sepertiga dari harga Blackberry.

Di Shenzhen, kota industri di Provinsi Guagdong, Cina, ada ribuan perusahaan seperti Haff Comm yang membuat ribuan merk ponsel aspal. Sebagian besar perusahaan ini kelas

industri rumah tangga dengan jumlah karyawan hanya belasan orang (Tempo, 26 April-2 Mei 2010, hal: 78). Membanjirnya perusahaan-perusahaan sejenis tentu akan sangat menyulitkan para pelaku ekonomi di tingkat domestik Indonesia. Tanpa produk-produk aspal asal Cina saja aneka produk lokal sudah sangat kuwalahan dengan membanjirnya barang-barang Cina, terlebih lagi dengan keberadaan produk-produk aspal Cina, bukankah tambah meremukkan pasar domestik kita?.

Menghadang arus Cina

Baru sekitar 10 tahun Nusantara memberlakukan otonomi daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otoritas yang lebih besar dari pada sebelumnya untuk mengelola daerahnya sendiri. Sementara sebelumnya dalam tahun-tahun yang jauh lebih panjang daerah ditata, diklola dan desain dengan pola sentralisasi. Barangkali inilah yang membuat daerah menjadi gagap dan kurang luwes dalam mengelola daerahnya secara mandiri.

Hemat saya, dalam konteks merespon pasar bebas Asean-Cina maka ada sedikitnya 3 strategi yang bisa dilakukan: *pertama*, secara bertahap Pemerintah harus mengubah pola lama diplomasi yang tersentralisasi. Sudah menjadi kelaziman yang rasanya sulit diubah, bahwa hubungan, diplomasi dan negosiasi antar bangsa diperankan secara mutlak oleh Pemerintah Pusat, kini saatnya konsep diplomasi ditransformasikan kedalam strategi diplomasi total (*total diplomacy*), dimana semua lini dari elemen bangsa ini memiliki tanggung jawab membawa citra bangsanya dalam

berhubungan dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia harus belajar menjadi bangsa besar yang dengan cerdas dan pandai mencitrakan diri di mata bangsa lain.

Kedua, mentransformasikan nasionalisme ke dalam dimensi ekonomi, konon ceritanya orang Jepang, ketika mereka berada di luar negeri, mereka sebisa mungkin tetap akan menggunakan produk dan jasa bangsanya sendiri. Dalam memilih hotel, membeli aneka barang-barang, serta kebutuhan konsumtif lain, produk Jepang akan dipilih. Ini berbeda dengan kebanyakan orang Indonesia yang jangankan bila berada di luar negeri, berada di tanah air saja masih ingin dan bangga menggunakan produk asing.

Ketiga, belajar menjadi bangsa pembelajar. Cina, Jepang dan Malaysia mungkin contoh negara-negara Asia yang pandai meniru. Cina terkenal dengan produk tiruannya dan siapa yang menyangkal kemampuannya dalam meniru aneka produk-produk terkenal. Di awal kebangkitannya setelah dibom oleh sekutu, Jepang dengan sangat beringas dan ambisius mengirimkan para pemudanya ke Amerika dan Eropa, dan kini Jepang menjadi kekuatan ekonomi dunia. Permisalan lain yang dekat adalah Malaysia yang memiliki kebiasaan serba meniru Indonesia, dari mulai lirik lagu kebangsaan, hingga aneka kebudayaan karena ingin menjadi bangsa besar. Rasanya tiga resep tersebut akan membawa perubahan radikal kemampuan berkompetisi bangsa ini dalam berhadapan dengan Cina, total diplomasi, nasionalisme ekonomi dan menjadi bangsa pembelajar.

Wawasan, 6 Mei 2010

BAB 21

INDONESIA DAN APEC 2013

Tahun depan Indonesia dipercaya mengemban tugas sebagai tuan rumah sekaligus ketua forum kerjasama ekonomi Asia Pasifik (*Asia Pasific Economic Cooperations-APEC*) 2013. Kesuksesan APEC *summit* di Bogor yang menghasilkan *Bogor Goals* 19 tahun silam menjadi catatan penting bagi anggota APEC lainnya untuk mempercayai kepemimpinan Indonesia di tahun depan. APEC *summit* di Bali tentu memiliki konteks yang berbeda dengan acara serupa di Bogor kelak, sehingga pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam mengetuai forum kerjasama ekonomi kawasan ini tak ayal harus mengacu pada konteks kekinian. Bagaimana persebaran kekuatan ekonomi politik dalam APEC 2013 dan apa kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan Indonesia?

Di masa-masa awal berdirinya, struktur kekuatan ekonomi politik di dalam APEC berpola hierarkis dengan Amerika dan Jepang sebagai kekuatan inti, sementara anggota lain seperti Negara-negara di Asia Tenggara, Peru, Papua New Guinea, Taiwan, Korea, Meksiko, Brazil serta negara-negara *late comers* lainnya sebagai negara-negara pinggir yang memiliki ketergantungan ekonomi dan teknologi kepada negara-negara inti. Perusahaan-perusahaan otomotif Jepang misalnya yang menaruh anak-anak perusahaannya di negara-negara Asia Tenggara menciptakan ketergantungan teknologi dan ekonomi di kawasan tersebut pada Jepang.

Ada sejumlah perubahan peta kekuatan ekonomi politik di dalam APEC modern. *Pertama*, selain ekonomi inti

terdahulu yang masih relatif mapan, telah muncul kekuatan-kekuatan ekonomi baru di kawasan ini. Tiga Negara BRICS yaitu Brazil, Rusia dan Cina yang diyakini oleh Jim O'Neill (*Chairman, Goldman Sachs Asset Management*) sebagai calon kekuatan ekonomi global berada di APEC. *Kedua*, mengendornya kekuatan ekonomi lama, Amerika, yang diawali dengan gagal bayar kredit perumahan Lehman Brothers perusahaan properti raksasa di Amerika hingga pengaruhnya terhadap bank-bank di tingkat domestik Amerika dan perekonomian global. Kesulitan Amerika untuk bangkit dari situasi ekonomi tersebut memperkuat dugaan akan terjadi pergeseran kekuatan ekonomi politik global dan secara lebih spesifik, di dalam tubuh APEC.

Kesenjangan antara Negara-negara BRICS di Asia Pasifik dengan Amerika dan Jepang memang semakin menipis, namun kesenjangan mereka dengan anggota lainnya relatif bertahan, sehingga, kendati pergeseran kekuatan terjadi di dalam APEC, namun formasi baru tersebut masih mempertahankan pola lama, heirarkis.

Perubahan dan kesinambungan distribusi kekuatan itu, hemat saya, menjadi pijakan penting bagi Indonesia untuk menentukan pilihan langkah yang akan diambil guna mengetuai forum kerjasama yang memiliki pengaruh di tingkat global itu. Adapun sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan adalah *pertama*, di tingkat domestik, Indonesia berkepentingan menggunakan APEC sebagai instrument untuk mendongkrak perekonomian dalam negeri. Dalam konteks ini maka sikap Indonesia terhadap APEC harus diparalelkan dengan kebijakan dalam negeri. Kesepakatan-

kesepakatan yang mengacu pada liberalisasi perdagangan seyogyanya dibarengi dengan upaya cerdas untuk mendorong partisipasi para pelaku ekonomi di tingkat domestik sembari memberikan perhatian khusus terutama pada lapisan masyarakat yang terabaikan atau kurang diuntungkan oleh kerangka kerjasama ekonomi APEC.

Kedua, di tingkat regional APEC, Indonesia sebagai salah satu pendiri forum kerjasama ekonomi kawasan tersebut dan senior bagi Negara-negara Asia harus menyadari kesenjangan ekonomi yang cukup dalam di antara Negara-negara anggota. Amerika, Jepang, dan para pendatang baru seperti Brazil, Rusia dan Cina di satu sisi dengan Negara-negara ber GDP menengah ke bawah di sisi lainnya. Dalam konteks ini Indonesia dituntut mampu memerankan diri sebagai "moderator" yang mampu mencegah kepentingan Negara-negara *late comers* terabaikan.

Ketiga, di tingkat global, Indonesia sebagai negara *late comers* berkepentingan untuk mengkonsolidasikan rekan-rekannya yang berada di selatan dan berdialog secaraimbang dan berdaulat berhadapan dengan barat yang diwakili Amerika dan Eropa (Mas'ood, M., 2008). Dalam level global konsolidasi yang semakin solid di antara Negara-negara APEC dapat meningkatkan nilai tawar Amerika dalam menghadapi rivalnya, Eropa. Dalam konteks ini maka kelihaihan Indonesia dalam bermain dengan mengkondisikan kekuatan-kekuatan di tingkat APEC dapat memperkuat posisi Indonesia sendiri ketika berhadapan dengan Amerika.

Semarang, 9 Desember 2012

BAB 22

INDONESIA PEMIMPIN ASEAN

Tahun depan giliran Indonesia menerima estafet kepemimpinan ASEAN. Sebagai salah satu pendiri organisasi regional Asia Tenggara (Asteng), Indonesia diharapkan mampu berperan lebih dalam menahkodai ASEAN. Kendati tidak mudah bagi Indonesia—dengan barjibun beban permasalahan domestik dan intermestiknya—menjalankan amanat tersebut, bukan tidak mungkin beragam peluang justru dapat dimanfaatkan oleh “negeri Sukarno” dengan posisinya sebagai pemimpin bangsa-bangsa di Asteng.

Walaupun tidak berprestasi memberi *road map* bagi kepemimpinan Indonesia kelak, tulisan ini setidaknya hendak menunjukkan empat dimensi inti yang dapat dijadikan cermin untuk memproyeksikan masa depan ASEAN di bawah kepemimpinan Jakarta. *Pertama*, dimensi historis, Indonesia memainkan peran kunci (*key role*) dalam membidani kelahiran ASEAN. Sukarno menjadi salah satu *foundingfather* organisasi regional ini. Di benak bangsa-bangsa Asteng Indonesia memiliki rekam jejak dan reputasi apik. Dua presiden pertama Republik ini, Sukarno dan Suharto, merupakan pemimpin yang diperhitungkan tidak hanya di tingkat regional, bahkan global.

Tidak hanya prestasinya di ASEAN, Indonesia bahkan menjadi salah satu aktor kunci (*key actor*) pada gerakan non-blok. Di saat peta politik dunia berpola bipolar dimana Amerika dan Uni Soviet menjadi dua kutub yang tarik menarik

pengaruh, Indonesia justru memimpin negara-negara di Asia dan Afrika untuk menentukan arahnya sendiri.

Reputasi yang baik di masa lampau menjadi modalitas bangsa ini untuk memainkan peran kepemimpinan di Asteng. Nampaknya para elit di Jakarta harus memiliki "kesadaran sejarah ekstra" untuk mampu meneruskan estavet kepemimpinan ASEAN. Siapa yang melupakan sejarah maka dia berdiri di atas fakum, mengutip Presiden Sukarno dalam pidatonya, Jasmerah (jangan lupakan sejarah).

Kedua, secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*) yang terdiri lebih dari 13 ribu pulau besar kecil dan terbentang disepanjang sisi selatan Asteng sehingga menjadi jalur-jalur kunci perdagangan. Cina, Jepang, Rusia, Korea dan negara-negara di Asteng sangat membutuhkan perairan nusantara sebagai jalur perdagangan. Indonesia memiliki sedikitnya empat selat kunci (Malaka, sunda, makasar, lombok). Setidaknya 50 hingga 60 ribu kapal besar kecil berlalu lalang setiap tahunnya; 25% dari total perdagangan dunia; dan 50% transportasi minyak dunia didistribusikan melalui selat-selat tersebut (Prasetyono, Edy: 2007).

Dengan empat selat yang dimilikinya Indonesia mampu mengontrol distribusi perdagangan negara-negara di sisi utaranya tersebut. Bila "kartu selat" dimainkan Indonesia maka negeri ini mampu melakukan tawar-menawar dengan posisi superior. Cina dan Jepang sebagai pemain utama ekonomi dunia akan sangat berhati-hati bila berhadapan dengan Indonesia. Belum lagi negara-negara dengan kekuatan ekonomi menengah ke bawah tentu akan menaruh hormat

kepada nusantara. Potensi geografis tersebut akan menjadi modalitas luar biasa besar bagi Indonesia dalam menahkodai ASEAN tentu bila para elit di negeri ini menyadari, mau dan mampu memberdayakannya.

Namun sebaliknya dengan potensi geografisnya itu, Indonesia juga berpeluang menjadi pecundang bila gagal mengelola. Pemerintah sangat kerepotan menjaga 13 ribu pulau yang berjajar dari sabang hingga meraoke. Pemerintah juga—sebagaimana biasanya—akan gagap berhadapan dengan diplomasi negara-negara asing, apalagi Cina dan Jepang sementara dengan Singapur dan Malaysia saja kerap kali dipermainkan.

Lihat aneka kekayaan alam dan budaya yang diserobot dan curi negara tetangga. Pasir yang diangkut kapal-kapal besar ke Singapur untuk memperluas bibir pantainya merupakan contoh kecil yang kendati disaksikan oleh para elit di Jakarta namun tetap saja berlangsung. Belum lagi aneka produk budaya yang diakuisasi negara tetangga, sungguh memilukan. Bila menjaga diri sendiri saja tidak mampu lantas bagaimana Indonesia mampu menjadi mediator aneka konflik di Asteng.

Ketiga, secara demografi, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-empat di dunia setelah Cina, India dan Amerika, dan pertama di Asteng. Salah satu faktor pendorong utama perekonomian Cina dan India adalah jumlah penduduknya yang me"raksasa", sehingga Cina dan India menjadi pangsa pasar menggairahkan bagi para pengusaha domestik maupun luar negeri. Untungnya lagi kedua negara tersebut memiliki warga negara yang pandai berdagang.

Indonesia dengan dua ratus tiga puluh lima juta lebih penduduk, sangat memungkinkan mengikuti jejak Cina dan India. Dengan potensi jumlah sumber daya manusia yang sangat besar Indonesia berpeluang memainkan peran kunci dalam percaturan perekonomian regional maupun global, para investor dari berbagai negara mengincar pangsa pasar terbesar ke-empat di dunia ini. Namun bukan tidak mungkin, buruknya metode pengelolaan SDM di negeri ini, juga berpotensi memosisikan Indonesia sebagai konsumen, korban dan objek ekonomi dunia. Tengok saja misalnya, kendati data konsentrasi pasar retail di Indonesia masih langka, namun karena operasi retail transnasional seperti Carrefour dan Giant (Hongkong) sudah beroperasi lama di negeri ini, mereka menjadi jawara pasar. Indikatornya, banyaknya produk import yang dijual di retail modern.

Menurut Natawidjaja—sebagaimana dikutip oleh Muchtar Effendi Harahap—World Bank melaporkan tidak ada supermarket manapun di dunia yang sangat bergantung pada produk import seperti Indonesia. Sekitar 60% sayur-sayuran dan buah-buahan yang dijual jaringan supermarket di negeri ini berasal dari import. Angka ini 2-3 kali lebih besar dari produk import di supermarket di Thailand, Meksiko, Cina dan Guatemala (Harahap, M. Effendi: 2010).

Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah para pemain ekonomi dunia tengah menjadikan 235 juta lebih bangsa Indonesia sebagai target pangsa pasar. Aneka barang dan produk Cina, India, Eropa, Amerika dan Jepang sudah dan akan terus menyerbu secara serentak pasar nusantara sehingga sangat sulit bagi para pengusaha domestik—apalagi

tanpa uluran tangan pemerintah—mampu bertahan dari gempuran raksasa-raksasa ekonomi dunia.

Hasil survei Global CEO Study terhadap 1.541 pemimpin perusahaan dari 33 industri di 60 negara di dunia yang dilakukan konsultan IBM global Business Service menunjukkan, hanya sekitar 49% dari 1.541 pemimpin perusahaan yang mengaku siap menghadapi tantangan bisnis yang semakin rumit. Lingkungan bisnis pada masa mendatang dinilai semakin kompleks (Kompas, 23 September 2010, hal: 17). Dalam konteks seperti ini, maka bisa dipastikan para pengusaha domestik di Indonesia akan sangat sulit bertahan dari serbuan bertubi-tubi para pesaing dari Cina dan India.

Sebagai bangsa yang telah memainkan peran penting bagi kelahiran ASEAN; memiliki seting geografis yang sangat strategis; serta memiliki penduduk terbesar ke empat di dunia dan pertama di Asteng, sejatinya Indonesia memiliki potensi untuk kembali memainkan peran utama di Asteng. Namun sebaliknya kegagalan para elit di Jakarta dalam menyadari aneka potensi tersebut justru membuka kemungkinan bangsa raksasa ini terjerat dalam masalah yang lebih rumit dan kompleks. Satu-satunya faktor penentu, bagi keberhasilan kepemimpinan Indonesia di ASEAN adalah *political will* para pemimpin negeri ini.

Semarang, 11 Oktober 2010

BAB 23

PASAR BEBAS BUKAN "HADIAH TAHUN BARU"

Pasar bebas Indonesia-Cina yang akan dibuka 1 Januari 2010, kontan membawa reaksi yang begitu keras dari berbagai kalangan. Alih-alih membawa keuntungan bagi bangsa ini, ketidak siapan para pengusaha lokal dalam menghadapi serbuan barang-barang Cina yang murah meriah, diyakini akan meluluh lantahkan perekonomian nasional.

Kepala Pusat Studi Asia Pasifik, Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih sebagaimana dikutip dalam www.tempointeraktif.com, Selasa, 22 Desember 2009, menegaskan bahwa, berdasarkan penelitian yang ia lakukan, pengusaha Indonesia yang tak mampu bersaing dengan Cina akan gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya. Pendapat senada juga disampaikan Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, menurutnya, dalam jangka pendek perdagangan ASEAN-Cina ini lebih banyak mengindikasikan kerugian dibanding keuntungan.

Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto (Golkar), Arya Bima (FPDIP) dan Nurdin Tampubolon (Hanura) tak mau ketinggalan juga mendesak pemerintah agar menunda penjadwalan Asian China Free Trade Area (ACFTA), karena diyakini tidak hanya akan memperpuruk perindustrian dalam negeri namun juga membawa efek lanjutan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran (www.tribunjabar.co.id., Kamis, 17/ 12).

Serta masih banyak lagi pernyataan-pernyataan sejalan yang muncul merespon kebijakan pemerintah itu, namun

ironisnya, kendati pesimisme dinyatakan oleh banyak kalangan namun tidak ada isyarat yang menunjukkan niatan pemerintah untuk mengundur waktu pemberlakuan kesepakatan dengan negeri tirai bambu itu, mengapa demikian? Apa yang melatar belakangi kegigihan para pembuat kebijakan untuk bersikukuh pada keputusannya? Serta apa kemungkinan terburuk yang akan dipikul seluruh warga negara ini sebagai konsekuensi dari pilihan kebijakan pemerintah? Dan apa yang yang seyogyanya dilakukan?

Indonesia di mata negara-negara industri besar merupakan pangsa pasar yang luar biasa menggiurkan. Angka dua ratus tiga puluh juta jiwa memblaknkan mata para pengusaha asing betapa Indonesia akan menjadi ladang subur yang dengan cepat akan memberikan keuntungan luar biasa besar. Celaknya lagi bangsa Indonesia rupanya berkarakter konsumtif serta gemar produk-produk asing dan gemar pula mencibir aneka produk dalam negeri.

Di sisi lain serbuan barang-barang produk asing dengan kualitas yang sebenarnya tidak lebih baik dengan produk dalam negeri, namun dengan harga murah meriah kontan mematikan para pengusaha lokal, atau setidaknya produksi barang-barang dalam negeri akan menurun drastis yang konsekuensinya Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK akan menjadi keniscayaan tak terelakkan di negeri yang kita cintai ini.

Kebijakan membuka pasar terhadap aneka produk-produk luar negeri sebenarnya sangat besar manfaatnya bagi perekonomian suatu negara, namun dengan catatan para pengusaha domestik sudah cukup kuat untuk berkompetisi,

bersaing, bertarung dengan para pengusaha dari luar negeri, namun bila kesiapan rapuh maka membuka pasar berarti menekan tombol "bom waktu" yang akan menghancurkan hingga kepingan yang paling kecil sekalipun.

Idealnya, kebijakan pasar bebas didahului dengan upaya penguatan perekonomian nasional. Aneka potensi ekonomi domestik seyogyanya memiliki dasar yang kuat sehingga beragam hasil produksinya tidak hanya mencukupi konsumsi dalam negeri namun lebih dari itu bisa diekspor ke luar negeri. Ketika perekonomian nasional sudah cukup kuat maka pasar bebas akan menjadi berkah berlimpah bagi Ibu Pertiwi. Itupun tidak mutlak sifatnya, suatu ketika bila para pengusaha domestik nampak kesulitan dalam menghadapi serbuan produk-produk asing maka aneka kebijakan pemerintah yang bersifat protektif pun harus dipilih. Prinsipnya adalah pasar bebas hanya instrumen, metode, cara, alat untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dengan enak saja dipakai atau ditinggalkan, bergantung pada apakah itu berkontribusi positif atau tidak terhadap perekonomian domestik.

Amerika sebagai negara yang sangat gencar mempromosikan pasar bebas pun tidak luput dari kebijakan proteksionis. Dulu ketika produksi mobil Jepang membanjiri pasar domestik Amerika, kebijakan proteksionis pun pernah diterapkan guna melindungi produk mobil nasionalnya, namun tidak demikian dengan Indonesia, buruknya perekonomian di Negeri ini sedikitpun tidak memunculkan rasa was-was di benak para pembuat kebijakan bangsa kita untuk memutuskan dibukanya pasar bebas Indonesia Cina di

hari pertama bulan pertama pada tahun baru nanti yang sudah tinggal hitungan jari lagi.

Mungkinkah kebijakan ini dilatar belakangi oleh ketidaktahuan para *decision maker* bangsa ini ataukah, dan semoga saja tidak, dilatar belakangi oleh ketidak pedulian mereka terhadap nasib bangsa Indonesia. Hemat saya, kebijakan pasar bebas Indonesia Cina yang akan diterapkan pada hari Jum'at 1 Januari 2010 nanti merupakan produk dari kegagalan diplomasi. Mustahil para pembuat kebijakan tidak memahami aneka konsekuensi yang akan menimpa nasib duaratus juta jiwa lebih bangsa ini bila membuka pasar domestik terhadap arus besar pasar Cina yang sudah sangat mapan.

Diplomasi merupakan salah satu instrumen politik luar negeri selain ekonomi dan perang. Bila ekonomi bisa digunakan sebagai alat politik luar negeri dengan cara mengembargo atau memberi bantuan suatu negara agar mau mengikuti kemauan si empunya *power*, kemudian perang dianggap tidak lagi populer di era global yang berkarakter saling kait terkait dengan sangat kuat antar berbagai aktor (*complex interdependency*), maka diplomasi menjadi satu-satunya kemungkinan paling rasional bagi Indonesia untuk digunakan.

Lebih dari sekedar modalitas nasional yang harus dimiliki suatu negara guna melakukan tawar menawar dengan pihak asing, harkat dan martabat bangsa juga dipertaruhkan oleh para diplomat. Kegagalan seorang diplomat dalam bernegosiasi, membaca dan memahami aneka kekuatan dan kelemahan diri dan lawan serta kreatifitasnya dalam

menciptakan aneka kemungkinan pola hubungan dengan mitra sangat menentukan bagaimana hubungan di antara negara akan dikelola.

Secara teoritik, sebagaimana di argumentasikan oleh Morgenthau, ilmuwan klasik dalam studi Hubungan Internasional, diplomat haruslah bersifat *prudence*, hati-hati, bijaksana termasuk dalam kategori *prudence* yaitu rasional. Dalam perspektif ini maka kebijakan pasar bebas bagi Indonesia yang memiliki kesiapan lemah dalam menyambut serbuan produk asing adalah kebijakan yang irrasional, alias tidak *prudence*, tidak hati-hati dan tidak bijaksana. Apalagi setelah diingatkan oleh banyak pakar betapa mahal harga yang harus dibayar oleh pilihan tersebut, maka kegigihan para *decision maker* dalam mempertahankan kebijakannya menunjukkan adanya kegagalan diplomasi dengan Cina.

Bagi Indonesia dengan kondisi perekonomian yang sulit, maka kebijakan pemerintah untuk membuka pasar merupakan kebijakan yang sangat berbahaya bagi warga negara. Aneka kemungkinan buruk yang bakal membawa dampak bombastis, di antaranya, akan ada banyak sekali perusahaan lokal yang gulung tikar, bahkan sebagaimana diprediksikan oleh Lana Soelistianingsih, bahwa dalam jangka pendek perdagangan bebas bisa membuat angka pengangguran membengkak lagi ke level di atas 9,5 % dan sekitar 700 jenis produk terpaksa hilang karena kalah bersaing oleh produk Cina (www.tempointeraktif.com, 22 Desember 2009). Keadaan ini tentu sangat mengerikan, di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit.

Selanjutnya, akan terjadi *trend* penurunan kapasitas produksi nasional yang merupakan efek dari tekanan teramat kuat dari produk-produk luar. Tak ayal perusahaan pun akan mengurangi jumlah karyawan sebanding dengan besarnya jumlah barang yang tereduksi oleh kuatnya gesekan tersebut. Lagi-lagi penganguran akan menjadi "wajah bopeng" perekonomian nasional.

Untuk ukuran Indonesia yang memiliki perekonomian yang sangat rentan sehingga mudah diombang-ambingkan oleh krisis global, maka kebijakan proteksionis harusnya menjadi prioritas negeri ini. Pemerintah tidak akan import gula, beras maupun bermacam produk dan barang-barang lainnya selama produsen domestik mampu menyediakannya, sehingga tidak lagi ditemukan petani yang miskin, pengusaha lokal yang bangkrut, pengangguran, anak putus sekolah, glandangan serta aneka keperihatinan-keperihatinan lainnya yang kerap kali membuat bulu kuduk berdiri.

Dengan kebijakan proteksi maka perekonomian Indonesia bisa dipastikan akan meningkat, sehingga nilai tawar pemerintah dalam bernegosiasipun akan naik. Dalam keadaan perekonomian yang matang inilah kemudian secara bertahap pasar mulai dibuka, itupun harus dengan cermat dan hati-hati jangan sampai pengusaha domestik *didzalimi*, bila ada indikasi itu maka pemerintah harus cepat-cepat turun tangan untuk membantu, sehingga akan terjadi hubungan simbiosis mutualisme yang harmonis antara pengusaha domestik dan pemerintah, dimana pengusaha akan menopang perekonomian nasional sementara di sisi lain pemerintah

akan memberi subsidi secara proporsional terutama kepada warga negara yang lemah secara ekonomi.

Semarang, 24 Desember 2009

BAB 24

MEMBACA PELUANG DARI JEPANG

Pemilu yang di selenggarakan pada hari minggu 30 Agustus 2009 di Jepang telah mengagetkan khalayak domestik Jepang maupun internasional, partai *incumbent*, Partai Liberal Demokrat yang berkuasa tidak kurang dari setengah abad mau tidak mau harus memberikan kekuasaan pemerintahan yang selama ini dinikmatinya, pada partai oposisi, Partai Demokratik Jepang. Kemenangan telak partai oposisi tak ayal menempatkan Yukio Hatoyama sebagai Perdana Menteri Jepang, apa implikasi bagi hubungan Indonesia-Jepang? Serta bagaimana seyogyanya Indonesia merespon?

Pada masa Perang Dunia (PD) II, Jepang merupakan Negara yang sangat agresif, konfrontatif dan suka perang. Invasi militernya merambah hampir semua Negara Asia Pasifik tak terkecuali Indonesia. Selain dikenal sebagai Negara penjajah Jepang juga terkenal dengan kekejamannya. Dengan cara-cara konfrontatif inilah Jepang menerjemahkan politik luar negeri (selanjutnya disingkat *polugri*)nya, hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 dua kota kunci di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki diluluh lantahkan oleh bom atom sekutu. Tamatlah kedigdayaan sang agresor PD II itu.

Pasca perang, Jepang baru bangkit dengan sangat menggairahkan, kendati berada di bawah bayang-bayang Amerika, namun Jepang baru tidak kehilangan energinya untuk kembali menjadi bangsa besar. Kali ini bukan lagi agresifitas militer yang nampak dari *polugri* Jepang, namun

kooperatif dan diplomasi menjadi ciri baru Negara Matahari terbit ini. Polugri Jepang pasca PD II, menunjukkan karakteristik unik, berbeda dengan sebelumnya, yaitu: (1) hubungan aliansi dengan Amerika; (2) kebijakan pertahanan yang minimalis; (3) konsentrasi pada pembangunan ekonomi yang berorientasi ekspor; dan (4) fokus geografik pada kawasan Asia Pasifik. Karakteristik terakhir sejalan dengan pernyataan Hatoyama, Perdana Menteri terpilih, sebelum pemilu kemarin, bahwa Jepang akan menjadikan Asia sebagai fokus kebijakan luar negeri Jepang.

Tidak hanya karena kawasan Asia merupakan kawasan yang dekat secara geografis namun Jepang juga berkepentingan menjadi pemimin perekonomian kawasan itu, sebagaimana dikonsepsikan oleh Kaname Akamatsu dengan istilah *flying gasse formation*, formasi angsa terbang. Jepang berniat menjadi "angsa" yang terbang pertama kali sebelum "angsa-angsa lain"—istilah untuk menyebut: Negara-negara Asia Pasifik lainnya—menyusul. Cita-citanya ini diwujudkan dengan memberikan aneka bantuan pada Negara-negara di kawasan ini, diharapkan aneka bantuan tersebut dapat memacu perekonomian mereka sehingga mampu, setidaknya, mengikuti laju perekonomian Jepang. Prestasi Jepang dalam perekonomian memang tak dapat dianggap enteng pada tahun 2005 saja ia menjadi Negara dengan standar hidup tertinggi kedua di dunia setelah Amerika, dengan GDP USD 25.800, sementara Amerika USD 35.200.

Sebagai salah satu Negara di Asia, Indonesia memiliki peluang untuk bersentuhan dengan kepentingan Jepang di kawasan ini. Aneka bantuan yang diperoleh Indonesia menjadi

indikator yang menunjukkan betapa Indonesia baik secara langsung maupun tidak akan terpengaruh dengan situasi politik Jepang. Dalam konteks ini, Indonesia dituntut berperan aktif dan menjemput bola. Sikap pasif dan menunggu bukanlah langkah yang cerdas dalam merespon aksi Jepang yang progresif terhadap kawasan ini.

Lebih dari itu, Indonesia memiliki sejarah hubungan dengan Jepang yang relatif setabil selama tidak kurang dari 50 tahun atau sejak 1958, sangat wajar jika waktu yang tidak sedikit itu telah memberikan kesan mendalam dan saling pengertian antara kedua bangsa Asia ini, sehingga bisa menjadi salah satu modalitas yang dimiliki bangsa Indonesia guna membangun kemitraan yang lebih progresif, dinamis dan tentu menguntungkan di masa depan.

Merespon Jepang

Pola hubungan internasional, terutama pasca perang dingin memiliki sedikitnya dua ciri unik yang membedakannya dengan era perang dingin, *pertama* berbeda dengan masa perang dingin yang para pelakunya didominasi oleh Negara, maka di era pasca perang dingin muncul bermacam pelaku yang turut meramaikan kancah internasional di samping Negara. Aktor-aktor bukan Negara (*Non state actor*) seperti kelompok kepentingan, perusahaan-perusahaan transnasional maupun individu melakukan aktifitas di dalam dan melintasi batas negara (*transnasional*).

Mereka menjalin kerjasama, bersinergi satu sama lain baik dengan sesama aktor bukan Negara maupun Negara. Hubungan di antara para aktor sangat kuat dan kait terkait

saling mempengaruhi satu sama lain (*complex interdependency*).

Kedua, tidak seperti pada era perang dingin yang didominasi oleh isu keamanan, pasca perang dingin bersifat multi isu, di samping isu keamanan isu-isu seperti energi, lingkungan, pangan, kemiskinan, terorisme serta aneka isu lainnya yang belum populer sebelumnya, kini menjadi santer media dan para pembuat kebijakan di dunia.

Karena munculnya aneka isu dan pelaku yang sangat bervariasi maka upaya untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia, kendati secara *de jure* menjadi tanggung jawab pemerintah namun secara *de facto* dan seyogyanya demikian menjadi beban bagi setiap elemen bangsa. Demikian dalam merespon agresifitas Jepang di Asia, maka peran pemerintah maupun masyarakat, media massa, kelompok kepentingan maupun perusahaan-perusahaan di Indonesia menjadi sangat penting. Semua unsur bangsa harus bersinergi bahu-membahu membentuk suatu diplomasi total (*total diplomacy*) dalam menghadapi aksi Jepang di Asia.

Kemampuan Indonesia dalam menarik simpati para investor Jepang selama ini tidak cukup menggembirakan, untuk bersaing dengan Thailand dan Vietnam saja Indonesia tidak cukup tangguh, para Investor Jepang lebih memilih kedua Negara Asia tersebut dari pada Indonesia. Ini mengisyaratkan betapa pekerjaan mendatangkan investor merupakan pekerjaan rumah bagi semua elemen bangsa, tidak hanya pemerintah namun masyarakat sipil, swasta, media massa maupun beragam kelompok kepentingan harus bersinergi membentuk sebuah totalitas diplomasi melalui

multi jalur, baik jalur resmi pemerintah maupun non pemerintah. Bahu membahu antar *stake holder* di Indonesia guna menciptakan pra kondisi bagi para investor Jepang harus menjadi agenda utama bangsa ini.

Jika pendorong perolehan suara Hatoyama dalam pemilu kemarin adalah turunnya kepercayaan masyarakat Jepang terhadap Taro Aso yang dianggap gagal menyelesaikan krisis ekonomi Jepang yang ditandai dengan anjloknya perekonomian Jepang hingga 15, 2 persen pada April 2009, maka faktor ekonomi akan memberikan corak khas bagi orientasi kebijakan pemerintah Hatoyama, tak terkecuali kebijakan luar negeri. Di sisi lain Indonesia merupakan pangsa pasar raksasa dengan lebih dari 200 juta penduduk dan telah menjadi mitra Jepang sejak Negara "Matahari Terbit" ini terbit dari keterpurukan pasca PD II.

Wawasan, 14 Sept 2009

BAGIAN KE TUJUH DEMOKRASI

BAB 25

IMPLIKASI POLITIK KERUNTUHAN REZIM MUBAROK

Hingga tulisan ini dibuat (4/ 2), Husni Mubarak terus bertahan dalam posisinya. Kendati penguasa Mesir itu telah menyatakan diri akan melepaskan jabatannya pada September tahun ini dan berjanji tidak akan mencalonkan diri lagi, namun tawarannya itu tidak membuat para demonstran menghentikan aksinya. Tekanan terhadap Mubarak yang berasal dari dalam negeri melalui para demonstran yang semakin membesar maupun yang bersal dari luar negeri yang nampak dari misalnya permintaan Amerika melalui Menlunya, Hilary Clinton, agar Mubarak mundur, nampaknya semakin mendesak dan mempersulit Mubarak untuk tetap bertahan pada posisinya.

Sebagai penguasa yang berkuasa lebih dari tiga dekade, dengan aneka peran pentingnya baik di tingkat domestik, regional maupun global, runtuhnya rezim Mubarak, bukan tanpa implikasi penting. Serangkaian peristiwa yang mengikuti kejatuhan rezim tersebut akan segera muncul baik dalam waktu dekat maupun lama. Tulisan ini merupakan upaya memprediksi sejumlah implikasi politik dari keruntuhan rezim Mubarak.

Prediksi politik merupakan salah satu dari tiga kerja ilmiah ilmuan politik selain deskripsi dan eksplanasi yang dianggap paling sulit dan nyaris mustahil dilakukan dalam dunia politik yang sarat dengan aneka kemungkinan perubahan dengan fluktuasi yang sangat tinggi dan tidak

dapat ditebak. Kendati demikian secara intelektual kerja prediksi merupakan upaya yang mungkin dilakukan.

Hemat penulis akan ada serangkaian perubahan penting baik di tingkat domestik, regional maupun global sebagai implikasi dari runtuhnya rezim Mubarak, yaitu: di tingkat domestik, runtuhnya rezim Mubarak akan sedikitnya membawa tiga implikasi politik, *pertama, transisi demokrasi di Mesir*. Selama ini demokrasi yang dibangun rezim Mubarak hanya sampai pada tahap prosedural tanpa menyentuh substansi sedikitpun. Demokrasi di Mesir melembaga dalam pemilihan umum dan keberadaan lembaga-lembaga seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun baik pemilu maupun sejumlah lembaga tersebut nyaris tidak memiliki fungsi apapun selain sebagai ritual dan syarat untuk menyebut Mesir sebagai negara demokrasi.

Runtuhnya rezim Mubarak kontan akan membuka kran demokrasi (dalam arti yang sesungguhnya, kepemimpinan rakyat) dan mengantarkan Mesir kepada tahap yang disebut transisi demokrasi. Di tahap ini maka kemampuan fraksi-fraksi di Mesir dalam berkonsolidasi, bersinergi dan berdampingan satu sama lain dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis akan diuji.

Kendati Mesir dikenal dengan negara yang memiliki wacana pluralitas pemikiran yang sangat baik terutama di perguruan tingginya, namun satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bangsa Mesir tidak memiliki pengalaman hidup dalam rezim demokrasi. Selama tiga puluh tahun lebih oleh rezim Mubarak bangsa Mesir tidak diberi kebebasan politik yang cukup. Kelompok oposisi dibungkam dengan alasan

stabilitas politik, media massa tidak lebih dari sekedar menjadi corong pemerintah.

Ikhwanul Muslimin di Mesir misalnya, kendati memiliki basis massa pendukung banyak namun sama seperti unsur bangsa Mesir lainnya, tidak memiliki pengalaman untuk memegang kendali kekuasaan. Dengan struktur budaya politik bentukan Mubarak selama lebih dari tiga puluh tahun, nampaknya Mesir akan melalui masa transisi demokrasi yang cukup panjang. Mengingat gerakan massa di negeri piramid tersebut sejatinya tidak muncul dari komando seorang pemimpin yang mapan secara legitimasi rakyat, namun lebih pada sebagai akumulasi dari kekesalan bangsa Mesir yang sejatinya sudah lama berlangsung dan baru terpicu oleh aksi serupa di Tunisia sebelumnya.

Situasi ini akan diperparah dengan, *kedua*, munculnya sejumlah masalah yang umum terjadi di negara-negara sedang membangun demokrasi, seperti konflik horizontal yang dapat dipastikan sarat dengan kepentingan asing, mengingat strategisnya peran Mesir dalam konstalasi politik di regional Timur Tengah maupun global. *Ketiga*, implikasi paling dekat dari konflik horizontal yaitu Mesir akan terseret ke dalam aneka permasalahan Hak Asasi Manusia hingga pada akhirnya mengundang aneka intervensi negara-negara barat.

Sementara di tingkat regional, sejumlah peristiwa akan segera menyusul. Jamak diketahui Mesir memegang peran strategis dalam konstalasi politik di Arab. Selain Mesir, melalui Mubarak, merupakan aktor kunci yang menghubungkan negara-negara Barat dengan para ditaktor di Arab, Mesir juga memainkan peran penting terutama dalam

menjaga tidak terjadinya konflik terbuka antara Israel dan negara-negara Arab. Melalui Mesir aneka kepentingan negara Barat di Israel, terutama Amerika, terjaga.

Absennya Mubarak dari konstalasi politik di level regional kontan membuka peluang besar bagi munculnya konflik terbuka Israel-Arab, yang akan segera menarik serangkaian implikasi politik tidak hanya di regional Timur Tengah namun juga di level internasional. Masih di tingkat regional, implikasi lain dari tumbangannya rezim Mubarak adalah efek domino dari gerakan massa di Mesir, yang berpotensi mempengaruhi munculnya gerakan massa serupa di negara-negara Arab bahkan di Afrika mengingat masih banyaknya negara-negara dengan kepemimpinan diktator di kedua kawasan tersebut.

Sementara di tingkat global, maka serangkain efek lanjutan pun segera menyusul. Salah satu variabel kunci yang memainkan peran global di Arab adalah Terusan Suez. Terusan ini tidak hanya menghubungkan pelabuhan Said di Laut Tengah dan Suez di Laut Merah, namun juga menjadi jalur utama perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Asia. Tidak tanggung-tanggung sedikitnya 20.348 kapal berlalu lalang melewati Terusan Suez ini setiap tahunnya membawa aneka produk perdagangan dengan volume rata-rata 710 juta ton per tahun (Kompas, 4/ 2, hal: 1). Melihat tingginya derajat vitalitas titik Terusan Suez ini maka perubahan rezim di Mesir tak pelak akan mempengaruhi perekonomian dunia.

Harga minyak dunia tak dapat disangkal juga akan mengalami kenaikan tajam, bahkan indikasi kenaikannya

sudah dapat dilihat dari misalnya harga minyak *Brent* di London yang sempat menyentuh angka 103, 37 dolar AS per barel, yang merupakan harga tertinggi sejak November 2008. Hal serupa terjadi di New York, harga minyak mentah *light sweet crude* naik menjadi 91, 65 dolar AS per barel (*ibid*, hal: 15).

Implikasi lebih jauh akan terjadi ketika pengganti Mubarak adalah orang-orang yang anti Amerika. Kendati hal ini mungkin saja terjadi namun akan kecil kemungkinannya, karena aneka rekayasa dan campur tangan Amerika tentu akan ada. Andai saja, di luar kendali Amerika, ternyata di Mesir muncul pemimpin yang anti Amerika, maka bisa dipastikan akan ada sejumlah upaya profokatif yang akan membuat Mesir tidak setabil sehingga membuka intervensi asing. Saat inilah maka terbuka aneka kemungkinan Amerika ikut campur dalam turut pembentukan pemerintah baru di Mesir.

Amerika tidak akan diam saja menyaksikan kemunculan pemimpin-pemimpin dunia Arab yang tidak dapat diajak mengkompromikan kepentingannya di Timur Tengah. Sebagai negara Industri maju kebutuhan akan sumber energi terutama minyak menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditanggihkan oleh paman sam sehingga berbagai skenario strategis akan secepatnya dilakukan Amerika di Timur Tengah terkait dengan berakhirnya rezim Mubarak.

Refleksi

Momentum perubahan politik di Mesir seharusnya memotivasi para pemimpin Arab untuk memulai sebuah

gerakan baru yang akan membawa dan mengeluarkan bangsa Arab dari kemelut konflik berkepanjangan. Penulis yakin bangsa Arab sangat sadar bahwa konflik yang selalu menyertai perjalanan sejarah bangsa Arab tidak lepas dari campur tangan bangsa asing yang berkepentingan dengan minyak. Tumbangnya rezim Mubarak harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh bangsa Arab secara umum untuk mengawal (dengan berbagai cara yang terhormat) bangsa Mesir menemukan kembali pemimpin yang berpihak pada kepentingan Mesir dan Arab.

Kegagalan bangsa Arab dan khususnya bangsa Mesir dalam membangun rezim politik baru yang lebih demokratis tidak akan membawa perubahan berarti. Bangsa Arab dan Mesir tidak akan mengalami perubahan nasib, akan terus berada dalam kubangan konflik dan perlakuan tidak adil dari pihak asing, selama tidak ada upaya sungguh-sungguh dari mereka sendiri.

Semarang, 26 Mei 2010

BAB 26

IMPLIKASI PELARANGAN *BURQA* DI PRANCIS

Parlemen Prancis menyetujui pelarangan pemakaian *burqa*, Selasa pekan lalu. Pelarangan ini, menurut pemerintah Prancis untuk menjaga nilai budaya lokal yang hampir terhapus sejak banyaknya komunitas muslim yang datang ke Prancis (majalah tempo, 25 Juli 2010, hal 137). Kebijakan tersebut dianggap sebagai diskriminasi dan melanggar hak privat seseorang untuk berkeyakinan. Apa implikasi pelarangan *burqa* di Prancis?, serta bagaimana seyogyanya upaya menstransformasikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya lokal ke dalam suatu kebijakan dengan tetap menjaga privasi warga negara?, tulisan ini menyuguhkan sejumlah analisis.

Ada sedikitnya dua implikasi pelarangan *burqa* di Prancis. *Pertama*, implikasi di tingkat domestik, Prancis; dan *kedua*, implikasi di tingkat internasional. Pada tingkat domestik, sejumlah kemungkinan bisa terjadi. *Pertama*, pelarangan *burqa* bagi muslim Prancis bukan mustahil akan mereduksi legitimasi pemerintah Prancis. Bila pemerintah menggunakan kepentingan ideologi dan bukan kepentingan warga negara dalam memproduksi kebijakannya maka alih-alih menghasilkan manfaat dan semakin kuatnya legitimasi pemerintah, kebijakan tersebut justru menyuburkan ketidaksukaan warga terhadap pemerintah. Kebijakan tidak populer pemerintah Prancis akan menjadi "bom waktu" yang akan meluluh lantahkan legitimasi pemerintah.

Kedua, masih di tingkat domestik, kebijakan tersebut juga berpotensi memunculkan konflik. Setiap kebijakan, terlebih yang bersifat ideologis, akan memecah warga negara dalam sedikitnya tiga kubu: (1) pendukung; (2) penentang; dan (3) moderat. Nampaknya bagi Prancis yang kedewasaan warga negaranya dalam berdemokrasi sudah cukup mapan, kubu moderat akan menjadi mayoritas, sehingga sangat wajar bila pemerintah berkeyakinan, mayoritas kubu moderat akan memperkecil potensi konflik. Namun hal itu tidak dapat menjamin konflik tidak akan meletus. Para ekstrimis yang berada di ke dua ujung bertentangan tidak membutuhkan jumlah yang banyak untuk mengorbarkan konflik. Bahkan ketika kedua kelompok ekstrem tersebut tidak berminat untuk berkonflik sekalipun, potensi konflik masih menganga lebar. Kelompok oposisi pemerintah berpeluang bermain dalam celah ini.

Sementara di tingkat internasional, kebijakan pelarangan *burqa* akan menghiyanati dan—karena itu—menyakiti para pejuang demokrasi. Hingga saat ini demokrasi diyakini sebagai "agama politik" paling *shahih* yang mampu menjamin kemerdekaan setiap individu. Keyakinan masyarakat global terhadap demokrasi semakin menjadi-jadi terutama pasca runtuhnya imperium Soviet (1989). Demokrasi mampu menyeberangi buasnya samudera untuk mencapai dan berjuang melawan para penguasa otoriter di pedalaman Afrika dan plosok Asia.

Sedemikian semangat masyarakat modern mempromosikan ajaran ini, sehingga akan semakin sulit penerimaan warga dunia terhadap penghianatan Prancis

terhadap nilai-nilai luhur demokrasi. Alih-alih mempromosikan ajaran demokrasi yang kini sedang berjuang hidup di negara-negara otoriter. Pelarangan *burqa* oleh Prancis justru menciderai para aktivis demokrasi yang tengah melakukan perjuangan berdarah-darah di negara-negara otoriter.

Pelarangan *burqa* juga berpotensi membuka peluang pemerintah akan menjadi target serangan teroris. Baik pada tingkat domestik maupun global potensi serangan teroris nampaknya sangat mungkin terjadi. Bersikap kooperatif terhadap aneka produk budaya yang sangat heterogen nampaknya jauh lebih bisa menutup aneka kemungkinan serangan teroris.

Kebijakan pelarangan *burqa* sulit diterima mengingat: *pertama*, Prancis adalah Negara sekuler yang menghargai kebebasan individu, tak terkecuali kebebasan berkeyakinan. Konstruksi ideal yang dicita-citakan masyarakat sekuler tentu memisahkan secara tegas antara urusan agama, yang dianggap sebagai urusan privat, dengan urusan publik. Agama dianggap sebagai hak pribadi yang tidak boleh diintervensi maupun mengintervensi ranah publik. Pelarangan *burqa* bagi muslim di Prancis memiliki ketidakkonsistenan dengan prinsip dasar ideologi mereka, sekuler.

Kedua, *burqa* sebagai produk kultur merupakan ekspresi keyakinan seseorang yang akan terseleksi secara alamiah oleh publik sendiri. Dengan tolak ukurnya sendiri publik akan menerima ataupun menolak suatu produk akal budi manusia. Ketika ada unsur mengancam, menyakiti, membuat tidak nyaman maka dengan sendirinya produk akal

budi itu akan beradaptasi dan berevolusi. Atau bahkan bila tidak mampu beradaptasi ia akan mati, hilang sama sekali. Ia muncul begitu saja, diterima oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari kebiasaan bagi para penggunanya.

Intervensi pemerintah untuk menghentikan aneka produk budaya yang secara alamiah bermunculan merupakan upaya yang samasekali bertentangan dengan prinsip demokrasi. Negara menjadi instrumen pengendali publik yang akan seenaknya saja melakukan apapun yang dimau para pemegang otoritasnya. Pada keadaan ini negara tidak lagi menjalankan fungsi pelindung hak-hak privat, fungsi yang seharusnya diemban oleh negara demokrasi.

Melindungi budaya lokal

Kendati pemerintah Prancis hanya bermaksud melindungi budaya lokal dari semakin membanjirnya para imigran muslim ke negeri tersebut, aneka kebijakan pemerintah seyogyanya tidak mengandung unsur kontradiktif. Pemerintah Prancis seharusnya mempertimbangkan berbagai kemungkinan bawaan atas kebijakan yang masih bersifat debatablel dan beresiko memunculkan konflik.

Hemat saya seyogyanya pemerintah Prancis tetap konsisten kepada nilai-nilai hak asasi manusia, dengan tetap menjadikan hak privat setiap warga negaranya sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintah Prancis. Bila hal ini dilakukan maka pemerintah akan memperoleh legitimasi kuat dari warga negara. Nampaknya Prancis akan aman dengan kebijakan yang bumi dan berorientasi pada kepentingan warga negara. Heterogenitas masyarakat Prancis

akan menjadi harmoni yang apik, dengan mengenyahkan sejauh mungkin campur tangan pemerintah dari urusan privat.

Semarang, 26 Juli 2010

BAB 27

FAKTOR INTERNASIONAL KEBEKUAN DEMOKRASI BURMA

Pemilu di Burma dipandang sekeptis oleh banyak kalangan. Pengabaian Junta terhadap tekanan masyarakat internasional untuk membebaskan Aung San Suu Kyi menjadi indikasi betapa rezim penguasa tidak memiliki itikad baik terhadap demokrasi. Sikap Junta yang sangat tidak populer sulit diterima secara akal sehat. Pada saat demokrasi dan hak asasi manusia menjadi acuan moralitas, Junta justru mengabaikannya. Apa yang mendorong Junta bersikap sangat konservatif?

Hemat penulis aneka faktor yang memproduksi sikap Junta itu tidak melulu bersumber dari dalam negeri maupun perilaku para Jenderal pemegang kendali politik Burma. Faktor-faktor di tingkat global diyakini memberikan kontribusi penting bagi keberlangsungan kekuasaan rezim Junta. Serangkaian faktor di tingkat global itu antara lain *pertama*, embargo Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara Eropa dan Amerika yang sebelumnya dimaksudkan untuk memperlemah pemerintahan otoriter di Myanmar, malah membuat rakyat semakin sulit secara ekonomi. Inilah yang kemudian justru memberikan ruang lebar bagi partai pemerintah untuk melakukan politik uang di pemilu nanti. Sehingga sanksi ekonomi trio sekawan (PBB, Amerika dan Eropa) tidak hanya tidak produktif, bahkan kontra produktif dengan—secara tidak langsung—turut menjaga dan melanggengkan kekuasaan Junta.

Pada saat yang bersamaan ada faktor *kedua*, yaitu kepentingan Cina dan India di Myanmar. Dua kekuatan ekonomi Asia itu menjadi faktor kunci lain yang semakin menyulitkan "kotak hitam" demokrasi Myanmar dibongkar. Cina tengah menjalin hubungan sangat harmonis dengan rezim Junta setidaknya sejak 1988, jauh sebelum Myanmar menjadi anggota ASEAN. Kedekatan kedua negara ini melebihi kedekatan Myanmar dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Selain senjata berat Cina yang lebih banyak ditemukan di Myanmar dari pada di negara Asia lainnya, bantuan infrastruktur negeri tirai bambu juga sudah cukup lama dinikmati Junta. Lembar gelap hubungan Beijing-Yangoon seperti gerilya melawan pasukan Komunis yang dipimpin Jenderal Than Shwe selama perang dingin; kerusuhan anti Cina; dan penyerbuan Kedubes Cina di rangon (1967) tidak menyurutkan kemauan Beijing untuk berehubungan dengan Junta. Ini menunjukkan ada kepentingan Cina yang cukup besar.

Myanmar nampak "seksi" di mata Cina tidak hanya karena Burma mengandung banyak sumber daya mineral yang belum dieksploitasi, namun juga karena Burma menjadi akses langsung jalur perdagangan Cina ke Samudera Hindia (Media Indonesia, Selasa 2 November 2010, hal 23). Di sisi lain, Burma juga menjadi bagian penting bagi ekspansi pasar Cina yang sedang gencar-gencarnya meluas ke Asia Tenggara. Setidaknya tiga kepentingan itu cukup menjadi alasan bagi Cina untuk mempertahankan bahkan memperkuat hubungannya dengan Burma.

Di sisi lain hubungan bilateral India dan Myanmar juga tak kalah mesranya, kunjungan tingkat tinggi antara kedua negara kerap kali dilakukan. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan kedua pihak, India berjanji akan terus menyediakan bantuan pembangunan kepada Myanmar, termasuk pemberian dana sebesar 60 juta dolar AS untuk membangun sebuah jalan yang menyambung Myanmar dan bagian timur laut India. Selain itu, India juga berkomitmen untuk menyediakan kredit kepada Myanmar untuk mengembangkan jalan kereta api, membangun pembangkit listrik dan pusat penataran ketrampilan masyarakat. Myanmar juga akan diberikan 10 juta dolar AS untuk mengembangkan pertanian.

Bahkan dalam kunjungan Than Shwe ke India, India menyatakan akan mempertimbangkan permintaan bantuan lainnya yang diajukan pemerintah Myanmar, misalnya membantu Myanmar mengembangkan industri teknologi informatika dan meningkatkan kerja sama telekomunikasi. Lebih jauh sebagai negara besar pengimpor minyak, India berharap meningkatkan kerja sama dengan Myanmar. India berjanji akan menanam modal 1 miliar dolar AS untuk memperluas produksi minyak dan gas alam di Myanmar.

Menarik lagi, volume perdagangan India-Myanmar, pada tahun 2009 telah mencapai 1,15 miliar dolar AS, sementara ekspor India hanya tercatat 220 juta dolar Amerika, ini artinya defisit India sangat serius (indonesian.cri.cn). Uniknya India tidak merespon dengan sungguh-sungguh, India tetap berkomitmen terhadap Myanmar. Hal ini menunjukkan betapa kepentingan India di

Myanmar sangat besar. Sedikitnya ada dua catatan dalam hal ini (1) bukan tidak mungkin India bermaksud menjadikan Myanmar salah satu basis sumber daya alam untuk keperluan industrinya, sekaligus sebagai pasar bagi barang-barang India yang mulai meramaikan pasar Asia Tenggara; dan (2) dari pada rezim demokrasi, rezim otoriter seperti Junta lebih mudah diajak kopromi. Dua hal ini nampaknya cukup beralasan mendorong India untuk melawan arus masyarakat internasional.

Sikap tidak populer Junta, pada akhirnya, nampak sulit dilepaskan dari dua faktor tersebut. (1) embargo trio sekawan yang kontra produktif; serta (2) hubungan simbiosis mutualisme antara dua raksas Asia dengan Junta. Keduanya memiliki andil kunci yang membuat proses demokrasi di Myanmar menjadi beku (*frozen democracy*).

Semarang, 4 November 2010

BAB 28

MEMAKNAI LUKA DORIT BEINISCH

Sepatu, ternyata tidak selamanya berada di kaki, kali ini benda tersebut mendarat tepat di muka seorang Ketua Mahkamah Agung Israel, Dorit Beinisch (Kompas.com, 27/1/2010). Sepatu itu mengenai kepala, hidung dan memecahkan kacamata wanita berusia 67 tahun itu. Aksi lempar sepatu bukanlah hal baru, peristiwa serupa kerap kali terjadi. Di Cambridge University pernah dua kali, yakni insiden yang menimpa Mantan Perdana Menteri Australia John Howard (6/11/2009) dan Wen Jiabao, Perdana Menteri Cina (3/2/2009).

Agaknya aksi-aksi tersebut terinspirasi oleh peristiwa serupa yang dilakukan oleh wartawan Irak, Muntazer Al Zaedi, beberapa waktu lalu yang melempar George Bush dengan sepasang sepatunya (14/12/2008). Tragedi sepatu mengingatkan kita pada malapetaka yang menimpa Berlusconi, Perdana Menteri Itali yang dilempar patung (13/12/2009). Mengapa aksi anarkis terhadap pejabat publik menjadi *trend*?, apakah ini indikasi terjadinya perubahan pola karakter demokrasi masyarakat modern? Kenapa demokrasi menjadi sedemikian anarkis? Serta fenomena sosial apa yang sebenarnya sedang terjadi terkait dengan pola hubungan elit-massa?

Pola menyampaikan pesan

Megahnya bangunan demokrasi dalam imajinasi para profesor politik dan teks-teks undang-undang tidak akan

memberikan kontribusi apapun bagi terwujudnya demokrasi dalam ranah empiris tanpa dimunculkan terlebih dahulu kultur penopangnya di masyarakat, yaitu keterbukaan, kemerdekaan, egaliter dan anti penindasan.

Melalui para wakilnya yang duduk di parlemen warga negara menyampaikan, menyalurkan, mentransformasikan keinginan, gagasan serta aspirasinya, dengan harapan yang sangat besar agar diteruskan menjadi kebijakan yang dapat menaikkan taraf kemakmuran dan kesejahteraannya. Kendati demikian ideal, gagasan tentang demokrasi dengan memposisikan warga Negara sebagai yang paling dilayani, yang paling dituruti, yang paling dimulyakan namun kerap kali demokrasi sebagai mesin politik tidak dapat diandalkan.

Penyakit birokratis: korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN dan aneka konspirasi politik untuk mencuri, menyerobot dan menguras uang rakyat bukan peristiwa yang langka terjadi di Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, Indonesia menjadi contoh apik, walaupun demokrasi sudah menjadi "agama politik" bangsa besar ini sejak lama, namun rupanya bangsa yang mendiami nusantara belum menjadi penganut "agama" yang saleh itu.

Tidak berfungsinya mesin demokrasi inilah yang menjadikan warga negara memilih jalur, media dan metode yang dianggap efektif serta mampu menyampaikan, mentransformasikan dan menangkap pesan publik kepada penguasa. Metoda unik dan kreatif seperti melempar sepatu maupun patung cenderung akan dipakai. Dalam konteks era kebebasan pers, maka cara-cara nyentrik ini diyakini sangat efektif, sedikitnya karena dua hal, (1) media massa akan

dengan cepat menyorot dan segera menjadikannya konsumsi publik, sehingga diharapkan (2) akan ada *feed back* dari publik, dengan mengoreksi, mengevaluasi, menilai *track record* sang pejabat. Serta bukan mustahil pejabat dengan "raport merah" setelah dinilai dan dievaluasi publik secara terbuka, akan serta merta kehilangan legitimasinya.

Perubahan pola

Di era keterbukaan media massa, publik memiliki sifat dinamis, kreatif dan evaluatif. Setiap isu, permasalahan, berita, atau peristiwa apapun baik yang bersifat politis maupun non politis akan dengan cepat menjadi konsumsi publik, didiskusikan secara terbuka baik melalui media masa seperti facebook, forum-forum diskusi publik maupun seminar sehingga tidak heran bila bermacam konspirasi dan aneka upaya pembohongan terhadap publik akan semakin sulit untuk dilakukan, mengingat begitu terbukanya media massa.

Ketidakmampuan birokrasi dalam mengikuti dinamika perkembangan masyarakat kontan akan menjadi "boomerang" yang menghantam dan menghancurkan legitimasinya. Terhadap karakter publik bentukan media massa terbuka, pemerintah dituntut adaptif dengan cepat dalam merespon aneka perkembangan yang terjadi, bertindak dengan berpijak pada kemauan masyarakat dan melakukan evaluasi serta perbaikan terus menerus.

Tak ayal, kegagalan pemerintah dalam mentransformasikan birokrasinya berimplikasi pada perubahan pilihan publik untuk menyampaikan aspirasi, gagasan dan kemauannya dari yang sebelumnya

menggunakan cara-cara konvensional seperti melalui wakilnya yang duduk diparlemen, menjadi cara-cara unik dan kreatif dengan melempar sepatu maupun patung seperti yang dilakukan pada Berlusconi.

Kenapa demokrasi menjadi anarkis?

Demokrasi diyakini menjadi sistem pemerintahan terbaik yang pernah ada, kendati korelasinya dengan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara masih banyak disangsikan oleh banyak kalangan, namun optimisme ke arah sana, masih sangat besar. Buktinya gelombang demokrasi terus meluas dan melintasi dalam dan luasnya samudra, hingga ke pelosok Asia dan pedalaman Afrika.

Pada saat yang sama demokrasi juga dipercaya sebagai cara yang paling beradab dan santun dalam mengelola aneka perbedaan dan konflik. Beragam metode mengatur masyarakat di luar cara demokrasi, paling tidak oleh kebanyakan orang, dianggap gagal dan secara perlahan mengantarkan publik kepada cara demokrasi sebagai pilihan.

Ketika publik menemukan pola barunya dalam mengorganisir diri dan tidak dibarengi dengan kemampuan institusi-institusinya untuk beradaptasi, maka publik akan merubah institusi-institusi tersebut, bahkan bukan mustahil dengan cara-cara anarkis sekalipun.

Hingga saat ini reformasi di Indonesia sudah berjalan lebih dari 10 tahun, namun demikian demonstrasi yang berjalan secara anarkis masih saja menghiasi perjalanan demokrasi di negeri ini. Kuatnya anarkisme dalam demonstrasi yang selama ini mengiringi perjalanan bangsa

Indonesia menjadi indikasi betapa konservatisme beroperasi sangat kuat di pemerintahan. Hingga kapan kekolotan, ketidakcerdasan dan kebingungan birokrasi dalam merespon kemauan publik akan berlangsung. Saya kira jawabannya adalah hingga pemerintah mampu berdialog secara terbuka dengan warga Negara tanpa disertai prasangka-prasangka buruk, kebencian dan upaya-upaya pembodohan publik, sehingga alternatif cara anarkis untuk menyampaikan pesan tidak lagi dipilih oleh warga Negara, karena sudah cukup puas dengan kecerdasan dan kepekaan birokrasi pemerintah dalam berinteraksi dengan warga negara.

Transformasi fundamental

Pertanyaan terakhir, fenomena sosial apa yang hakikatnya sedang terjadi, dengan munculnya aneka indikasi berupa fenomena penggunaan bermacam cara tidak lazim dalam menstransformasikan aspirasi, gagasan dan kemauan? Ada sedikitnya dua gelombang besar yang melanda dunia: globalisasi dan (diikuti) demokratisasi. Globalisasi menjadi semacam moderator bagi bermacam budaya, idologi, paradigma, keyakinan dan lain sebagainya yang bersifat lokal di seantero jagat bumi. Pertemuan beragam karakteristik entitas lokal tak selamanya berpola harmonis, konflik tidak jarang menjadi *trend* pertemuan tersebut. Tak dapat dipungkiri dalam ruang yang disebut globalisasi juga terjadi anarkisme, dimana si kuat akan mendominasi si lemah.

Dengan sedikitnya dua cara, demokrasi merambah ke seantero sudut dunia, (1) demokrasi bergerak dalam bentuk normatif melalui transformasi aneka institusi pemerintah dan

gagasan-gagasan di Negara-negara Asia dan Afrika, (2) demokrasi bergerak dalam bentuk kultur. Dalam format yang kedua demokrasi menjadi pandangan hidup dan paradigma bersama warga dunia.

Demokrasi secara kultural ditandai dengan munculnya indikator-indikator seperti: keterbukaan, egalitarian dan penghormatan terhadap HAM. Demokrasi di ranah kultural inilah yang sedianya kerap kali menjadi penopang bermacam aksi massa yang akan memporak-porandakan institusi-institusi konservatif. Lempar sepatu dan patung hingga *people power* merupakan bentuk paling kasat mata yang didorong oleh fenomena demokrasi di tingkat kultur yang semakin kuat tanpa dibarengi transformasi demokrasi di tingkat pemerintah.

Sejatinya yang sedang terjadi adalah transformasi kultur secara mendasar ke arah paradigma demokrasi. Ditingkat publik, telah terjadi pencerahan dimana masyarakat semakin sadar akan hak-haknya dan semakin memperkuat eksistensinya sekuat mungkin mempertahankan apa yang menjadi hak-haknya, sembari menegakan sitem nilai yang menjamin hak-hak tersebut melalui institusi bernama negara yang harapannya dapat diandalkan.

Semarang, 28 Januari 10

BAB 29

QUO VADIS DEMOKRASI MYANMAR?

November tahun ini pesta demokrasi di Myanmar akan dilaksanakan. Walaupun tepatnya belum ditentukan oleh pemerintah Junta, namun sinyalemen bangkitnya demokrasi di Myanmar sudah menemukan titik terang. Kendati demikian tampaknya terdapat sejumlah hambatan, baik di tingkat domestik Myanmar sendiri maupun di tingkat intermestik yang akan mempersulit gerakan demokrasi di negeri para jenderal itu.

Tulisan ini bermaksud menganalisis sejumlah faktor yang menjadi batu ganjalan bagi demokrasi di Myanmar. Sebagai sistem pemerintahan yang diyakini terbaik di seluruh permukaan planet bumi, demokrasi tak ayal diperjuangkan habis-habisan oleh para pendukungnya.

Cepatnya ajaran demokrasi tersebar di pelosok-pelosok terpencil di Afrika dan Asia menjadi indikator betapa demokrasi merupakan nilai universal yang diakui oleh setiap insan di bumi ini, kendati tentunya, tidak sedikit aral melintang menghambat perjalanan demokrasi.

Myanmar adalah salah satu contoh negara yang tidak subur untuk demokrasi. Kemenangan Liga Nasional untuk Demokrasi, partai Aung San Suu Kyi, pada Pemilu 1990 yang telah dianulir oleh para jenderal kala itu misalnya adalah bukti nyata betapa demokrasi di Burma harus berdarah-darah untuk hanya sekadar bertahan hidup.

Tidak lebih dari tiga bulan lagi pemilu akan digelar di Myanmar. Hal itu tentu menjadi harapan baru bagi demokrasi

di negeri tersebut. Namun tampaknya perjuangan demokrasi di Myanmar tidak semulus yang dibayangkan. Sejumlah faktor baik di tingkat domestik maupun internasional berpotensi untuk menghambat laju demokrasi di Burma.

Pada tingkat domestik, sedikitnya terdapat dua kendala yang berpotensi menyulitkan demokrasi untuk berkehidup di Myanmar. **Pertama**, konstitusi buatan Junta yang mensyaratkan pegawai negeri sipil secara otomatis menjadi pemilih bagi partai berkuasa, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan. Dengan poin ini saja, maka secara itung-itungan di atas kertas sudah dapat diperkirakan hasil pemilu. Delapan juta dari 20 juta penduduk Burma sudah di tangan partai berkuasa.

Tidak mudah bagi rezim yang tengah berkuasa dalam waktu yang lama untuk memberikan begitu saja kekuasaannya. Junta diyakini akan berjuang sekuat mungkin untuk tetap bertahan sebagai penguasa di Myanmar. Aneka fasilitas negara sudah bisa dipastikan menjadi instrumen bagi partai berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya.

Kedua, setidaknya terdapat 40 partai peserta pemilu di Burma. Tidak sedikit dari partai-partai tersebut berhaluan pro demokrasi, celakanya partai-partai itu belum menunjukkan indikasi untuk berkoalisi. Padahal andai saja mereka berkoalisi pun tampaknya belum bisa menandingi partai penguasa yang jauh hari sebelum pemilu sudah mengantongi 8 juta suara pegawai negeri sipil.

Keadaan tersebut diperparah dengan perpecahan yang terjadi di tubuh partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Partai Aung San Suu Kyi itu, sebelumnya diharapkan menjadi partai

penyeimbang bagi partai penguasa, namun perpecahan internal tampaknya akan semakin memperkuat posisi status quo.

Perpecahan di dalam tubuh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi diawali dari ketidaksukaan partai tersebut terhadap tidak terpenuhinya aneka syarat kondisi untuk pemilu yang adil dan bebas. Kendati demikian tidak semua anggota partai oposisi itu sepakat untuk tidak ikut pemilu.

Khin Maung Shwe, salah satu pentolan partai tersebut misalnya, justru berpendapat, inilah saatnya memainkan peran karena ada wadah untuk membangkitkan demokrasi di Burma (Tempo, 15 Agustus 2010, hal 111). Bahkan lebih jauh lagi Khin dengan empat orang rekannya membentuk partai baru, yang bernama Partai Kekuatan Nasional Demokratik yang langsung mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Langkah tersebut tentu dianggap sebagai pembelotan bagi rekan-rekannya di Liga Nasional.

Faktor internasional

Sementara konsolidasi demokrasi di tingkat domestik belum matang, aneka kesulitan yang bersumber dari tingkat internasional tidak kunjung terurai. Sedikitnya terdapat 3 kendala di tingkat internasional yang sangat merepotkan kebangkitan demokrasi di Burma.

Pertama, sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara Eropa dan Amerika yang sebelumnya dimaksudkan untuk memperlemah pemerintahan otoriter di Myanmar, justru kontra produktif. Alih-alih membuat jera pemerintah berkuasa aneka sanksi tersebut justru semakin merepotkan

rakyat. Kesulitan ekonomi yang diderita rakyat Burma akibat sanksi tersebut memberikan ruang yang lebar bagi partai pemerintah untuk melakukan politik uang; *kedua* di tingkat regional Asia Tenggara sendiri, tidak nampak indikasi kepedulian yang riil dari Negara-negara di kawasan itu untuk membantu perjuangan demokrasi Burma.

Indonesia misalnya yang merupakan negara demokrasi terbesar di ASEAN—sebagaimana diungkapkan oleh Win Tin (Anggota Komite Eksekutif Pusat Liga Nasional untuk Demokrasi) dalam wawancaranya dengan Majalah Tempo—tak bisa diharapkan untuk mendukung pemilu yang demokratis, yang (dapat) mengubah kondisi Burma menjadi lebih baik (Tempo, 15 Agustus 2010).

Masih menurut Win Tin, satu-satunya Negara tetangga Burma di Asia Tenggara yang peduli dengan demokrasi di negerinya hanyalah Filipina. Sama seperti anggotanya yang tidak memberikan respon berarti kepada kesulitan demokrasi di Burma, ASEAN sebagai organisasi resmi di kawasan itu juga tidak memberikan kontribusi berarti selain hanya aneka pernyataan kecaman yang tidak berprestasi mengubah peta kekuatan penyumbat demokrasi di negeri tersebut.

Prinsip non-interferensi ASEAN diyakini sebagai salah satu penyebab mengapa organisasi regional ini tidak memberikan respon berarti terhadap kediktatoran rezim Junta di Burma. Sikap negara-negara di Asia Tenggara yang tidak peduli dengan perjuangan demokrasi di Myanmar menjadi indikasi betapa para pemimpin di negara-negara di Asia Tenggara tidak memiliki kepentingan dengan demokrasi di Myanmar.

Hubungan antar pemerintah yang terjalin dalam ASEAN justru melahirkan prinsi non-intervensi. Prinsip non-intervensi, dalam konteks ini, patut dicurigai sebagai upaya para rezim di tingkat domestik untuk mempertahankan kekuasaannya dari intervensi asing.

Ketiga, Lebih parah lagi, India dan Cina sebagai dua raksasa ekonomi Asia justru memberikan bermacam fasilitas bagi pemerintahan Jenderal Than Shwe. Kedua negara itu tidak menunjukkan kepedulian berarti terhadap nasib demokrasi Myanmar.

Aneka bentuk bantuan ekonomi yang berasal dari kedua negara itu, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung dan rumah serta berbagai tawaran kerjasama dalam bidang teknologi seolah justru merestui kekuasaan rezim para jenderal di Myanmar.

Sikap India dan Cina yang terkesan sangat lunak tampaknya wajar bila dilihat dari sudut pandang realisme politik. Aneka produk Cina yang membanjiri Myanmar membuat pemerintah Cina berkepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan rezim Junta. Sementara India kerap kali menerima pasokan bahan mentah dari Myanmar untuk kepentingan produksi, hal itu tampaknya membuat India bersikap lunak dengan Junta.

Wawasan, 25 Agustus 2010

BAGIAN KE DELAPAN PEMBANGUNAN LOKAL

BAB 30

KOTA DALAM KOMPETISI GLOBAL

Ekonomi global kontemporer mem *bypass* peran negara sebagai aktor kunci dalam hubungan internasional, unit yang lebih kecil, kota (*city*), kini menempati tempat khusus sebagai pemain baru yang agresif dan lebih efisien. Selain birokrasi yang lebih sederhana bila dibandingkan dengan pemerintah nasional, pemerintah kota berhadapan secara langsung dengan masyarakat, sehingga dalam konteks pembangunan ekonomi dan globalisasi, kota memiliki peran yang tidak kalah penting ketimbang negara. London, Dubai, Hongkong, Sanghai, Tokyo, Saopalo, Toronto bisa ditunjuk sebagai kota-kota yang sangat sadar terhadap ekonomi global dan mampu memanfaatkannya untuk mendongkrak ekonomi lokal.

Sebagai *capital city* Semarang dapat belajar banyak dari strategi kota-kota tersebut, kendati tentu banyak yang harus diadaptasikan ke tingkat lokal, namun sejumlah prinsip umum saya yakin dapat menjadi panduan untuk meningkatkan peran kunci Semarang sebagai *capital city* dan memperkokoh *branding* nya, Semarang Pesona Asia (SPA). Pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah: apa strategi kunci kota-kota kompetitif tersebut yang dapat ditiru? Dan bagaimana mengadaptasikannya dalam konteks lokal?

Ekonomi global kontemporer telah mengkoneksikan unit-unit kecil ekonomi di seluruh dunia ke dalam jaringan besar aktivitas ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi). Semakin kecil sebuah unit atau pelaku dalam panggung

ekonomi global maka semakin efektif dan efisien gerakannya dalam berkompetisi dan bersinergi ke dalam sistem yang lebih besar itu. Negara misalnya dengan birokrasi yang sangat besar dan berjenjang sangat panjang kini tidak seefektif kota dengan birokrasinya yang lebih sederhana. Kebijakan ekonomi yang dituntut untuk cepat dalam ekonomi global tidak tepat diproduksi oleh birokrasi yang berbelit-belit.

Seting inilah yang kemudian mendorong kota-kota "tangguh" bermunculan dan berpartisipasi bahkan sangat aktif dalam turut menggerakkan perekonomian global. Dubai, Hongkong, Sanghai dan Tokyo barangkali dapat ditunjuk sebagai contoh dalam banyak kasus ini. Prestasi mereka dalam bidang ekonomi tidak dapat disangkal, sehingga layak jika serangkaian strategi yang mereka lakukan dipilih sebagai model untuk menuntun strategi pembangunan kota di negara *late commers* (pendatang baru), seperti Indonesia. Adapun sejumlah jurus ampuh mereka, di antaranya adalah:

Pertama, ekonomi berbasis partisipasi warga kota. Pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi moderen didominasi oleh cara ukur berbasis GDP (*gros domestic product*), yakni total dari produksi dalam suatu negara atau dalam hal ini adalah kota. Implikasinya adalah pertumbuhan ekonomi yang kerap dijadikan acuan penilaian keberhasilan kepemimpinan daerah dikejar para pemimpin daerah dengan mengabaikan faktor pemerataan.

Salah satu strategi paling instan untuk meningkatkan GDP yaitu dengan mengundang investor sebanyak mungkin, sehingga akumulasi modal yang terkumpul dalam suatu daerah dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi

yang maknanya berarti kesuksesan kepemimpinan, karena telah meningkatkan GDP.

Akibat paling dekat dari menggelungnya modal asing dalam suatu kota adalah konsentersasi modal dan kesenjangan ekonomi. Para pemain ekonomi lokal akan tergilas dan lumpuh. Padahal sistem ekonomi moderen memungkinkan perpindahan modal dengan sangat cepat, akibatnya ekonomi kota menjadi sangat rentan.

Dalam konteks ini para pembuat kebijakan kota hendaknya memperkuat basis ekonomi lokal bersamaan dengan kehadiran para investor dengan memberikan ruang yang luas melalui berbagai kebijakan ekonominya untuk memicu partisipasi masyarakat urban dalam menggerakkan perekonomian kota. Partisipasi agresif para pelaku ekonomi lokal akan secara alamiah megaitkan diri terhadap jaringan ekonomi yang lebih besar, sehingga kehadiran investor asing justru dilihat sebagai berkah bagi mereka karena berarti mereka berpeluang, misalnya, untuk memasok *spare part* produk mereka ketimbang menjadi buruh.

Kedua, *infrastruktur berorientasi kepentingan warga kota*. Paradigma desain kota yang kerap kali dipilih adalah berbasis kepentingan investor asing, sehingga seringkali justru penggusuran pedagang kaki lima dan perumahan warga menjadi pilihan demi menarik para pelaku ekonomi dari luar. Padahal cara ini justru malah mempersulit geliat ekonomi lokal. Demikian pula infrastruktur yang berupa regulasi biasanya juga didesain berbasis kepentingan para pemilik modal asing, yang justru kerap kali memposisikan para pelaku

ekonomi lokal berhadapan-hadapan dengan para investor dari luar.

Ceritanya tentu akan sangat berbeda sekali ketika relokasi PKL misalnya diorientasikan sebagai pelayanan terhadap para pelaku PKL itu sendiri. Kasus relokasi solo oleh Jokowi menjadi contoh apik bagaimana kebijakan pemerintah kota bersinergi dengan kepentingan bisnis lokal. *Point* penting dari bagian ini adalah menunda pertumbuhan demi pemerataan.

Ketiga, *birokrasi adalah fasilitator*. Ini mungkin asing ditelinga bangsa Indonesia karena selama ini pandangan masyarakat terhadap birokrasi dipengaruhi sangat kuat oleh perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di nusantara dan kolonialisme. Di mana pejabat pemerintah dianggap sebagai "raja" yang harus dilayani. Perspektif seperti ini ditolak sama sekali dalam budaya masyarakat demokrasi, yang menganggap pemerintah atau birokrasi adalah fasilitator atau bahkan sekedar administrator yang fungsinya adalah melayani kepentingan publik. Implikasi dari cara pandang feodal terhadap birokrasi adalah tidak efektifnya birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, sehingga dalam konteks perekonomian kota alih-alih mendorong progresifitas ekonomi, birokrasi justru menjadi musuh utama laju pertumbuhan ekonomi.

Keempat, *kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas*. Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam pembangunan ekonomi, sehingga sasaran utama kebijakan kota seharusnya adalah menjamin kesehatan dan pendidikan warga kota. Kebijakan ini bukanlah kebijakan instan yang

hasilnya dapat langsung dirasakan, sebaliknya kebijakan tersebut paralel dengan upaya jangka panjang dalam meng *up grade* perekonomian kota. Masyarakat yang sehat dan terdidik akan secara alamiah mengikatkan diri dalam rantai ekonomi yang maknanya akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi. Di sisi lain kebijakan tersebut secara politis juga akan menjadi poin penting bagi legitimasi pemerintah.

Kelima, *cerdas mensiasati investasi asing*. Desain besar dari kebijakan terhadap investasi asing adalah transfer pengetahuan dan teknologi, sehingga dalam waktu tertentu yang telah direncanakan warga lokal akan mendapatkan pengetahuan, penguasaan teknologi, bahkan memiliki teknologi itu sendiri. Hal ini tentu sangat sulit dicapai tanpa komitmen kuat dari para pembuat kebijakan dan sinergitas mereka dengan warga kota.

Keenam *city branding*, yaitu membangun image kota di benak warga kota dan dunia internasional. Desain *city branding* harus berbasis pada setidaknya 2 hal (1) potensi dan karakteristik kota; dan (2) menjadi panduan bagi masyarakat kota. *City branding* yang baik akan menarik tidak hanya investor namun juga meningkatkan industri pariwisata sehingga pada akhirnya perekonomian akan terangkat.

Ketujuh *comparative advantage* (keunggulan komparatif), yakni para pembuat kebijakan kota sudah seharusnya sangat sadar dengan aneka potensi yang terkandung di daerahnya, baik potensi SDA maupun SDM. Mereka harus bisa memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ekonomi kota dan menjadikannya sebagai basis

strategi pembangunan, termasuk didalamnya adalah strategi memilih mitra kerjasama baik di tingkat nasional maupun global.

Serangkaian strategi tersebut dapat dijadikan panduan untuk menuntun arah ekonomi kota dan mempertanggungdayakan kompetisinya dalam ekonomi global. Perbedaan konteks lokal sebagai keniscayaan yang tidak dapat dihindari tentu membutuhkan siasat-siasat khusus. Sinergitas pemerintah, masyarakat, investor, seniman, berbagai paguyuban lain dan akademisi menjadi "mantra ampuh" untuk membuat inovasi-inovasi baru pembangunan yang lebih progresif dan berorientasi keadilan dan kemakmuran warga kota.

Yogyakarta, 4 Januari 2012

BAB 31

MENDORONG PARTISIPASI LOKAL DALAM AEC

Jakarta - Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC) rencananya berlangsung mulai Desember 2015. Kalangan pengusaha menilai apabila tidak segera disiapkan, AEC dapat menjadi *lonceng kematian* bagi industri nasional. Demikian disampaikan oleh Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani dalam keterangan tertulisnya, (detikfinance, 7/4/2013). Pertanyaannya: apa yang perlu disiapkan untuk menyambut kehadiran AEC?

Asia Tenggara merupakan kawasan regional yang terdiri dari daratan luas di sebelah utaranya yang kemudian disebut Asia Tenggara daratan dan kepulauan di sisi selatan atau yang disebut Asia Tenggara kepulauan. Memiliki Pegunungan yang sangat berfariatif dengan kawasan hutan yang masih cukup luas, terutama di Kalimantan, sebagai akibat dari curah hujan yang cukup tinggi. Konsekuensi paling dekat dari seting geografis tersebut adalah beragamnya etnis, budaya dan agama penduduk yang mendiami kawasan ini. Sebagian besar penduduk di kawasan tersebut tinggal di pedesaan. Seiring dengan bergulirnya modernisasi terutama pasaca kemerdekaan penduduk desa berpindah secara bertahap ke kota. Kebanyakan didorong oleh faktor ekonomi.

Pada saat itulah terjadi transformasi besar-besaran mata pencaharian penduduk lokal, dari yang semula bergantung pada alam seperti hutan, laut, ladang dan sawah

menjadi bergantung pada perusahaan-perusahaan asing sebagai buruh dan konsumen.

Ekonomi lokal dipaksa menyesuaikan diri dengan kebutuhan para investor asing. Upah buruh yang murah, buruknya regulasi lingkungan dan birokrasi yang mudah disuap menciptakan kondisi produksi berbiaya rendah. Seting inilah yang kemudian menarik perhatian para investor asing. Kedatangan mereka kontan men dekontruksi ekonomi lokal yang telah mapan untuk waktu yang lama. Penduduk lokal yang sebelumnya menggantungkan mata pencahariannya kepada alam kini berpindah haluan. Mereka lebih tertarik menjadi karyawan pabrik.

Sementara di sisi lain aneka potensi alam mulai dieksploitasi secara masif oleh perusahaan-perusahaan asing. Parahnya lagi dalam banyak kasus kepentingan korporasi berkolaborasi dengan kepentingan elit penguasa baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam konteks ini maka penduduk lokal berada dalam posisi sangat lemah. Regulasi pemerintah yang seyogyanya diabdikan kepada masyarakat luas justru kerap kali menjadi *instrument* korporasi besar untuk mengeksploitasi aneka potensi lokal. Sementara di sisi lain respon paling umum penduduk lokal terhadap seting kebijakan tersebut adalah pasif.

Masyarakat di tingkat lokal kehilangan kemandiriannya dan menjadi sangat tergantung pada arus utama ekonomi, sosial dan budaya asing. Tahap terparah dari situasi tersebut adalah masyarakat lokal tidak menyadari kepentingannya sendiri di tengah kompetisi ekonomi politik di tingkat regional maupun global.

Mengaktifkan kesadaran lokal

Logika pembangunan berbasis pasar bebas yang menjadi arus utama pembangunan global sulit dipungkiri akan mensubordinatkan peran masyarakat lokal dalam berbagai format kerjasama liberalisasi internasional, tak terkecuali AEC. Sehingga sarannya adalah seharusnya logika pembangunan tersebut dibalik masyarakat lokal tidak diposisikan sebagai subordinat namun sebagai tumpuan utama pembangunan. Caranya, dengan mendesain aneka program baik di tingkat regional, nasional maupun global yang ditujukan untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan. Pemerintah harus menjadi *lead* dalam rantai pembangunan. Karena secara filosofi tujuan negara adalah untuk kesejahteraan warga negara, maka sudah sewajarnya bila aneka kerjasama yang dilakukan negara juga diabdikan untuk kepentingan warga negara.

Secara lebih operasional barangkali pemerintah dituntut untuk memetakan aneka potensi lokal; mensinkronkan dengan kebutuhan pasar global; dan mendampingi, membimbing serta mendorong masyarakat lokal untuk menyadari kepentingannya dan bersinergi dengan ekonomi global berbasis kepentingan lokalnya. Bila peran tersebut dilakukan secara konsisten oleh pemerintah, maka liberalisasi dalam jangka waktu tertentu akan menjadi berkah bagi masyarakat lokal.

Semarang, 12 April 2013

BAB 32

MENYADARI POTENSI LOKAL, BERSAING DI TINGKAT GLOBAL

Dalam sistem ekonomi global yang semakin terintegrasi, ekonomi lokal terhubung begitu saja dengan ekonomi global tanpa kesadaran penuh dari komunitas lokal secara kolektif (baik oleh pemerintah lokal, pelaku ekonomi lokal maupun masyarakat lokal secara umum). Implikasi paling sering terjadi adalah para pelaku di tingkat lokal hadir sebagai pemain yang kalah. Sumber daya alamnya dirampas, tenaga kerjanya digaji murah dan diposisikan sebagai konsumen utama.

Dalam seting lokal seperti ini, maka aktor paling mungkin menjadi *leader* yang akan membimbing, mengubah dan akhirnya memenangkan para pelaku ekonomi lokal adalah pemerintah lokal. Dalam menuntun arah perekonomian lokal, pemerintah lokal memiliki keunggulan dibanding pemerintah nasional: **pertama**, pemerintah lokal memiliki birokrasi yang lebih sederhana ketimbang pemerintah pusat, sehingga memungkinkannya untuk lebih efektif dan efisien dalam memproduksi kebijakan. Prinsip efektif dan efisien sejalan dengan tuntutan ekonomi global; **kedua**, pemerintah lokal lebih dekat dengan masyarakat akar rumput ketimbang pemerintah nasional sehingga memungkinkannya untuk lebih cermat dalam merespon tuntutan masyarakat akar rumput ketimbang pemerintah nasional.

Berangkat dari dua keunggulan ini maka keaktifan pemerintah lokal dalam ranah hubungan internasional menjadi sangat berarti bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Serangkaian kebijakan di tingkat lokal sudah seharusnya didesain secara terintegratif dengan berbasis kepentingan lokal.

Menguatkan solidaritas lokal.

Investasi langsung asing [*Foreign Direct Investment*] memiliki efek yang luar biasa radikal terhadap perekonomian lokal. Perusahaan-perusahaan besar memilih tempat produksi yang paling murah yakni di negara-negara selatan dan meluaskan pasar untuk aneka hasil produksinya ke negara-negara dengan taraf ekonomi tinggi, sehingga *margin* keuntungannya semakin besar.

Dengan logika seperti ini, para investor melihat kawasan Asia Tenggara sebagai gudang produksi yang menggiurkan, karena selain upah buruh yang murah, regulasi lingkungan yang buruk, para pejabatnya juga mudah disuap. Seting inilah yang membuat biaya produksi menjadi semakin murah.

Bila di hadapkan dengan kontruksi kekuasaan ekonomi-politik seperti ini, maka langkah paling rasional yang dapat dilakukan masyarakat lokal adalah menumbuhkan solidaritas lokal untuk meningkatkan nilai tawar. Langkah ini saya kira akan memosisikan masyarakat lokal menjadi aktor yang diperhitungkan. Solidaritas ini tidak selalu dimaknai sebagai perlawanan fisik, namun lebih ditekankan pada hal-

hal yang bersifat negosiasi, kerjasama dan saling melengkapi dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat lokal.

Menyadari Potensi Lokal

Beragam potensi yang tersebar di tingkat lokal, baik potensi alam, manusia, budaya hingga nilai-nilai sosial lainnya seringkali diabaikan oleh masyarakat lokal dalam bernegosiasi dan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan asing. Padahal aneka potensi tersebut dapat diberdayakan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Hal pertama yang perlu disadari adalah pentingnya kualitas SDM. Kreativitas, jiwa *entrepreneurship*, penguasaan teknologi menjadi langkah-langkah kunci bagi perbaikan lokal. *Up grading* SDM pada akhirnya akan membawa efek bombastis terhadap aneka potensi lainnya. Penambahan nilai (*added value*) terhadap aneka potensi lokal akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lokal.

Masyarakat lokal yang sadar potensi lokalnya akan peka terhadap kebutuhan investor asing sehingga mereka akan berupaya memenuhi kebutuhan para investor asing tersebut yang artinya, para investor tidak perlu lagi mengimport aneka kebutuhan bahan baku dari luar negeri karena sudah dicukupi oleh penduduk lokal. Sampai tahap ini sejatinya dengan kreativitas penduduk lokal memberikan nilai tambah pada daerahnya sehingga hal ini akan memancing investor lain untuk datang.

Contoh mudah, bila ada importir *lap top*, maka penduduk lokal bisa misalnya menyediakan berbagai produk ikutan *lap top* seperti *scree monitor*, pelindung *keyboard*, tas

lap top maupun aneka *asesoris lap top* lainnya, sehingga kehadiran *lap top* memiliki efek berantai dan meningkatkan ekonomi lokal.

Mempertegas Keunikan Lokal

Keunikan lokal sejatinya merupakan modalitas yang luar biasa bagi *up grading* di tingkat lokal. Dengan memiliki keunikan yang tegas, maka hal ini akan menyedot perhatian para pelaku ekonomi besar di luar negeri yang membutuhkan spesialisasi keunikan lokal tersebut. Tunjuk saja misalnya Jogja yang telah berhasil mempertegas keunikannya sebagai kota pariwisata terbukti mampu menarik wisatawan asing dengan *trend* pertumbuhan positif dari tahun ke tahun.

Menciptakan komunitas pemikir kreatif untuk pembangunan lokal

Pembangunan lokal yang dinamis membutuhkan *grand desain* dan upaya aplikasinya yang kreatif. Pemikir kreatif bekerja di kedua level ini. Pemerintah lokal dapat memfasilitasi terbentuknya komunitas-komunitas kreatif. Pemerintah lokal misalnya secara teknis bisa membuat sesering mungkin sayembara-sayembara terkait dengan ekonomi kreatif, desain tata kota, seni, budaya atau yang lainnya. Membuat kelompok-kelompok pemikir kreatif yang terdiri dari akademisi, peneliti, pelaku bisnis, hingga seniman. Diharapkan upaya-upaya tersebut dapat memberikan paradigma alternatif bagi pembangunan kota.

Semarang, 8 Mei 2013

BAB 33

BARA RATCHAPRASONG

Ratchaprasong, menjadi kubangan konflik berdarah di Bangkok—setidaknya hingga tulisan ini di buat—indikasi akan meredanya konflik belum nampak. Tertembaknya pemimpin garis keras Kaus Merah, Mayor Jenderal Khattiya Sawasdiphol, menjadi pemicu pembersihan kelompok pendukung bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dari kawasan Ratchaprasong yang telah mereka duduki selama dua bulan lebih (Tempo, edisi 24-30 Mei 2010, hal 124). Disinyalir krisis akan terjadi dalam waktu yang tidak sebentar. Pertanyaannya: Kenapa krisis politik di Bangkok begitu akut? Serta bagaimana seharusnya manajemen konflik Bangkok dikelola? Tulisan ini menawarkan sejumlah analisis dan resolusi.

Setidaknya terdapat dua faktor kunci yang memiliki kontribusi berarti bagi tercipta dan terpeliharanya krisis Bangkok, yaitu: (1) kuatnya intensitas konflik kepentingan para elit; dan (2) pemimpin karismatik. Keduanya menyumbang peran penting serta menyuburkan konflik di Thailand.

Konflik para elit

Pasca kudeta 2006, Thaksin Shinawatra mantan Perdana Menteri Thailand terpaksa harus hijrah ke luar negeri. Pasalnya Ia menjadi orang nomor satu yang diburu pemerintah. Ironisnya, Thaksin, kendati menjadi buron, namun masih memiliki pendukung yang jumlahnya tidak

sedikit dan sangat berharap kepeluangannya. Mereka adalah loyalis yang memiliki kesetiaan luar biasa pada Thaksin, sehingga tidak heran kendati berada di luar negeri, tidak sulit bagi si piawai sepertinya mengguncang perpolitikan di Thailand.

Lebih dari itu, alih-alih mengalami aneka kesulitan dalam pelarian di luar negeri, Thaksin justru mendapat banyak sambutan hangat dari negara-negara yang ia kunjungi. Di Bahama, Thaksin oleh Perdana Menteri Hubert Alexander Ingraham diangkat sebagai warga kehormatan dan diberi peran sebagai konsultan ekonomi, di Balavia dan Togo beliau diminta menjadi penasehat keuangan negara; di Uni Emirat kebebasan keluar masuk negara dinikmati oleh Thaksin, di Montenegro menjadi konsultan ekonomi politik, di Chad menjadi konsultan menangani persediaan air tanah, di Hong Kong ia membangun sebuah yayasan sosial, bahkan yang paling mengejutkan di Laos ia menjadi Penasehat politik dan ekonomi Perdana Menteri Hun Sen yang pada perkembangannya berimplikasi pada memanasnya hubungan Thailand-Laos. (lihat: Tempo, Edisi 9-15 November 2009, hal 115-117).

Kepiawaian dalam berdiplomasi membuatnya mudah di terima di negara lain sehingga mudah menghimpun kekuatan. Dari aneka upaya yang dilakukan Thaksin dalam pelariannya, nampak betapa ambisiya untuk kembali dan tampil dalam kancah perpolitikan Thailand masih sangat kuat. Di sisi lain, eksistensi Thaksin yang masih memegang kontrol terhadap para pendukungnya membuat Abhisit Vejjajiva gusar. Beberapa waktu silam, bahkan, demonstrasi besar

sempat menggagalkan pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN di Thailand. Tidak hanya memperburuk citra pemerintah di mata publik internasional, gagalnya pemerintah melaksanakan amanat sebagai tuan rumah dalam KTT ASEAN kala itu juga menanamkan kesan di benak negara lain betapa krisis Bangkok bukanlah masalah kecil, selain menjadi sinyal bagi Abhisit, kekuatan Thaksin masih prima dan siap kapan saja diadu dengannya. Konflik kepentingan elit dengan intensitas tinggi inilah yang menyumbang tragedi berdarah di Ratchaprasong.

Selanjutnya faktor yang memiliki kontribusi penting bagi tercipta dan terpeliharanya krisis Bangkok adalah pemimpin karismatik. Salah satu karakteristik masyarakat di Asia Tenggara adalah pola hubungan patron klien yang masih sangat kental di tingkat masyarakat. Kendati sulit dipungkiri bahwa bersamaan dengan berhembusnya angin modernisasi yang dibawa oleh globalisasi, terdapat masyarakat di dunia ketiga yang berpikiran maju, namun sulit di sangkal pula betapa pola patron klien, feodalisme dan karismatik seorang pemimpin di mata simpatisannya di, terutama, plosok negara-negara berkembang seperti di Afrika, Amerika Latin bahkan Cina, termasuk di Asia Tenggara masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap dinamika politik pada tingkat domestik, tak terkecuali di Thailand.

Mayoritas pendukung Thaksin adalah penduduk desa yang memiliki ikatan-ikatan kultur relatif kuat. Kesetiannya kepada Thaksin tak lepas dari karakteristik masyarakat mayoritas Asia Tenggara yang masih memiliki kekaguman berlebih terhadap pemimpin karismatik. Di mata para

pendukungnya, Thaksin adalah sosok pembebas yang akan membawa Thailand menuju kesejahteraan, sehingga kesulitan, hambatan serta segala upaya yang menghalangi Thaksin dimaknai sebagai bencana bagi Thailand oleh para pendukungnya.

Kepandaian Thaksin merebut hati penggemarnya di Thailand membuat mereka begitu sangat setia dan profesinya sebagai pengusaha kelas kakap membuatnya tidak terlalu sulit menyuplai dana aneka aksi untuk mempengaruhi arah politik di Thailand. Demikian kuat karisma sang mantan Perdana Menteri itu sehingga tak heran bila gelombang besar para demonstran kaus merah begitu bringas, ambisius dan seolah tak pernah kehabisan energi.

Manajemen Konflik Thailand

Hemat penulis, sedikitnya terdapat dua jalur penyelesaian konflik Thailand: (1) melalui jalur hukum dan ke (2) melalui jalur politik. Dalam konflik Thailand, maka jalur politik nampaknya jauh lebih mungkin ditempuh oleh pihak-pihak berseteru mengingat konflik tersebut melibatkan masyarakat luas. Implikasi memilih jalur pertama adalah kemenangan salah satu pihak yang tentunya akan membuat pihak lain sakit hati sehingga konflik semakin jauh dari penyelesaian. Pertanyaannya, siapa yang mungkin melakukan peran mediator melalui jalur politik?. Dalam konteks krisis Thailand hemat saya ada dua yang paling mungkin berperan, yaitu: (1) Raja Bhumibol Adulyadej atau (2) pihak asing.

Pemerintahan Thailand menganut sistem Monarki Konstitusional, yakni kekuasaan Raja dibatasi oleh undang-

undang atau dengan kata lain selain Perdana Menteri terdapat pula Raja yang berstatus sebagai simbol negara, simbol budaya, dan pemersatu bangsa Thailand. Sementara di sisi lain segala urusan harian pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri dengan bantuan para Menteri. Dalam konteks ini maka Raja yang memiliki legitimasi kultural dan memiliki wewenang intervensi, kendati bukan tidak terbatas, berpeluang untuk dapat memerankan fungsi strategis resolusi melalui jalur politik.

Kemungkinan lain, peran mediator dimainkan oleh pihak asing. Dalam hal ini maka PBB dapat memerankan fungsi tersebut, kenapa PBB bukan ASEAN? Karena, ASEAN akan dibatasi oleh prinsip non intervensi.

Keikutsertaan pihak ketiga, terlebih institusi yang berada di atas pihak-pihak yang berseteru, memiliki pengaruh yang kuat terhadap tercapainya resolusi konflik di Thailand. Kendati tentunya jalan panjang berliku pasti akan dilewati, namun setidaknya keterlibatan pihak ketiga bisa menjadi *starting point* bagi upaya resolusi.

Semarang, 26 Mei 2010

BAB 34

KRISIS LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT GLOBAL

Bencana gempa beruntut dalam satu pekan, setelah Haiti (Selasa, 12/1) yang digetarkan dengan kekuatan 7 Skala Richter (SR), Malaysia (Rabu, 13/1) dengan 5,1 SR, dan Venezuela, 5,6 SR (Jum'at, 15/1). Kendati diyakini tidak ada korban jiwa pada dua gempa yang disebut terakhir, namun fenomena bencana alam dirasa memiliki intensitas yang semakin tinggi. Di tanah air, gempa menjadi fenomena alam yang tidak lagi asing.

Nampaknya sangat sulit untuk tidak mengait-ngaitkan aneka bencana alam dengan pola perilaku eksploitatif manusia terhadap alam, dan nampaknya sulit pula untuk merespon aneka krisis lingkungan dengan tidak melibatkan seluruh umat manusia di jagad bumi ini, mengingat manusia secara umum (di manapun di seluruh permukaan bola bumi) berpotensi untuk merusak lingkungan dan menjadi korban krisis lingkungan, sehingga segala upaya guna mencari *problem solving* bagi krisis lingkungan pun harus melibatkan seluruh umat manusia di mana pun tanpa dibatasi oleh sekat-sekat teretori negara.

Kendati demikian sulit dipungkiri, betapa bermacam kejasama internasional guna merespon krisis lingkungan sering diakhiri dengan ketidakjelasan langkah kongkrit yang dilatar belakangi oleh konflik kepentingan Negara-negara besar. *Protocol kyoto* barang kali menjadi contoh *apik* dalam hal ini, betapa kerusakan lingkungan akibat panas global yang

nyata-nyata dapat dirasakan akibatnya, nampaknya tidak menarik perhatian berarti Negara-negara besar seperti Amerika untuk menurunkan produksinya. Kepentingan siapa yang sejatinya diperjuangkan, kelestarian umat manusia atau kepentingan egosentrisme sesaat? Serta bagaimana seyogyanya pendekatan terhadap aneka permasalahan lingkungan dibangun?

Manusia dan alam adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, sehingga bagaimana seharusnya pola hubungan di antara keduanya dikelola menjadi pekerjaan yang tidak pernah berakhir demi keberlangsungan dan kelestarian keduanya. Mengorbankan yang satu untuk yang lain pada akhirnya akan memusnahkan keduanya. Oleh karena itu desain pola interaksi di antara manusia dan alam haruslah berpola harmonis bukan eksploitatif.

Namun sulit disangkal betapa ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejak awal dirancang dan dibuat untuk kesejahteraan umat manusia tidak jarang memiliki efek destruksi terhadap alam yang justru berakhir pada ancaman terhadap umat manusia itu sendiri. Celakanya upaya manusia dalam menangani aneka bencana lingkungan seringkali berbasis egosentris kepentingan nasional, bisnis, kelompok masyarakat tertentu, etnis maupun yang lain sehingga permasalahan substansial yang menyangkut nasib umat manusia kerap kali terabaikan bahkan tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan bersekala mikro dan sangat pendek.

Paradigma lama umat manusia, yang menjadikan perang dan egosentris menjadi karakter utama rupanya masih menjadi arus utama dalam benak bangsa-bangsa di seluruh

permukaan planet bumi. Kita lupa betapa dunia kita sudah menjadi satu padu, tidak hanya secara fisik, yang telah terhubung oleh aneka hasil revolusi teknologi transportasi namun juga secara gagasan yang telah dihubungkan oleh bermacam produk canggih teknologi telekomunikasi dan efek digitalisasi pengetahuan.

Pembangunan yang berbasis pada Negara-bangsa (*nation-state*) harus ditransformasikan menjadi berbasis kepentingan umat manusia (*cosmopolitan interest basic*). Dengan aneka tantangan baru yang berkarakter global, yang dicirikan oleh masalah, kesulitan, tantangan yang dihadapi suatu bangsa akan pula menjadi masalah bagi bangsa lainnya, dan tindakan eksploitatif terhadap lingkungan akan membuat "kemarahan alam" tidak hanya menimpa "si pelaku kejahatan", namun seluruh umat manusia.

Bermacam pendekatan yang berbasis egosentrisme entah negara, etnis, agama, atau kelompok tertentu yang lain akan tumpul dan kontra produktif dalam mengupayakan *problem solving* bagi krisis lingkungan. Alih-alih memberikan kontribusi terhadap upaya mereduksi dampak krisis lingkungan, pendekatan berbasis egosentrisme justru menjebak para *stakeholder* dalam fora global ini dalam kubangan konflik. Warga Negara Singapura dan Malaysia misalnya harus terganggu oleh gumpalan asap hitam yang berasal dari ulah jahat para pembalok yang membakar hutan Kalimantan. Suhu udara yang semakin panas dan membakar kulit penduduk Afrika dan Meksiko, misalnya pula merupakan produk dari tingginya produksi emisi Amerika, Cina dan Negara-negara pemroduksi emisi lainnya. Serta masih

banyak seabrek contoh betapa krisis lingkungan yang sejatinya disebabkan oleh tindakan tidak hormat terhadap alam oleh sebagian kecil manusia di suatu tempat di bumi akan sangat merepotkan banyak orang lainnya di belahan bumi lain.

Berangkat dari dasar argumentasi tersebut maka tidak bisa ditawar, betapa seharusnya aneka program yang ditujukan untuk mereduksi dampak krisis lingkungan harus dibangun di atas dasar kepentingan umat manusia (*cosmopolitan oriented*) sekali lagi bukan *micro oriented* untuk sejumlah kecil orang.

Pendekatan Cosmopolitan

Pasca perang dingin serangkaian perubahan mendasar telah terjadi dalam fora internasional. Para pelaku dalam ranah hubungan internasional yang sebelumnya didominasi oleh Negara kini semakin terbuka lebar bagi aktor-aktor bukan Negara (*non state actors*), aneka kelompok kepentingan dan penekan (*interest and pressure group*) yang beroperasi di dalam dan antar Negara, beragam organisasi dan perusahaan internasional baik milik negara maupun swasta, bahkan hingga kadar tertentu individu sangat berpotensi menjadi aktor dalam kancah global. Konflik, perang dan aneka pola interaksi dis-harmoni yang sebelumnya mendominasi pola interaksi antar aktor pada era sebelum berakhirnya perang dingin, kini bertahap mulai digantikan dengan kerjasama dan harmonisasi.

Berbeda dengan sistem internasional masa perang dingin yang ditandai pola hierarki isu, kini kedudukan isu di

sisi isu-isu lainnya menjadi berpola horizontal. Isu perang yang menjadi primadona, kini harus berkompromi dengan isu-isu lain seperti Hak Asasi Manusia, energi, lingkungan, kesehatan, pangan, ekonomi dan sebagainya untuk merebut perhatian media massa dan para decision maker. Isu-isu menjadi sangat dinamis seiring dengan semakin mengglobalnya bola bumi ini. Semakin beragamnya aktor dan semakin banyaknya isu inilah yang menjadi wajah baru fora internasional dewasa ini.

Sistem politik global kontemporer oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, digambarkan sebagai berpola *complex interdependency*, yakni terjadi saling kait-terkait yang sangat rumit dan akut antara aneka aktor dari beragam tingkat dengan derajat ke saling ketergantungan yang sangat kuat. Secara lebih operasional kedua ilmuwan tersebut lebih jauh memberikan sedikitnya tiga indikator yang menunjukkan *complex interdependency* sedang beroperasi, yaitu: (1) *Multiple Chanel* (multi jalur), yakni proses aksi reaksi antar para pelaku dalam fora internasional terjadi pada banyak jalur, baik jalur-jalur pemerintah maupun aneka alur non pemerintah dilalui; (2) *Multiple issues* (banyak isu), isu muncul secara berseling maupun bersamaan tanpa diganggu oleh pola hierarki isu seperti di era perang dingin; dan (3) tidak selalu relevannya pendekatan militer terhadap aneka permasalahan global (Jemadu, Aleksius: 2008).

Dalam konteks *complex interdependency*, aneka bencana alam yang terus-menerus menderu dengan jeda yang semakin pendek membutuhkan pendekatan metropolis, sebuah pendekatan berbasis kesejahteraan umat manusia di

seluruh permukaan planet bumi. Media massa, pemerintah, perusahaan-perusahaan, aneka organisasi internasional, bermacam kelompok kepentingan dan penekan, para aktivis lingkungan seyogyanya bersinergi—dengan menjadikan kepentingan umat manusia dan lingkungan sebagai orientasi—merespon dengan cerdas beragam permasalahan lingkungan. Dengan pendekatan model ini, saya yakin beragam permasalahan yang membuat berdiri buluk kuduk kita seperti korupsi bantuan bagi korban gempa oleh oknum, membengkaknya jumlah korban karena terlalu lama terjebak dalam reruntuhan, maupun keterlambatan bahan makanan dan obat akan semakin bisa ditekan.

Semarang, 16 Januari 2010

BAB 35

PEMDA, GO GLOBAL !

Rabu (2/12), sebuah seminar bertajuk "Menggali Peluang Ekonomi antara Jawa Tengah dan Negara-negara di Asia Tengah" digelar di Semarang. Pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri, TM Hamzah Thayeb, menuturkan, sebagaimana dikutip dalam www.tempointeraktif.com Rabu 02 Desember 2009: "Selama ini negara-negara di kawasan tersebut belum digarap cukup baik. Ke depan ini peluang yang prospek,".

Kerjasama luar negeri yang dilakukan antar Pemerintah Daerah (Pemda) dengan berbagai mitra di luar negeri menjadi kecenderungan (*trend*) yang tak terelakkan terutama di era global. Kendati demikian, sulit dipungkiri bahwa aneka kendala seringkali membuat kerjasama berhenti pada tahap penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*. Contoh paling mudah ditunjuk barangkali kerjasama dalam bentuk *sister province* dan *sister city*. Hingga tahun 2003 saja misalnya Deplu mencatat terdapat sedikitnya 75 kerjasama dalam bentuk tersebut, pada tahun selanjutnya meningkat menjadi 100 kerjasama dalam bentuk yang sama di tingkat nasional, walaupun *trend* nya positif, namun ternyata hanya 15 % yang berjalan dengan baik, 20 % berjalan dengan apa adanya dan sisanya 65 % menjadi perjanjian tidur.

Jika benar apa yang dikatakan Hamzah Thayeb, maka kerjasama tidak akan memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan di Jawa Tengah bila tidak dibarengi dengan kualitas penanganan kerjasama yang lebih baik, apa kendala

kerjasama internasional yang dilakukan Pemda dengan aneka miteranya di luar negeri? Dan apa yang harus dilakukan guna menaikkan derajat kualitas kerjasama, agar tidak hanya meningkat dalam jumlah penandatanganan *MoU* kerjasama semata, namun juga nampak kasat mata aneka hasil yang dapat diperoleh?

Globalisasi membuka peluang aneka kerjasama tidak hanya bagi aktor negara (*state actor*) namun juga untuk aktor-aktor non negara (*non state actors*) yang tidak diragukan lagi jumlahnya jauh lebih banyak dari pada negara. *Non state actors* seperti beragam *Non Government Organizations (NGOs)*, aneka *Multi National Corporations (MNCs)*, barjibun kelompok kepentingan (*interest groups*) maupun kelompok penekan (*Pressure Group*) hingga, bahkan, individu sekalipun memiliki peluang yang besar untuk turut meramaikan panggung global.

Salah satu aktor yang kian terang benerang peranannya dalam ranah global adalah Pemerintah Lokal (*local government*), baik Pemerintahan Kota, Provinsi maupun Negara Bagian . Aneka kerjasama dengan beragam aktor di luar negeri dari berbagai tingkat sedang dan akan terus dijalin oleh aktor yang kehadirannya di panggung internasional relatif baru ini.

Di tingkat global, hingga setidaknya tahun 2004 saja kerjasama yang telah dijalin oleh aktor berupa pemerintah lokal dan Negara kecil seperti Tokyo, Queensland, Semarang, Sao Paolo, Singapura, Brunei, Israel dan lain sebagainya telah menyentuh angka 11 ribu oleh sedikitnya 1200 negara kecil dan Pemerintah Lokal dari setidaknya 125 negara.

Di Indonesia, sebagaimana telah dituturkan sebelumnya, sedikitnya terdapat 100 kerjasama dalam bentuk yang sama pada tahun yang sama, saat ini jumlah tersebut tentu sudah jauh lebih banyak. Kendati demikian, angka yang cukup membanggakan tersebut tidak sejalan dengan besarnya harapan yang tersimpan dalam dada kita. Dari 100 kerjasama di tahun 2004 hanya 15 % yang berjalan dengan baik, 20 % berjalan dengan apa adanya dan sisanya 65 % menjadi perjanjian tidur. Hemat penulis sedikitnya ada 3 faktor yang menjadi batu sandungan bagi kerjasama jenis ini, yaitu: buruknya SDM, kecilnya pembiayaan dan lemahnya pemberdayaan masyarakat.

Buruknya SDM

Kemampuan dasar seperti bahasa asing, negosiasi dan diplomasi serta memetakan aneka potensi, peluang dan ancaman serta kelemahan dan kekuatan menjadi kebutuhan yang harus dimiliki oleh tidak hanya para *top manager* di Pemda namun juga para pelaku privat bila menginginkan kesuksesan dalam menjalin kerjasama dengan para mitra di luar negeri. Kemampuan bahasa asing kendati menjadi kebutuhan mendasar dalam berhubungan dengan mitra luar negeri tapi sulit dipungkiri bahwa tidak sedikit para *top manager* Pemda masih “gagap”—bila enggan untuk dikatakan “bisu”—dalam berbahasa asing.

Kecilnya pembiayaan

Kerap kali disepakati dalam *MoU* kerjasama, bahwa pembiayaan realisasi bermacam program yang disepakati

akan dipikul para mitra terkait. Kendati demikian bukan berarti kemudian biaya menjadi ringan karena dibagi, bahkan untuk sebagian Pemda, barang kali Jawa Tengah salah satunya, pembiayaan menjadi masalah berarti.

Kecilnya anggaran sangat berpotensi menjadikan kerjasama tidak merambah hingga wilayah teknis alias hanya berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman saja alias menjadi perjanjian tidur. Contoh yang bagus untuk kasus ini barang kali *Bussines Plane* yang telah dirancang ahli tata kerja dari Brisbane tentang pengembangan Agro Wisata Sodong maupun untuk tata Kota Semarang yang belum bisa direalisasikan sepenuhnya karena faktor pembiayaan setidaknya hingga tulisan ini dibuat.

Lemahnya pemberdayaan masyarakat

Kerjasama antar Pemda dengan para mitra di luar negeri, khususnya dalam bentuk *sister province/ city* pada dasarnya merupakan upaya memberikan payung hukum bagi aneka kerjasama lain yang bersifat lebih teknis dengan melibatkan masyarakat dan swasta. Keterlibatan aktor swasta dan masyarakat pada umumnya menjadi penggerak utama bagi dinamisasi kerjasama tersebut, kendati demikian sulit dipungkiri, kerjasama yang dilakukan Pemda sering kali didominasi oleh Pemerintah. Aneka program kerjasama kerap kali hanya berkutat pada tukar menukar pejabat pemerintah, rumah sakit atau Sekolah dan Perguruan Tinggi sedangkan ruang gerak aktor privat dan masyarakat pada umumnya nyaris tidak ada. Kecilnya pelibatan aktor privat dan masyarakat sebagai inti penggerak kerjasama diyakini

menjadikan alasan mengapa kerjasama menjadi perjanjian tidur.

Setidaknya dengan tiga perbaikan pada tiga permasalahan yang disinyalir sebagai batu tersebut tersebut akan meningkatkan tidak hanya kuantitas kerjasama namun juga mutu kerjasama. Gagalnya menyelesaikan aneka persoalan yang diyakini penyebab buruknya kerjasama akan menambah daftar panjang perjanjian-perjanjian tidur yang dilakukan Pemda.

Barang kali untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dan diplomasi bisa dilakukan dengan aneka pelatihan praktis bahasa asing dan kursus singkat diplomasi dengan bimbingan dan pengarahan berkesinambungan dari Deplu maupun para diplomat senior.

Sedangkan untuk tambahan anggaran guna realisasi kerjasama maka kreativitas para pelaku kerjasama sangat dibutuhkan, menggandeng berbagai lembaga internasional seperti PBB dan organisasi-organisasi lain yang memiliki *interest* akan sangat membantu, permisalan cantik yang dapat ditunjuk barang kali seperti *sister province* yang dilakukan Jawa Tengah dengan mitranya di negeri Kangguru, Queensland, khususnya dalam bidang kesehatan yang secara teknis diperankan oleh Rumah Sakit Kariadi dan *Matter's Motter Hosspital* (Queensland) dengan melibatkan *World Bank* sehingga berkenan memberikan bantuan berkesinambungan untuk pelatihan ulang 100 perawat Jawa Tengah senilai 7,5 juta *dollar* Australia.

Jika disepakati, tujuan Negara demokrasi adalah untuk memberikan sebaik mungkin pelayanan kepada warga

Negara, maka indikator paling mudah untuk menunjukkan apakah suatu kerjasama bermanfaat atau tidak adalah seberapa jauh kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat pada warga Negara, seberapa besar warga Negara dilibatkan dan memiliki kemampuan kontrol terhadap aneka kebijakan kerjasama luar negeri Pemda.

Kaitannya dengan lemahnya pemberdayaan aktor privat dan masyarakat dalam kerjasama luar negeri Pemda maka aneka program kreatif harus dimunculkan sehingga terbuka beragam peluang yang dapat melibatkan peran aktif masyarakat di dalamnya. Dengan penanganan yang kreatif dan profesional, maka Asia Selatan yang potensial sebagai mitra kerjasama akan membawa berkah dan banyak manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah.

Wawasan, 2 Desember 2009

BAB 36

SETAHUN BARA URUMQI

Pemerintah daerah otonomi Xinjiang yang terletak di bagian barat laut Republik Rakyat Cina telah meningkatkan keamanan. Pihak berwenang telah memperingatkan adanya ancaman "separatis" di wilayah tersebut setelah aksi kekerasan di Urumqi ibu kota provinsi itu Juli tahun lalu antara etnik Uighur yang Muslim dengan etnik Han yang mayoritas. Aksi kekerasan tersebut menewaskan hampir 200 orang dan 1.700 orang lainnya luka-luka.

Nampaknya konflik antar etnis Uighur dan Han akan berlangsung cukup lama, mengingat sedikitnya 2 (dua) alasan: (1) konflik melibatkan banyak orang; sehingga (2) dapat dipastikan ada aneka upaya profokatif untuk menyuburkan konflik yang dilakukan oleh anggota kelompok etnis bertikai.

Etnis Uighur yang terkonsentrasi dan berdomisili di daerah Otonomi Xinjiang adalah salah satu etnis minoritas resmi di Republik Rakyat Cina. Etnis ini merupakan keturunan dari etnis kuno Huihe yang tersebar di Asia Tengah, menuturkan bahasa Uighur dan memeluk agama Islam. Sementara etnis Han adalah mayoritas di Cina dengan kebanyakan mereka berfaham komunis. Keberadaan etnis Han di Xinjiang mengalami perkembangan pesat dari 10 % di tahun 50-an, kini jumlah mereka berkembang mencapai 40 %.

Terhadap tragedi tersebut maka pemerintah dituntut untuk sangat hati-hati dalam memberikan respon. Kegagalan dalam mengelola konflik antar etnis alih-alih memperbaiki

keadaan justru sangat berpotensi memperburuk dan memperumitnya.

Hemat penulis, sedikitnya ada 4 (empat) kebijakan strategis antisipatif yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengelola konflik agar setidaknya tidak memperburuk keadaan, yaitu: *pertama*, pemerintah harus mampu memposisikan diri sebagai mediator yangimbang, mencitrakan diri sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya, melindungi, mengayomi dan tidak berpihak. Kegagalan pemerintah dalam membangun citranya di mata para pihak berseteru berimplikasi pada semakin rumitnya persoalan.

Nampaknya posisi pemerintah akan sangat sulit mengingat pemerintah didominasi oleh etnis Han, yakni etnis mayoritas yang terlibat konflik, berat rasanya bagi etnis Uighur sebagai minoritas yang merasa *terdzalimi* untuk tidak berprasangka buruk kepada aneka tindakan pemerintah. Pemerintah juga harus tidak segan-segan mengevaluasi aneka kebijakan yang telah dilakukan sembari memperbaikinya. Keengganan pemerintah untuk mengevaluasi beragam kebijakan dan langkah-langkahnya sangat berpotensi menjebak para *stakeholder* (etnis Uighur, etnis Han, berbagai pelaku lain yang terlibat dan pemerintah sendiri) pada pola-pola lama yang jalan di tempat dan kontra produktif.

Kedua, pemerintah harus mengganti atau setidaknya mengurangi kebijakan represif. Aneka pendekatan dengan cara-cara militer dan kekerasan bisa dipastikan justru mengundang tindakan balik serupa dari pihak-pihak yang merasa terancam. Berbagai strategi pendekatan alternatif yang bersifat dialogis; lebih mengedepankan *soft power* dari

pada *hard power* dengan kekuatan militer; serta partisipasi dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat untuk memulai langkah-langkah konstruktif di masa depan.

Ketiga, pemerintah harus meyakinkan kepada pihak-pihak terkait betapa cara-cara kekerasan merupakan cara kontra produktif, tidak rasional dan merugikan semua pihak. Kendati perang diakui oleh para ilmuwan politik terutama yang berhaluan realis sebagai instrumen yang tidak akan pernah hilang dari kebudayaan dan peradapan umat manusia namun optimisme betapa cara kuno yang tidak rasional itu dapat direduksi semaksimal mungkin ditiupkan dan digelorakan oleh para pemikir liberal.

Para pemikir dari haluan terakhir ini memberikan alternatif pengganti perang dengan harmoni dan kerja sama, bila kerja sama mensyaratkan *simbiosis mutualisme* alias saling menguntungkan dengan kesadaran pihak-pihak terkait dalam melakukannya maka harmoni tidak mensyaratkan keduanya, pihak lain boleh saja mendapat keuntungan asal tidak merugikan yang lain.

Nampaknya dua metode terakhir ini (harmoni dan kerja sama) lebih relevan dengan konteks masyarakat moderen yang bercirikan *complex interdependency* (saling ketergantungan yang sangat kompleks dan akut karena aneka aktifitas sosial, politik dan ekonomi) dari pada konflik dengan kekerasan (perang). *Keempat*, aneka strategi tersebut seyogyanya dilakukan terus menerus dan berkesinambungan, tanpa meninggalkan evaluasi dan perbaikan. Karena konflik antar etnis berpotensi menjadi konflik berkepanjangan maka upaya pemerintah untuk mereduksinya harus menjadi agenda

yang selalu menjadi prioritas, bahkan ketika konflik sudah tidak menampakkan gejalanya sekalipun. Upaya tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk menciptakan konteks lingkungan yang subur demi menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerjasama di antara beragam etnis.

Pemerintah dituntut sebanyak mungkin membuka aneka peluang kerja sama yang melibatkan etnis berkonflik dalam sinergi yang memperkecil potensi konflik. Aneka aktifitas ekonomi terbukti cukup ampuh untuk menumbuhkan kesadaran saling ketergantungan satu sama lain. Strategi ini seharusnya sangat mudah dilakukan pemerintah mengingat Cina merupakan salah satu negara yang sangat ambisius dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Bila hal ini dapat dilakukan maka tidak hanya konflik antar pihak berseteru yang akan tereduksi namun juga prestasi ekonomi akan semakin terpompa.

Seramarang, 21 Juni 2010

BAGIAN KE DELAPAN: INDONESIA KONTEMPORER

REVOLUSI MENTAL POLITIK LUAR NEGERI JOKOWI

Paska pelantikan Senin (20/10) Jokowi menemui banyak perwakilan negara-negara asing. Selain memberikan selamat, sejumlah harapan terkait masa depan hubungan dengan Indonesia menjadi tema diskusi. Bagi bangsa Indonesia, tampilnya Indonesia sebagai emerging market (pasar yang sedang berkembang) dalam kancah global yang mampu memanfaatkan berbagai potensi di lingkungan internasionalnya untuk sebesar-besar memenuhi kepentingan nasional menjadi harapan.

Harapan ini menjadi sangat wajar, pasalnya postur Politik Luar Negeri Republik Indonesia (selanjutnya disebut: PLN RI) Indonesia selama ini sulit dipungkiri menjadi dominasi kepentingan elit, baik elit politik maupun bisnis. Seting inilah yang membutuhkan revolusi mental—sebagaimana menjadi salah satu jargon yang diusung Jokowi—guna merekonstruksi ulang PLN menjadi lebih dapat diandalkan untuk mendorong pembangunan seutuhnya, dalam arti tidak hanya terkonsentrasi pada secuil orang Indonesia semata.

Revolusi mensyaratkan perubahan mendasar hingga ke akar-akarnya. Perubahan yang bersifat seremonial dan hanya terjadi di lapisan kulit semata tidak termasuk dalam kategori ini. Revolusi dibutuhkan dalam konteks kebekuan politik dimana sumberdaya hanya dapat diakses oleh sekelompok kecil orang, sementara kelompok besar lainnya tidak memiliki akses yang cukup. Sementara revolusi mental dalam PLN mengarah pada pemahaman perubahan sudut

pandang dari yang semula memposisikan diri sebagai pihak inferior, pihak yang kalah, hanya menjadi objek dan korban menjadi pihak yang independen, sadar diri, aktif dan menjadi pelaku yang utuh dalam menentukan nasib sendiri dan bernegosiasi secara setara.

PLN RI semenjak era kemerdekaan hingga SBY sulit dipungkiri hanya menjadi dominasi elit. Pada masa paska kemerdekaan PLN RI diarahkan pada negosiasi mendapatkan pengakuan dunia internasional, peran Sukarno dan Hatta sangat dominan. Situasi politik domestik yang masih labil karena munculnya banyak gerakan pemberontakan memungkinkan munculnya kedua sosok pemimpin nasional itu memiliki kontribusi besar pada arah PLN RI. Kendati Hatta mengkonsep prinsip: bebas aktif, namun sulit dipungkiri PLN RI di era itu lebih condong ke Uni Soviet. Hal ini dilakukan terkait dengan terbangunnya wacana, Amerika dan Eropa identik dengan penjajah.

Di era Suharto yang mewarisi krisis ekonomi, maka pembangunan menjadi tema sentral. Suharto dan militer memainkan peran penting dalam merumuskan arah PLN RI, kali ini demi memperlancar bantuan-bantuan asing maka PLN RI lebih condong ke barat atau tepatnya Amerika. Sementara di era paska reformasi sulit dipungkiri PLN RI nyaris kehilangan karakter. Tiga presiden paska reformasi (Habibie, Gus Dur dan Mega) hanya berkesempatan memimpin untuk waktu singkat sehingga arah PLN RI belum nampak jelas. Sementara pada era SBY PLN RI lebih condong ke Amerika. Bentangan sejarah PLN RI dari masa Sukarno hingga SBY menunjukkan adanya dominasi kuat dari elit baik politik,

militer maupun bisnis, sehingga sulit dipungkiri kepentingan nasional hanya dipahami dari prespektif (dan menguntungkan) elit semata.

Pada konteks kebekuan perspektif akibat dominasi elit, maka revolusi mental dalam PLN RI dapat diarahkan untuk merombak kontruksi lama tersebut dan membangun kembali dalam format PLN RI yang memiliki cakupan lebih luas terhadap partisipasi beragam aktor nasional guna memperjuangkan kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks ini, misalnya, liberalisasi ekonomi dilihat tidak dalam konteks hitam putih, baik buruk semata namun lebih pada apakah paralel dengan kepentingan nasional atau tidak. Dan yang perlu digaris bawahi adalah kepentingan nasional harus diletakkan dalam spektrum yang membentang luas mencakup tidak hanya kepentingan elit maupun kelompok penguasa namun juga kepentingan masyarakat dalam arti luas.

Ada 3 tantangan yang membutuhkan penanganan revolusioner terkait dengan PLN RI di bawah kepemimpinan Jokowi JK. *Pertama*, tantangan di level domestik. Mau tidak mau penetrasi global akan menempatkan bangsa Indonesia pada posisi tidak dapat mengelak dari persinggungan dengan beragam aktor dan isu global, satu-satunya pilihan adalah membangun kualitas diri jika tidak ingin menjadi pecundang. Serbuan aneka produk Cina yang membanjiri pasar domestik menjadi tantangan bagi produsen domestik untuk menciptakan produk bersaing. Sangat layak, hemat penulis, pemerintah baru memberikan perhatian yang lebih besar melalui berbagai program peningkatan kemampuan berkompetisi.

Kedua, di tingkat kawasan, Indonesia dihadapkan pada kebagkitan India dan Cina. Kedua negara tersebut melakukan penetrasi ekonomi kepada Indonesia melalui jalur yang berlapis-lapis. Di lapis pemerintah kepentingan India dan Cina ditransformasikan melalui negosiasi dan diplomasi yang jelas terlihat dalam semakin solidnya gerakan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di lapis pelaku bisnis agresivitas Cina nampak dari membanjirnya ekspor negeri tirai bambu ke nusantara, sementara agresivitas India nampak dari menguatnya pembangunan wacana India melalui industri perfileman. Ini terlihat dari menjamurnya film-film India di Indonesia, bahkan hingga road show bintang Pandawalima. Diplomasi budaya yang merupakan kolaborasi pemerintah dengan pelaku insan film juga telah dilakukan dan sukses besar oleh Jepang dan Korea yang telah mampu merekonstruksi persepsi bangsa Indonesia kepada kedua negara tersebut. Strategi inilah yang dilakukan India di Indonesia sebelum pada akhirnya produk-produk India akan lebih banyak mengalir ke tanah air.

Dalam seting regional tersebut maka pemerintah Jokowi JK harus mampu memetakan dengan sangat baik aneka potensi ekonomi di nusantara sehingga mampu mendefinisikan secara kuantitatif maupun kualitatif mana produk dalam negeri yang mampu bersaing dan mana yang belum siap, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah strategis terkait dengan seberapa liberalkah perekonomian nusantara didorong. Paralel dengan hal ini, pemerintah juga dituntut menguatkan nasionalisme ekonomi, melalui misalnya promosi produk-produk domestik secara masif bersamaan

dengan realisasi program-program peningkatan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri.

Ketiga, di tingkat global tantangan Jokowi tidak kalah beratnya. Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) menjadi pasar raya yang menjanjikan sekaligus merisaukan. Keduanya memerankan peran politik strategis di tingkat global. Terhadap AS pemerintahan Jokowi dituntut mampu menjadi mediator "smart" bagi hubungan Islam-Barat. Benturan-benturan kepentingan AS di Timteng yang misalnya nampak pada konflik Arab-Israel sering memicu gejolak muslim di Tanah Air yang dapat berpengaruh pada perekonomian nasional. Pada tahap ini politik pencitraan perlu dilengkapi langkah-langkah strategis. Menariknya, bila dilakukan dengan "pintar" pemerintah sangat mungkin membuka potensi-potensi kerjasama ekonomi dengan AS dan negara-negara Timteng.

Sementara dengan UE, pemerintah dihadapkan pada upaya negosiasi untuk membuka pasar UE bagi produk Indonesia. Berbagai standarisasi dan regulasi dapat disiasati dengan misalnya: (1) jalur negosiasi pejabat dimana pemerintah dapat menawarkan kerjasama-kerjasama saling menguntungkan; dan (2) pemerintah dituntut mampu mendorong produsen domestik meningkatkan kualitas demi standarisasi UE. Interaksi ekonomi dengan UE sangat menjanjikan. Sebagai kelompok negara eksklusif dengan tingkat perekonomian tinggi, produk nasional yang dapat menembus pasar UE memiliki efek bombastis di dalam negeri.

Identifikasi masalah-masalah internasional dan mempersiapkan upaya penanganannya pada tiga level

tersebut (domestik, kawasan dan global) membutuhkan revolusi mental dalam PLN RI. Revolusi mental membutuhkan peran pakar dari universitas selain peran pemimpin visioner dan revolusioner. Jokowi JK diyakini bangsa Indonesia mampu memainkan peran ini.

BAB 38

KRISIS IDENTITAS DAN ANCAMAN ISIS

Islamic State of Iraq and Syria [ISIS] merupakan gerakan politik untuk membangun Kekhalifahan Islam di Irak dan Siria dari Fallujah hingga Aleppo. Gerakan tersebut lahir setidaknya 10 tahun yang lalu ketika Irak diinvasi Amerika. Sedikitnya ada 2 sasaran serangan ISIS yaitu Amerika dan warga Syiah yang duduk di Pemerintahan Irak. Dalam konteks ini maka ISIS lebih mudah dipahami sebagai reaksi dari pada sebagai aksi. Anggota ISIS direkrut dari mantan tentara Irak dan warga negara lain. Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar nampaknya sedang menjadi incaran ISIS untuk merekrut sebanyak mungkin anggota. Tulisan ini bertujuan menjawab dua pertanyaan: [1] mengapa seseorang memutuskan diri bergabung ke dalam ISIS?; dan [2] strategi apa yang tepat digunakan untuk menangkal tersebarnya paham ISIS di Indonesia?

Krisis identitas

Koneksitas global yang kompleks sebagai akibat revolusi teknologi informasi dan transportasi telah membuka ruang yang lebar bagi identitas-identitas yang semula bersifat lokal untuk berkompetisi dan mengglobal. Kewarganegaraan untuk waktu yang lama menjadi identitas politik utama namun seiring dengan semakin menguatnya arus globalisasi, kewarganegaraan harus bersaing dengan identitas-identitas lain, seperti agama dan etnisitas.

Seseorang bisa memiliki banyak identitas sekaligus seperti pada saat yang sama seseorang bisa beridentitas muslim, jawa, indonesia, mahasiswa, buruh, guru, pengusaha dan yang lain. Identitas-identitas yang berkumpul pada diri seseorang tidak selamanya menentukan perilaku politik orang

tersebut samapai pada akhirnya isu tertentu memancing salah satu identitasnya lebih menonjol dari pada yang lain dan menuntun perilaku politiknya.

Misalnya saat muncul isu Putus Hubungan Kerja [PHK] seorang karyawan yang pada saat bersamaan adalah mahasiswa, muslim, jawa akan lebih merasa sebagai karyawan ketimbang yang lain dan memosisikan dirinya secara politik berhadapan dengan pengusaha. Namun di saat yang berbeda ketika misalnya muncul isu agama tunjuk saja isu Palestina maka identitas sebagai muslim akan muncul dan mempengaruhi perilaku politiknya, demikian seterusnya.

Dalam konteks ISIS maka bangsa Indonesia yang memiliki identitas muslim akan memiliki kemungkinan untuk dipancing identitasnya sebagai muslim yang konsekuensinya berarti harus peduli dengan berbagai masalah-masalah muslim Irak dan Siria—setidaknya menurut doktrin ISIS. Orang misalnya akan lebih suka mencitrakan diri sebagai muslim dengan konsekuensi-konsekuensi politiknya ketimbang misalnya menjadi seorang patriotik karena memang konteks, situasi dan isu yang berpotensi memicu munguatnya patriotisme melemah, ini bisa disebabkan misalnya oleh kekecewaan terhadap para pejabat negara dan lain sebagainya. Dengan kerangka berfikir ini, maka mudah memahami kenapa seseorang tidak begitu sulit untuk bergabung dengan ISIS.

Bila demikian maka dalam merespon masuknya paham ISIS di Indonesia, tidak cukup menggunakan pendekatan-pendekatan represif, namun justru yang lebih penting adalah pendekatan yang bersifat menguatkan identitas

kewarganegaraan dan keislaman ala Indonesia yang toleran dan plural guna membendung desakan paham ISIS. Dalam konteks tersebut maka yang berperan penting tidak hanya negara namun seluruh unsur bangsa ini dari mulai tokoh masyarakat dan agama, media massa, pendidikan dan seluruh masyarakat secara luas.

Peran apa yang mereka lakukan untuk menolak paham ISIS? Hemat penulis, yang terpenting adalah menguatkan identitas kewarganegaraan dan keislaman ala Indonesia. Bentuk operasionalnya bisa berupa sosialisasi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan NU atau bagi perguruan tinggi barangkali membuat forum-forum dialog yang mencerahkan bagi masyarakat. Dalam hal ini maka peran para tokoh baik agama maupun masyarakat sangat penting. Hal tersebut tentu sangat sulit—bila enggan mengatakan: tidak dapat—dilakukan secara seponatan, karena membangun identitas memerlukan waktu yang lama. Karena sasaran ISIS kebanyakan adalah generasi muda usia 18 hingga 30 tahun maka upaya pencerahan sebaiknya diutamakan pada mereka.

Dengan cara-cara yang bersifat pencerahan terhadap warga negara dan mempertegas identitas bangsa melalui berbagai metode yang memungkinkan, hemat saya, akan lebih efisien untuk menangkal ISIS ketimbang hanya megandalkan cara-cara represif. Bila secara individu maupun kolektif warga negara Indonesia telah tercerahkan dan memiliki identitas kebangsaan yang kokoh maka dengan sendirinya “jualan” ISIS tidak akan laku di negeri yang kita cintai ini.

Amien. Penulis adalah staf peneliti pada Pusat Kajian Timur Tengah dan Politik Islam [PKT2PI], Unwahas.

BAB 39
BALI DEOKRASI FORUM

Demokrasi dianggap sebagai sistem politik terbaik di dunia. "Negara tradisional" yang semula hanya dikuasai oleh para raja secara privat kini oleh demokrasi diubah menjadi milik publik. Sebagai pandangan politik yang mengandung nilai-nilai universal demokrasi untuk rentang waktu yang lama telah berjuang untuk hidup. Di Jerman demokrasi harus berjuang melawan Nazi, di Itali demokrasi harus berhadapan dengan Fasis, di Uni Soviet demokrasi justru lahir dari dalam setelah warga negara merasakan desakan otoritarianisme komunis yang dianggap gagal menjunjung martabat manusia dan keruntuhan negara komunis terbesar di dunia ini menjadi tonggak penting bagi progresivitas demokrasi dunia. Francis Fukuyama menyebutnya sebagai *the end of history* dengan meyakini sejarah dunia tidak lagi akan bercerita tentang pertarungan ideologi, karena nilai kemanusiaan universal telah disadari oleh umat manusia. Di Timur Tengah Arab Spring merubah secara nyaris serentak rezim-rezim otoriter. Ringkasnya sistem politik yang menempatkan warga negara sebagai pusat kekuasaan ini menjadi sangat populer dan hampir semua negara di dunia—kecuali hanya beberapa—mengaku sebagai negara demokrasi.

Pada perkembangannya demokrasi mengalami reduksi makna. Ia menjadi citra dan simbol agung yang dibanggakan. Media massa mensimplifikasi demokrasi dari realitas yang kompleks menjadi ikon imajiner yang kemudian dengan mudah dilabelkan kepada suatu negara. Hanya untuk tujuan pragmatis misalnya memancing investor. Demokrasi dikaitkan dengan bantuan politik dan menjadi alasan suatu negara mengintervensi negara lain. Nilai universalitas

demokrasi dipercaya menembus batas sekat-sekat negara dan menjadi alasan bagi sebagian orang untuk menggunakan intervensi militer secara legal.

Paradok BDF

Indonesia merupakan negara demokrai terbesar ke tiga di dunia, setelah India dan Amerika; dan terbesar di Asia. Perjuangan demokrai Indonesia sebagai negara, terjal dan berliku. Setelah mengalahkan otoriterianisme kolonial, bangsa ini beralih memasuki rezim demokrasi yang masih harus memakai embel-embel: terpimpin. Kemudian setelah pemerintah memenangkan upaya pemberontakan komunisme—yang andaisaja mereka menang juga akan menawarkan otoriterianisme—bangsa Indonesia beralih dari rezim demokrai terpimpin ke otoriterianisme Orde Baru. Hingga akhirnya krisis ekonomi memaksa kelas menengah untuk bangkit dan menumbangkan penguasa. Baru setelah itulah secara “resmi” Indonesia memasuki era demokrasi dengan segala kecacatannya.

Pemerintahan SBY mewarisi demokrai dari perjuangan panjang demokrasi di Indonesia, di saat demokrasi sekarang—kendati perjuangannya belum tuntas—namun prestis yang ditimbulkannya sungguh istimewa. BDF merupakan bentuk simplifikasi demokrasi dari perjuangan berat melawan penguasa menjadi simbol untuk bersolek. Di mulai pada Desember 2008 dengan 11 negara sebagai peserta dan dilaksanakan setiap tahun di Bali, kini pada pelaksanaan yang ke 6 forum tersebut mampu menghadirkan 86 negara.

Menurut saya ada sedikitnya tiga poin yang membuat forum demokrasi ini terkesan elitis dan berorientasi pencitraan.

Pertama, BDF baru melibatkan masyarakat sipil pada penyelenggaraan kali yang ke tiga setelah mendapat banyak kritikan, bahkan pada penyelenggaraan terakhir, akhir 2013 kemarin kendati masyarakat sipil sudah dilibatkan namun masih dalam porsi yang kecil. Mereka misalnya hanya mengikuti acara pembukaannya saja. Maknanya adalah para pemimpin negara-negara dalam BDF nampaknya belum siap bila harus duduk bersama dengan masyarakat sipil. Demokrasi yang menjadi tema utama dalam forum tersebut belum sungguh-sungguh diperjuangkan. Bila begitu maka, tidak berlebihan dikatakan bahwa forum tersebut masih berorientasi pada; **kedua** pencitraan. Citra demokrai yang mantab menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Dan dalam sistem ekonomi kapitalis investasi bagi penguasa adalah pertumbuhan ekonomi, terlepas dari apakah pertumbuhan tersebut berkorelasi dengan daya beli kebanyakan atau tidak. Pertumbuhan ekonomi menjadi pencapaian primadona bagi pemerintah, bila begitu maka kesan politik legitimasi penguasa sangat kental.

Ketiga, kesan pencitraan semakin lebih kuat, bila kita mengamati tema yang diusung BDF ke VI di Nusa Dua Bali kemarin. Arab Spring menjadi kajian utama justru ketika kemanusiaan di Myanmar sedang di cabik-cabik. Bila prinsip demokrai adalah *button up* [dari bawah ke atas] maka propbelamtika demokrasi di Asia harus menjadi prioritas utama.

Kendati demikian kesan elitis dan pencitraan tidak akan berkonotasi negatif bila dibarengi dengan upaya nyata. Pelibatan masyarakat sipil, produksi regulasi baik di tingkat domestik maupun internasional yang membuka ruang-ruang baru bagi partisipasi masyarakat luas. Penghormatan terhadap HAM, kebebasan politik serta kesejahteraan dan pemerataan ekonomi saya kira menjadi barometer penting yang perlu menjadi hirauan utama kebijakan pemerintah di Asia.

Semarang, 2014

SUMBER GAMBAR PADA SAMPUL BELAKANG



Proyek pembangunan daerah,
sumber gambar:
<http://www.merdeka.com/uang/proyek-pembangunan-daerah-harus-libatkan-pengusaha-lokal.html>



Suasana Perang, sumber gambar
<http://hizbut->

tahrir.or.id/2009/04/06/komentar-politik-atas-perang-1967-yang-dipublikasikan-tanggal-12-juni-1967/



SBY berjabat tangan dengan Obama,
<http://www.merdeka.com/peristiwa/obama-terpilih-sby-harap-kerjasama-dengan-as-semakin-mulus.html>



Salah satu bangunan di Bangalore, sumber gambar:
http://www.pc-progress.com/Documents/Workshop_2012_India/bangalore1.JPG
, diakses 15 Januari 2013.



Mbatik cating, sumber gambar,
<http://lifeskillkerajinantradisional.blogspot.com/2012/11/kerajinan-tradisional-moronene-sulawesi.html>

TENTANG PENULIS



Sugiarto Pramono lahir di Tegal 2 Pebruari 1983, setelah menamatkan Madrasah Aliyah Futuhiyyah 1 Mranggen Demak pada tahun 2001, Penulis melanjutkan studinya di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) dan selesai pada 2005. Kemudian melanjutkan studi S2 di FISIP UGM pada Jurusan yang sama di tahun 2010, selesai pada tahun 2012. Sekarang penulis aktif mengajar di FISIP UNWAHAS. Dapat dihubungi melalui hp: 087 861 287 670 atau email: sugiartop@gmail.com

Tulisan yang telah dipublikasikan

No	Judul	Media	Tanggal
1	Pergeseran Politik Luar Negeri India terhadap Myanmar [buku ber ISBN]	Wahid Hasyim University Press	Februari 2013
2	Memahami potensi lokal, bersaing di pasar global [buku	Wahid Hasyim University Press	Maret 2013

	ber ISBN]		
3	Perjuangan menuju Fair trade: pengalaman APIKRI dalam memediasi pengrajin lokal dan D'Best Furniture dalam mensiasati eco labeling	SPEKTRUM, Vol 12, No 2, Juli 2012	1 Juli 2012
4	Meneropong masa depan komunitas ASEAN 2012	SPEKTRUM, Vol 7, No 1, Januari 2010	Januari 2010
5	Faktor pendorong melakukan kerjasama <i>sister province</i> Jawa Tengah-Queensland [Australia] 1991-2009	EKSPLANASI, Vol 4, No 8, Oktober 2009	Oktober 2009
6	Membaca peluang dari Jepang	koran sore wawasan	14 Sept 2009
7	ASEAN Charter, omong kosong	koran sore wawasan	14 Okt 2009
8	Pemda go global	koran sore wawasan	2 Des 2009
9	Negara sadar nuklir	koran sore wawasan	6 Maret 2010
10	Neo Pax Americana	koran sore wawasan	1 Feb 2010
11	Membaca Kepentingan Amerika di Indonesia	koran sore wawasan	15 Maret 2010
12	ASEAN dan krisis	koran sore	31 April

	Thailand	wawasan	2010
13	60 tahun Indonesia-Cina	koran sore wawasan	6 Mei 2010
14	Intifada Jilid 2	koran sore wawasan	8 Juni 2010
15	Arogansi Israel	kedaulatan rakyat	12 Juni 2010
16	Peran Pemkot dan masyarakat sipil dalam <i>up grading</i> kota tua: studi perbandingan Batavia lama dan Ciutat Vella	Website Institute of International Studies: iis-ugm.org	5 Juli 2011

"MEMBACA" HUBUNGAN INTERNASIONAL: Dari perang antar negara hingga pembangunan lokal

Rekaman sejarah umat manusia menunjukkan kepada kita betapa masyarakat di planet bumi semakin saling terkoneksi dengan luasan dan kedalaman yang semakin cepat, sehingga bumi menjelma menjadi kampung global (*global village*) dengan penduduk global yang mendiaminya.

Setiap masalah yang dihadapi umat manusia menuntut partisipasi secara proporsional dari masyarakat global. Koneksitas yang semakin tinggi membawa konsekuensi setiap masalah seringkali memiliki efek bombastis, sehingga mau tidak mau umat manusia dipaksa untuk peduli dan ikut campur

